



HITAM PEKAT HIDUP WARGA DI JAWA TENGAH

Laporan Kolaboratif LBH Semarang Bersama Media

HITAM PEKAT HIDUP WARGA DI JAWA TENGAH
Laporann Kolaboratif LBH Semarang
Bersama Media Jawa Tengah

Kontributor

Aninda Putri K.
Aris Mulyawan
Baihaqi Annizar
Heri C. Santoso
Iwan Arifianto
Jamal Abdun Nashr
M. Dafi Yusuf
Mariana Ricky P.D.
Praditya Wibisono
Ulil Albab A.

Editor

Fahri Salam
Luviana Ariyanti

Layout & Design Cover

Nukhan Dzu

Diterbitkan oleh:

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
-Lembaga Bantuan Hukum (LBH Semarang)
Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang,
Candisari, Kota Semarang 50256
Email: Office.lbhsemarang@ylbhi.or.id
Website: lbhsemarang.id

Daftar Isi

Pengantar.....	4
Titir Kentungan Melawan Bau Busuk Limbah	
PT RUM Sukoharjo.....	6
Gertak Sambal Tambang Pasir Ilegal.....	16
Ugal-ugalan Tambang di Sukolilo Pati.....	28
Nasib Suram Buruh Perempuan Jateng Dengan Upah Murah.....	38
Upah Murah di Jawa Tengah: Buruh Sekarat, Industri Merapat..	46
Nasib Hutan Mangrove di Pesisir Semarang Jawa Tengah :	
Dikejar Abrasi, Dihantam Oligarki.....	54
Cerita Pejuang Mangrove Semarang : Upaya Terakhir	
Selamatkan Tembok Pesisir.....	66
Tol Tanggul Laut Semarang Demak Ancam	
Timbulkan Abrasi Tinggi	78
Tol Tanggul Laut Semarang Demak, Minim Sosialisasi dan Ganti Rugi Belum Tuntas.....	86
Usulan Penambangan Pasir Laut untuk Tol Semarang- Demak, Ancam Abrasi di Tiga Desa.....	92
Anggaran Besar Pengendalian Banjir Semarang	98
Tak Sentuh Akar Masalah- Banjir	
Masih Mengancam Semarang.....	112
Petani Dieng Menolak Ekspansi Proyek Panas Bumi Geo Dipa...	116
Konflik Agraria di Rawa Pening, Patgulipat Patok	
Negara-Tentara di Tanah Rakyat.....	124
Ada Motif Turisme di Balik Proyek 'Pemekaran'	
Danau Rawa Pening.....	138
Sejarah Permukiman Tanah Rawa Pening, Dihuni Warga sebelum Indonesia Ada.....	144

Pengantar

Pada Februari mendatang (2024), kita akan menghadapi salah satu peristiwa penting dalam negara demokrasi, yaitu pemilihan umum Presiden. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang paling ‘manis’ untuk dikerubungi para calon Presiden untuk mengisi kantong-kantong suara untuk kemenangannya. Bagaimana tidak, terdapat 37.032.410 jiwa hidup di Jawa Tengah.

Namun, kami sedang tidak akan membahas bagaimana cara merebut hati pemilih di Jawa Tengah, pada kesempatan ini, izinkan kami, untuk mempublikasikan satu bundel laporan kolaboratif dengan beberapa kawan-kawan wartawan dan media lokal di Jawa Tengah. Laporan ini, kami luncurkan pada momentum dan waktu yang tepat. Di saat, Ganjar Pranowo telah menyelesaikan jabatannya untuk sepuluh tahun terakhir sebagai Gubernur.

Laporan ini, kami harapkan dapat menjadi ruang belajar politik rakyat dan menjadi salah satu preferensi bagi seluruh rakyat di Indonesia untuk dapat melihat secara mendalam tentang rekam jejak sosok yang mungkin akan rakyat pilih di kemudian hari.

Ganjar Pranowo dicitrakan dan meng-klaim dirinya, serta dikampanyekan melalui media-media mainstream sebagai sosok yang tegas dan berpihak kepada rakyat, seperti slogannya ‘Tuanku ya Rakyat, Gubernur Cuma Mandat’. Dalam laporan ini, kami menyajikan dua belas laporan pilihan yang terdiri 11 laporan indepth dan 1 laporan investigasi. Dua belas laporan ini bukanlah peristiwa dan kasus yang baru terjadi, kami ingin mengajak masyarakat untuk bisa melihat secara mendalam tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di Jawa Tengah sepanjang jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur.

Secara ringkas, berbagai persoalan yang berhasil di capture oleh

kawan-kawan jurnalis menunjukkan pola selama periode jabatannya, ditunjukkan untuk menghimpun investasi sebesar-besarnya di Jawa Tengah. Untuk tujuan itu, telah dipaparkan di dalam laporan yang ditulis oleh Jurnalis Anin dan Baihaqi, bagaimana Upah Murah menjadi gula-gula untuk menarik investor. Penyiapan-penyiapan infrastruktur, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga energi panas bumi Geodipa di Dieng yang ditulis oleh Jurnalis Wiby. Penyiapan Kawasan industri besar-besaran di Jawa Tengah yang akan mengakibatkan penggusuran, alih fungsi lahan dan pembabatan Kawasan mangrove di sepanjang pesisir Kendal-Semarang yang berhasil di-capture oleh Jurnalis Ulil dan Iwan. Termasuk penyiapan infrastruktur konektivitas melalui TTLSD yang juga ditulis oleh Jurnalis Ulil. Pola lainnya, yang dapat dilihat adalah pengerahan aparat baik Kepolisian maupun Tentara. Dampaknya, luar biasa menyengsarakan rakyat. Alih-alih memberikan kesejahteraan, banjir, rob, kondisi buruh yang tak akan pernah keluar dari kemiskinan, rentan menjadi korban kekerasan seksual terutama bagi buruh perempuan, penggusuran, dan yang tak lupa adalah perusakan dan pencemaran yang merugikan lingkungan hidup dan masyarakat. Pula berhasil dipaparkan di dalam tulisan Jurnalis Jamal, Aris, Anin dan Ulil.

Kita bisa melihat semakin dalam kemudian memahami bahwa situasi yang dipaparkan ini adalah gambaran bagaimana ketika sosok yang pernah memimpin Jawa Tengah akan memimpin Indonesia. Melalui tulisan-tulisan ini, sudah selayaknya perilaku Gubernur diganjar dengan hukum, bukan malah disanjung-sanjung!

Sekali lagi, peristiwa yang dipaparkan dalam laporan ini adalah sebagian kecil dari peristiwa-peristiwa atau permasalahan yang dihadapi oleh warga Jawa Tengah. Tentu, potret ini sudah seharusnya bisa menjadi satu alat bantu untuk memikirkan bagaimana pilihan rakyat Indonesia akan berlabuh.

Demikian. Tabik

-Tim Penyusun.



Titir Kentungan Melawan Bau Busuk Limbah PT RUM Sukoharjo

Oleh; Mariyana Ricky P.D.

Solopos.com, SUKOHARJO — Puluhan warga memukul kentungan dan titir saat mengikuti aksi Festival Sungai Bengawan Solo Njogo Kali, Njogo Bumi di Desa Gupit, Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (29/7/2023).

Beberapa di antara mereka ada yang membawa wayang kardus dengan berbagai pesan tertulis di badannya. Aksi bertajuk Titir Bareng Melawan Pencemar Lingkungan itu digelar dalam rangka memperingati Hari Sungai Nasional, sekaligus sebagai upaya warga setempat melawan dampak pencemaran limbah PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo yang dinilai mencemari Sungai Gupit yang bermuara di Sungai Bengawan Solo.

PT RUM merupakan korporasi yang memproduksi serat rayon dengan target 80.000 meter dalam setahun. PT RUM berdiri di atas tanah seluas 578.058 meter persegi di Jalan Raya Songgorunggi-Jatipuro, Desa Plesan, Nguter, Sukoharjo.

Dalam produksi serat rayon tersebut, mereka diperkuat oleh sekira 1.400 tenaga kerja. Selama proses produksi, warga sekitar mengeluhkan bau busuk yang menyengat sejak 2017.

Penelusuran jejak limbah PT RUM ini cukup panjang dan melibatkan nama produsen tekstil dan produk tekstil papan atas, PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex. PT Sri Rejeki Isman Tbk. yang diketahui bersangkutan dengan PT RUM cenderung berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.

Melansir Bisnis.com, Sri Rejeki Isman memang tidak mencantumkan RUM sebagai anak usaha. Namun, keberadaan RUM tidak lepas dari pengembangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Sritex. Laporan Keuangan Sritex tahun 2014 - 2018 mengungkap relasi antara Sritex, keluarga Lukminto dengan RUM. Dalam laporan keuangan tahun 2014, misalnya, SRIL secara khusus menjelaskan bahwa pembangunan PT RUM dimaksudkan untuk memperkuat suplai bahan baku serat rayon produksi pemintalan SRIL.

Bagaimana kiprah bisnis PT RUM? RUM diketahui mulai memproduksi serat rayon sejak tahun 2017. Bahan baku serat rayon adalah pulp atau bubur kertas jenis dissolving grade. Jenis bubur kertas merupakan bahan baku serat rayon.

Bahan baku utama yang digunakan menopang segmen pemintalan Sritex. Perusahaan ini ditargetkan memproduksi 80.000 ton serat rayon untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Namun alih-alih mengurangi impor, kebutuhan bahan baku, dissolving grade, RUM sangat tergantung dari suplai barang dari luar negeri. Pihak RUM mengimpor bahan baku dari beberapa negara seperti Austria, Brazil, hingga Kanada.

Data Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) mencatat dalam kurun 2017 - 2018 total impor dissolving grade RUM dengan kode harmonized system (HS) 47020000 mencapai 21.971,5 ton senilai US\$20,7 juta. Jumlah ini terdiri atas 12.119,7 ton atau senilai US\$11,7 juta pada 2017 dan pada 2018 sebanyak 9.851,8 ton (US\$9,03 juta). SRIL diketahui mulai membeli serat rayon dari RUM senilai US\$2,15 juta pada 2017. Nilai transaksi pembelian serat rayon RUM oleh Sritex tercatat naik pada 2018. Total transaksi pembelian SRIL atas bahan baku serat rayon dari RUM pada waktu itu senilai US\$2,64 juta atau sekitar Rp36,9 miliar.

Transaksi pembelian antara PT Rayon Utama Makmur (RUM) dan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) naik cukup signifikan pada tahun 2019 mencapai US\$10,08 juta atau naik hampir empat kali lipat dibandingkan tahun 2018 yang mencapai US\$2,6 juta.

Padahal pengakuan manajemen PT RUM, perusahaan belum beroperasi optimal lantaran terganjal persoalan lingkungan (bau limbah hasil produksi).

Mengutip naskah publikasi skripsi Fauziah Ratih Widyastuti berjudul Sengketa Lingkungan Hidup (Studi Kasus PT. Rayon Utama Makmur (RUM) di Kabupaten Sukoharjo), 2018, bau busuk limbah yang dikeluarkan masyarakat membuat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sukoharjo untuk mengirim tim independen, guna mengaji limbah yang dikuarkan PT RUM. Berikutnya, tim independen mengambil sampel di sejumlah titik pembuangan yang berjarak 500 m dari pabrik, pada 31 Januari-5 Februari 2018.

Mereka kemudian mengujinya di laboratorium Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari uji laboratorium, sampel limbah cair PT RUM dinyatakan tidak memenuhi parameter baku mutu limbah cair berdasarkan Total Dissolved Solid (TDS) dan Chemical Oxygen Demand (COD). Pengolahan limbah gas PT RUM juga disinyalir belum memadai dalam pengurangan muatan gas H₂S. Maka bisa ditebak, warga sekitar pabrik mengalami dampaknya.

Laporan uji laboratorium tim independen menyebut, gas hidrogen disulfida (H₂S) dari PT RUM mempunyai densitas setinggi 1,393 g/dm³, atau di atas densitas udara (1,293 g/dm³). Setelah ditelisik absorsi gas di sekeliling cerobong pabrik rupanya belum berjalan maksimal. Artinya, warga sekitar dapat menghirup gas H₂S dengan mudah.

Masih mengutip naskah publikasi yang sama, penyelesaian sengketa limbah industri melalui mediasi di PT RUM tidak menemukan titik temu, sehingga pada tanggal 23 Februari 2018 Pemkab Sukoharjo resmi menutup izin operasional PT RUM. Keputusan itu meminta RUM untuk menghentikan sementara produksi serat rayon. PT RUM juga diberikan waktu 18 bulan, guna menuntaskan persoalan mengenai bau gas hasil produksinya.

Penghentian sementara PT RUM merupakan rangkaian dari tindakan administratif yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo sebelumnya. Tujuh bulan kemudian, pada September 2018, PT RUM kembali beroperasi dengan dalih sudah memasang alat penetral bau.

Namun, warga sekitar kembali terganggu dengan bau limbah. Bahkan, mereka menuding limbah dari PT RUM telah mencemari sungai sehingga

banyak ikan yang mati.

Puncaknya pada triwulan terakhir 2019, warga berunjuk rasa menyampaikan tuntutan, Tiga tuntutan itu ialah meminta penghentian pencemaran lingkungan PT RUM, pencabutan izin lingkungan PT RUM, serta meminta aparat tidak bertindak represif terhadap demonstran. Tuntutan terakhir bukanlah tanpa alasan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan warga kerap mendapatkan perlawanan keras dari aparat. Beberapa warga bahkan ditangkap.

Warga juga sempat mengungsi ke Rumah Dinas Bupati Sukoharjo yang kemudian ditolak masuk dan terpaksa tidur di depan gerbang hingga pagi. Perlawanan warga terus berlangsung seiring pabrik yang enggan berhenti beroperasi. Catatan Solopos.com, PT RUM baru memulai pengadaan H₂SO₄ recovery pada Februari 2020. Namun, PT RUM mengakui ada kendala dalam mendatangkan alat H₂SO₄ recovery karena pandemi virus Corona atau Covid-19.

Tidak hanya bau busuk, limbah cair yang dihasilkan PT. RUM juga mencemari air akibat pipa pembuangan limbah cair yang melintasi aliran Sungai Gupit hingga berakhir di Sungai Bengawan Solo. Beberapa kali air sungai tercemar akibat kebocoran pipa fiber yang berisikan limbah cair hasil produksi serat rayon.

Dampak pipa bocor tidak hanya mencemari sungai, tetapi juga merusak beberapa lahan sawah warga. Beberapa lahan warga terkena longsor akibat dari limbah yang bocor dari pipa tersebut. Sejak pertengahan 2022 PT. RUM berhenti beroperasi karena menipisnya bahan baku produksi. Hal ini tercantum pada surat direktur umum PT. RUM bernomor NO.005/RUM-DIR/VI 2022.

Hal ini dipertegas dengan surat resmi dari PT RUM yang dilayangkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Juni 2022. Surat resmi itu juga ditembuskan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo. Surat pemberitahuan belum produksi yang juga disampaikan sebagai tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo bernomor 015/RUM-DIR/IX/2022.

Dalam surat, tersebut PT RUM memberitahukan tiga hal alasan. Salah satunya yakni dengan pemberhentian produksi pihaknya tidak melakukan aktivitas pengolahan air limbah di instalasi pengolahan air limbah (IPAL) PT RUM.

“Sampai dengan surat ini dibuat kami belum bisa melakukan produksi karena keterbatasan bahan baku. Dengan berhentinya produksi tidak ada pula aktivitas pengolahan air limbah. Begitu juga untuk pemantauan manual kualitas air limbah yang sedianya dilakukan setiap bulan, tidak bisa kami lakukan,” tulis dalam tiga poin surat tersebut.

Pada, Kamis (9/3/2023), warga terdampak pencemaran PT. RUM mendaftarkan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) ke Pengadilan Negeri Sukoharjo (PN Sukoharjo). Hal tersebut menandai babak baru dalam perjuangan warga melawan PT RUM sejak akhir 2017. Sebelumnya warga sudah melakukan berbagai upaya untuk melawan pencemaran tersebut, mulai dari melaporkan kasus tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo (DLH Sukoharjo) hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat (KLHK), serta aksi massa.

Namun usaha tersebut belum pernah melahirkan hasil yang memuaskan bagi warga terdampak. Gugatan Class Action tersebut berakhir buntu Warga Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, yang mengajukan Class Action itu menawarkan enam poin dalam mediasi dengan PT RUM, Rabu (5/7/2023). Kuasa hukum warga Desa Gupit, Nasrul Saftiar Dongoran, saat dimintai konfirmasi Solopos.com pada Kamis (6/7/2023) mengatakan secara aturan untuk perkara perdata wajib diadakan mediasi oleh hakim sebelum pembacaan gugatan.

Sehingga pengajuan proposal itu merupakan mekanisme tahapan penyelesaian yang harus di ikuti oleh penggugat dan tergugat. “Usulan warga pada pokoknya tetap menginginkan PT RUM untuk menghentikan bau dan pencemaran lingkungan. Selain itu juga melakukan permohonan maaf secara terbuka serta memulihkan kerugian warga dan lingkungan,” ungkap Nasrul. Berdasarkan kesepakatan pada 21 Juni 2023 berkaitan dengan jadwal mediasi antara penggugat, tergugat, dan mediator dalam Perkara Nomor: 29/Pdt.G/2023/PN Skh, Nasrul membeberkan warga mengajukan enam poin dalam tawaran proposal perdamaian. Isi poin pertama, tergugat diminta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka karena telah menyebabkan bau busuk, pencemaran udara, dan pencemaran air di Kabupaten Sukoharjo.

Permintaan maaf disampaikan setidaknya melalui tiga media cetak nasional dan empat media cetak di Jawa Tengah selama tiga hari berturut-turut.

Kedua mereka meminta tergugat berhenti memproduksi serat rayon

dan menggantinya dengan jenis produk lain yang tidak menimbulkan bau busuk, pencemaran lingkungan, dan pencemaran air. Serta tidak merusak Sungai Gupit maupun Bengawan Solo dengan membuat roadmap penggantian produksi selama masa mediasi.

Pada poin ketiga mereka meminta agar tergugat mengganti biaya pemulihan atas kerugian yang dialami oleh para penggugat sebesar Rp5 miliar. Nantinya jumlah tersebut akan digunakan oleh para penggugat untuk membuat klinik kesehatan dan pemeriksaan kesehatan warga. Selanjutnya pada poin keempat, tergugat diminta segera membongkar pipa air limbah milik pabrik di daerah aliran sungai (DAS) maupun sempadan Sungai Gupit sampai ke Bengawan Solo.

Poin kelima, tergugat diminta mengganti biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp5 miliar yang akan digunakan oleh para penggugat untuk revitalisasi Sungai Gupit dan Bengawan Solo. Poin terakhir, jika tergugat telah menyetujui tawaran perdamaian yang kemudian dituangkan dalam akta perdamaian (akta van dading), namun di kemudian hari PT RUM melanggar kesepakatan dalam akta tersebut, maka seluruh harta benda milik tergugat menjadi milik para penggugat dan anggota kelompok.

Kuasa hukum warga dari LBH Semarang, Nico Wauran, mengatakan PT RUM mengatakan tidak bisa memenuhi tuntutan warga. Warga yang juga aktivitis lingkungan hidup Desa Gupit, Sarmi, mengatakan pihaknya tetap akan berjuang mendapatkan keadilan atas dugaan pencemaran lingkungan yang telah dirasakan sejak 2017. Meski proses hukum masih mengambang, warga optimistis dengan langkah hukum yang mereka tempuh.

“Setiap pekan kami menyempatkan diri menghadiri persidangan di PN Sukoharjo. Kami juga meninggalkan pekerjaan masing-masing, hanya sedikit yang ikut mewakili untuk menghormati persidangan supaya tidak terlalu ramai,” papar Sarmi, Kamis. Terpisah, Kuasa Hukum PT RUM, Dani Sriyanto, mengklaim PT RUMi terus melakukan perbaikan, ia juga meminta masyarakat melihat PT RUM sebagai aset.

Jika pabrik tersebut tutup akan banyak dampak yang ditimbulkan. Banyak karyawan yang akan menganggur, tingkat perekonomian masyarakat yang terganggu juga penghasilan devisa yang menurun. Mereka mengajukan dua penawaran perdamaian kepada warga Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Sukoharjo yang menggugat mereka melalui class action. Mereka mengaku tak bisa memenuhi enam tuntutan warga yang diajukan dalam proposal perdamaian.

Tawaran itu yakni PT RUM bersedia memenuhi konsekuensi dari dampak kesehatan yang diderita oleh para penggugat yang diduga diakibatkan kegiatan pabrik rayon tersebut.

“PT RUM telah merealisasikan Rumah Layanan Kesehatan/Poliklinik di wilayah Nguter dan akan mengoptimalkan layanan kesehatan tersebut. Bagi para penggugat bisa menggunakan layanan itu secara gratis. Termasuk apabila ada yang memerlukan penanganan lebih lanjut ke rumah sakit pemerintah, maka pihak PT Rayon Utama Makmur sanggup untuk membiayai biaya pengobatan tersebut,” ujar PT RUM dalam surat ditandatangani oleh Direktur Mochamad Rachmat beserta Kuasa Hukum PT RUM, Dani Sriyanto, Lukman Hakim, Mulyanto dan Bandung Jaka Suryani yang dibaca Solopos.com, Rabu (12/7/2023).

Tawaran kedua, PT RUM menghentikan operasi hingga waktu yang tidak ditentukan sampai meredanya pandemi Covid-19 dan membaiknya iklim usaha dengan komitmen memberikan kualitas lingkungan yang lebih baik. Penghentian operasi ini dilakukan sejak 6 Juni 2022. Pendirian pabrik rayon yang berlokasi di Nguter tersebut diklaim telah melalui pertimbangan sesuai tata ruang. Sebab Nguter merupakan Kawasan Industri/ Zona Industri, sehingga dapat dipergunakan untuk kegiatan produksi PT RUM.

Dalam keberjalanannya PT RUM telah menyerap tenaga kerja lokal kurang lebih sebanyak 1.400 orang. Namun akibat dampak pandemi Covid-19 dan lain lain, PT RUM sejak 6 Juni 2022 hingga kini tidak beroperasi dan telah merumahkan dan memutasi sebagian karyawannya. Sehingga saat ini jumlah karyawan PT RUM tinggal 300 orang. Mudah-mudahan setelah dampak Pandemi berlalu dan membaiknya iklim ekonomi atau usaha PT Rayon Utama Makmur bisa beroperasi lagi,” tulis dalam tanggapan tersebut.

Selanjutnya dituliskan PT RUM selama ini telah memberikan Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) secara baik kepada masyarakat di sekitar perusahaan. TJSLP PT RUM bahkan pernah diapresiasi Pemkab Sukoharjo melalui TJSLP Award. Beberapa di antaranya adalah menjadi Peringkat I TJSLP Award pada 2018 untuk bidang Pendidikan dan pada 2020 mendapat peringkat I TJSLP Award bidang pemberdayaan sosial.

“PT RUM memberikan apresiasi yang baik atas setiap proses yang berjalan selama ini, termasuk adanya gugatan class action ini. Dari guga-

tan ini PT Rayon Utama Makmur bisa belajar, memahami dan mengerti masukan/kritik utamanya dari Para Penggugat class action untuk menjadi lebih baik. Tetapi kesemuanya didalam bingkai hukum/norma hukum yang berlaku,” tulis dalam surat itu. Kemudian pada Rabu (2/8/2023), mediasi antara warga dengan PT RUM dinyatakan gagal. Kuasa hukum PT RUM mengaku telah menyiapkan jawaban dan bukti-bukti untuk membantah gugatan yang diajukan class action tersebut. “Kalau dari data kami kan kuncinya di ambang batas mutu. Kalau kami lihat, pabrik rayon ini selain di PT RUM, di Purwakarta ada 2, Pekanbaru juga ada 1. Itu pasti bau, tetapi selama tidak melebihi ambang batas itu tidak mengganggu kesehatan,” jelas Dani, seusai persidangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Rabu.

Dani memaparkan pabrik serat rayon seperti PT RUM tidak bisa dibandingkan dengan pabrik yang menghasilkan produk yang berbeda. Ambang batas soal bau, menurutnya, sudah diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dani juga menyebut Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik kliennya sudah masuk dalam pengawasan oleh KLHK. Sayangnya, sambung dia, masyarakat merasa jika di sekitar kawasan tersebut masih bau maka hal itu tidak sesuai aturan.

Termasuk jika air limbah yang dibuang keruh juga dinilai tak sesuai aturan. Padahal menurutnya ketentuan normatif ambang batas sudah ada parameternya. “Kami menempatkan diri sebagai aset masyarakat dan pemerintah. Sehingga input dari masyarakat untuk perbaikan dan penyempurnaan terus kami dengarkan. Nilai positifnya banyak, hal-hal negatif harus diminimalisasi. PT RUM sudah melakukan beberapa langkah,” papar Dani.

Dani mengakui ketidaknyamanan warga harus diminimalkan, namun di sisi lain dampak positif pabrik juga harus dilihat. Ia juga memastikan PT RUM sudah menjalankan pabrik sesuai normanya. PT RUM juga disebut telah mengantongi rekomendasi teknik (rekomtek) dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Pendaataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sukoharjo.

Pemasangan pipa PT RUM membutuhkan investasi yang tak sedikit, sehingga menurut Dani tidak mungkin jika dilakukan dengan melanggar izin. Tak hanya itu proses pembuangan limbah juga diklaim sudah melewati proses tertentu sebelum dibuang ke sungai. Sayangnya masyarakat menilai limbah yang dibuang harus bersih dan tidak berwarna. Jika masih keruh dan berbau langsung divonis menyalahi aturan.

“Jika warga menolak seharusnya sejak awal. Jangan sampai kami sudah seperti sekarang ini baru dicari-cari. Tetapi permintaan teknis seperti klinik juga sudah ada, kalau mau tambah kami sanggupi. Revitalisasi juga ada. Kami minta pengelolaannya, mau swakelola atau bagaimana, harus ada pertimbangan. Harus diperjelas,” ungkapnya.

Hingga akhir Agustus, proses gugatan class action terus berlanjut secara daring. Warga terdampak limbah PT RUM, Abdullah mengaku perjuangan tak akan berhenti hingga pabrik tersebut tutup. “Niat kami dari awal, sejak PT RUM beroperasi menghasilkan limbah udara bau busuk dan cair, kami minta operasional berhenti, pabrik tutup. Ini demi masa depan anak dan cucu, kami tak akan berhenti melawan sampai tujuan kami tercapai,” ungkapnya.

Abdullah mengatakan limbah bau tersebut terbukti menimbulkan efek buruk pada kesehatan. Warga juga kerap merasa mual, pusing, muntah, hingga sesak nafas. Mengutip data Tim Independen Muhammadiyah pada 2018 yang melakukan analisis survei terhadap 150 masyarakat sebagai responden mengenai tingkat pencemaran yang terjadi di lingkungan akibat limbah pabrik PT RUM, 93% responden menyatakan pencemaran yang terjadi adalah sudah termasuk pencemaran parah.

Sementara hanya 3% yang menyatakan pencemaran biasa, 1% menyatakan masih di dalam batas kewajaran dan tidak menjawab sebesar 3%. Mengenai dampak yang dirasakan masyarakat, sebesar 90% responden yang menyatakan dampak paling berat yang dirasakan masyarakat adalah dampak kesehatan seperti terjadinya sesak nafas, asma mual, muntah, pusing. Sementara responden yang menyatakan dampak paling berat berupa dampak ekonomi yang terganggu, dampak pendidikan dan dampak sosial masing-masing sebesar 3%.

“Saat berhenti beroperasi pun, bau busuk limbah PT RUM masih menyengat, meski tak separah dulu. Di sisi lain, PT RUM juga masih memasang pipa meski informasinya rekomendasi teknik belum keluar. Artinya apa? Sampai saat ini PT RUM belum berniat menghentikan operasional. Setelah bahan baku kembali ada, saya kira mereka bisa beroperasi lagi, dampaknya, kami akan Kembali didera bau busuk limbah dan cair yang entah sampai kapan,” tandasnya.

Hingga berita ini ditulis, Minggu (17/9/2023), warga terdampak limbah PT RUM masih menanti pembuktian dugaan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup dengan terdakwa PT RUM yang masih disi-

dangkan di PN Sukoharjo, selain menunggu hasil gugatan class action.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU pada Kamis (14/9/2023), PT RUM diduga telah melanggar Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (2) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Pada Selasa (26/9/2023) mendatang, hakim dijadwalkan mengecek lokasi PT RUM selain lingkungan terdampak limbah. Hasilnya akan menjawab penantian warga sejak 2017 hingga saat ini.



Pipa limbah cair PT RUM yang berada di aliran Sungai Gupit, Kecamatan Nguter, Sukoharjo, Rabu (20/7/2023). (Solopos.com/Mariyana Ricky P.D.)



Warga terdampak limbah PT RUM di depan PN Sukoharjo, Kamis (10/8/2023). (Solopos.com/Mariyana Ricky P.D.)



Gertak Sambal Tambang Pasir Ilegal

oleh: Mariyana Ricky P.D.

Solopos.com, KLATEN — Jalanan bergelombang tak rata, berlubang, dan penuh debu pasir menjadi pemandangan harian warga yang melintas di jalur evakuasi Gunung Merapi, tepatnya di Kecamatan Kemalang, Klaten. Pada Minggu (30/7/2023), setengah dari jalan itu tengah dibeton. Pembetonan merupakan jawaban warga setelah jalan tersebut rusak bertahun-tahun. Jalur itu tak hanya menjadi jalur evakuasi, tapi juga akses ekonomi warga dan jalur wisata.

Jalur evakuasi itu termasuk dalam kategori jalan kelas III dengan kapasitas beban maksimal 8 ton. Namun, satu truk pembawa material galian C yang melintas di jalur tersebut bisa membawa muatan mencapai 9 ton hingga 20 ton. Kerusakan jalur evakuasi diperparah banyaknya jumlah truk yang melintas, yakni mencapai ratusan truk per hari. Sayangnya, meski tengah diperbaiki dan menyisakan separuh badan jalan, pengguna yang melintas tetap harus berbagi ruang dengan hilir mudik truk pengangkut pasir yang ditambang dari lereng Gunung Merapi. Kecamatan Kemalang merupakan salah satu daerah penambangan pasir dan batu hasil erupsi Gunung Merapi di sepanjang Kali Woro.

Keberadaan tambang pasir itu sudah berlangsung puluhan tahun. Pada satu sisi, aktivitas itu menguntungkan warga setempat yang bermata pencarian sebagai penambang pasir tradisional. Di sisi lain, eksistensi penambang tradisional terus tergerus dengan keberadaan tambang ilegal menggunakan alat modern untuk mengeruk pasir Gunung Merapi. Maraknya tambang ilegal di Kabupaten Bersinar itu pun pernah dikeluhkan kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, melalui Twitter, Minggu (27/11/2022). Semula, akun twitter @amr715882 dengan nama pemilik Mr. Agus mengungkapkan keluhannya tentang tambang ilegal di Klaten. Selain ke Gibran, akun tersebut juga mencolek akun Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. “Mas.. sampekan ke pak @jokowi untuk menindak tambang pasir ilegal yg ada di kab.klaten, lebih dari 20 titik lokasi..tp dibiarkan,” tulis akun @amr715882.

Menyikapi hal itu, Gibran angkat bicara di akun Twitternya. Ternyata, Gibran sudah tahu informasi itu dari bupati. “Ya pak. Ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Backingannya ngeri,” tulis @gibran_tweet. Cuitan Gibran itu sontak membuat geger publik, utamanya Klaten. Beta-pa tidak, cuitan tersebut langsung disambut oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Di dalam video rapat koordinasi (rakor) yang diunggah melalui akun Twitter @ganjarpranowo, pihaknya sepakat membuat desk pelaporan sebagai penerimaan laporan masyarakat atas adanya tambang ilegal di wilayahnya itu. Dari laporan itu, Ganjar mengaku tak segan mengger-ebek guna memberantas tambang ilegal. “Saya usul konkret saja, kita kasih nomor handphone untuk melaporkan, setelah itu kita gerebek bareng-bareng,” untkannya mengutip dari tayangan video tersebut, Selasa (29/11/2022).

Awalnya, Ganjar menanyakan kepada para anggota rapat yang terdiri dari para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, “Apakah Bapak Ibu, di mana daerahnya punya galian C, hidup Anda tertekan atau tidak? yang merasa tertekan, angkat tangan! lho ra usah wedi (lho tidak usah takut), nanti kalau tidak, saya laporkan ke KPK lho ini.”

Lalu, direspons dengan adanya angkat tangan dari anggota rapat. “Yang merasa di daerahnya ada galian C itu menyenangkan dan tidak masalah, angkat tangan!” ujar Ganjar lagi. Namun, direspons dengan tak ada satu pun orang yang berani angkat tangan.

“Nah Anda gak berani kan?” lanjutnya. “Ini tidak bisa, mata air hilang, jalan rusak karena jalannya itu kalau nggak jalannya desa, ya jalannya kabupaten. Memang di belakang galian C itu isinya ‘Gali’ (preman),” bebarnya. Lalu, dia pun menyinggung pernyataan Gibran yang sempat menyebut bahwa backing-an tambang ilegal itu mengerikan. “Maka kalau kemarin Wali Kota Solo teriak keras, ‘Wah ini ngeri back-up nya’, wah netizen kemudian berteriak, maka forum hari ini menurut saya menjadi penting,” lanjutnya.

Gertakan Ganjar rupanya berbuah manis, aktivitas tambang pasir ilegal di lereng Gunung Merapi utamanya Kali Woro langsung tiarap. Ratusan truk dan penambang yang biasanya mengeruk pasir di sungai itu tak terlihat sama sekali. Sepinya aktivitas pertambangan itu berlangsung sedikitnya dua pekan sampai satu bulan. Belakangan, gertakan itu bak sambal. Razia tambang pasir ilegal hanya berlangsung beberapa kali.

Aktivitas pertambangan kembali berlangsung. Sesekali, pelaku tambang pasir ilegal itu tiarap apabila informasi razia beredar. Artinya, razia bocor sebelum petugas datang ke Kali Woro. Berdasarkan Pasal 96 huruf (c) UU Minerba serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, reklamasi dan pascatambang merupakan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pertanggungjawaban kerusakan lingkungan akibat dari penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan pasir di kawasan Kendalsari menjadi kewajiban bagi pelaku usaha tambang pasir tersebut. Dalam kenyataannya, pelaku usaha tambang yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak mematuhi ketentuan Pasal 96 huruf (c) UU Minerba serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 mengenai Reklamasi dan Pascatambang dan hingga kini masih terdapat kerusakan akibat penggunaan alat berat yang memperburuk kerusakan lingkungan di sekitar kawasan tersebut.

Pelaku usaha tambang sering kali meninggalkan bekas galian berlubang tanpa melakukan upaya reklamasi. Pemandangan hijau di kawasan Kemalang yang merupakan daerah resapan air saat ini semakin habis dikeruk alat-alat berat penambang. Tingginya tingkat erosi di daerah penambangan pasir dan juga didaerah sekitarnya; adanya tebing-tebing bukit yang rawan longsor karena penambangan yang tidak memakai sistem berteras sehingga sudut lereng menjadi terjal dan mudah longsor; berkurangnya debit air permukaan/mata air; tingginya lalu lintas kenda-

raan di jalan desa membuat mudah rusaknya jalan; dan terjadinya polusi udara.

Salah seorang warga Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Sukiman, bercerita kepada Solopos.com, mengenai aktivitas tambang di Kali Woro. Menurut Sukiman, viralnya cuitan Gibran dan gertakan Ganjar sempat membuat aktivitas tambang pasir di Kali Woro berhenti sejenak. “Ya, sempat berhenti tapi jalan lagi. Saya tidak anti tambang, tapi kalau pakai alat berat, bisa disaksikan jurang di Kali Woro saat ini sudah sedalam apa, lereng-lerang Kali Woro bagaimana. Kalau penambang pasir tradisional, dampaknya tidak separah alat berat,” tuturnya, diwawancara Rabu (26/7/2023).

Sukiman menyebut pihak yang berwajib tak perlu menggertak, mereka bisa langsung merazia dengan datang langsung ke Kali Woro. “Langsung sidak pasti dapat. Teriak-teriak mau razia, mau sidak, baru keluar kantor, sudah terlambat (informasi bocor). Alat (berat) sudah disembunyikan. Begitu razia selesai, mereka balik lagi (menambang),” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan warga Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Suwoto (bukan nama sebenarnya). Menurutnya, aktivitas tambang pasir di Kali Woro tak akan pernah benar-benar berhenti, meski ancaman hukum menanti. “Kalau boleh saya bilang, ya, tidak ada takut-takutnya. Kemudian kalau ada yang bilang punya backing-an, ya, memang ada backing-nya. Aktivitas melanggar hukum seperti itu, kalau tidak ada backing ya, enggak mungkin berani. Tapi saya enggak berani sebut siapa,” kata dia kepada Solopos.com, Kamis (28/8/2023).

Suwoto menyebut hampir semua aktivitas tambang pasir di Kali Woro adalah ilegal dan tak berwawasan lingkungan. Pelaku abai dan tak memikirkan dampak dari aktivitas itu. “Warga bahkan bareng-bareng memakai bertuliskan baju dekengan pusat untuk menyindir bahwa aktivitas mereka itu meski salah tapi dianggap benar karena punya dekengan,” ungkapnya. Saat Solopos.com singgah ke Kali Woro, sejumlah penambang langsung bersikap waspada. Mereka seolah antipati dengan setiap orang asing yang datang ke lokasi. Hal itu dibenarkan oleh Suwoto.

Menurutnya, perilaku tersebut menandakan bahwa aktivitas mereka benar-benar tak berizin. “Kalau yang datang bukan orang sekitar, mata mereka langsung mengarah ke situ. Mereka penuh curiga, waspada,” tuturnya.

Ihwal razia yang selalu bocor, hal itu juga dibenarkan oleh Suwoto. Tak jarang petugas pulang dengan tangan kosong karena tak mendapati aktivitas tambang di lokasi. “Ya, (penambang) sudah sembunyi karena informasi razia yang bocor. Sekarang malah mereka menambang di tebing sungai, bukan tengah sungai lagi. Kalau nanti hujan atau erupsi besar, lahar dingin bisa sampai merusak lingkungan rumah warga, karena aliran sungainya diperlebar aktivitas tambang,” ungkap Suwoto.

Kekhawatiran Suwoto tersebut juga dikeluhkan oleh puluhan warga lain yang tinggal di lereng Gunung Merapi, utamanya di sekitar Kali Woro. Mereka takut saat erupsi besar terjadi seperti pada 2010, rumah mereka bisa hanyut terbawa aliran lahar dingin. Tebing-tebing yang semula melindungi warga telah dikepras perlahan untuk ditambang. Tebing-tebing yang semula kuat itu tentu tak akan bisa menahan laju lahar dingin yang kemudian menimbulkan erosi hingga menyeret rumah warga.

Dampak lain bahkan dirasakan oleh warga yang tinggal belasan kilometer dari lokasi tambang pasir. Petani di sejumlah desa wilayah Kecamatan Jogonalan, Klaten, dibikin resah dengan pendangkalan saluran air untuk irigasi pertanian mereka. Selama beberapa bulan terakhir, saluran mengalami sedimentasi berupa lumpur dan bertambah tinggi dalam waktu singkat. Air dari saluran tersebut selama ini dimanfaatkan petani di sejumlah desa di antaranya Gondangan, Bakung, serta Rejoso di Kecamatan Jogonalan. Endapan lumpur terjadi di sepanjang saluran.

Endapan lumpur salah satunya terlihat di saluran yang melintasi perkampungan Dukuh Lusah, Desa Bakung. Akibat endapan lumpur itu hanya tersisa ruang sekitar 20 sentimeter dari bibir saluran untuk air mengalir. Endapan lumpur juga mulai mengalir ke persawahan petani di wilayah Gondangan. Ketua Kelompok Tani Gemah Ripah Desa Gondangan, Ahmad Wahono, mengatakan endapan lumpur di saluran irigasi Jogonalan, Klaten, itu mulai cepat naik sejak enam bulan lalu. Dalam rentang sebulan, endapan lumpur cepat bertambah.

“Setiap tiga bulan saluran dibersihkan oleh kelompok tani. Tetapi dalam waktu sebulan endapannya cepat bertambah,” kata Wahono saat ditemui Solopos.com di area persawahan Desa Gondangan, Sabtu (19/8/2023). Wahono menjelaskan air tetap bisa mengalir, namun air membawa lumpur hingga masuk ke persawahan. Kondisi itu berdampak pada tanaman. Pertumbuhan padi jadi lambat lantaran pori-pori tanah tertutup lumpur.

Petani menduga endapan lumpur pada saluran irigasi di Jogonalan, Klaten, tersebut berasal dari limbah pencucian pasir di dekat saluran tersebut. Ketakutan tersebut yang salah satunya menjadi dasar penolakan tambang pasir di lereng Gunung Merapi sisi barat, tepatnya di Kali Trising Magelang. Tiga desa di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, sepakat menolak tambang.

Tiga desa itu adalah Sengi, Sewukan, dan Paten yang lantas membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai lembaga koordinasi mencegah penambangan di Kali Trising. Perwakilan dari dua perusahaan tambang sempat menemui warga dan meminta izin untuk menambang di Kali Trising sejak 2003. Berulang kali ditolak, perusahaan itu tetap melakukan berbagai pendekatan kepada warga.

Kepala Desa Sewukan Yeyen Rifai mengatakan, penolakan itu dilatarbelakangi keinginan warga menjaga sungai. Mereka khawatir penambangan akan memengaruhi suplai air bersih dan irigasi. Di musim kemarau, air Kali Trising masih melimpah hingga bisa didistribusikan untuk mengatasi krisis air bersih di desa-desa di Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Salaman,

Sementara, berdasarkan informasi di aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI), ada tiga perusahaan yang mengajukan izin untuk menambang material galian C di Kali Trising. Dua perusahaan mengajukan izin eksplorasi dan satu perusahaan berencana melakukan pencadangan material. “Mereka sempat membawa surat yang klaimnya sudah mendapat izin dari pusat, padahal izin itu tidak ada kelengkapan lain seperti izin dari warga dan provinsi atau kabupaten, ya, sekadar untuk menakuti warga,” ucap Yeyen, dijumpai Solopos.com, Minggu (20/8/2023).

Pemerintah Desa Sewukan, Sengi, dan Paten memiliki Peraturan Bersama Kepala Desa Sewukan, Sengi, dan Paten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelestarian Sungai Trising. Dalam beleid pasal 4 termuat bahwa kerja sama antardesa untuk “memelihara kelestarian Kali Trising agar tetap bisa digunakan oleh masyarakat untuk menunjang pertanian dan penyediaan air bersih di ketiga desa.” Adapun bentuk kerja sama, salah satunya, merujuk pasal 6 ayat 3, “menolak penambangan dengan alat berat atau mekanik dengan dalih normalisasi maupun eksplorasi.”

Ketakutan warga akan hilangnya sumber air akibat tambang bukan tanpa alasan. Mereka menyaksikan sendiri tambang pasir dengan alat be-

rat merusak sungai di desa sekitar.

Menurut Yeyen, Kali Trising adalah satu-satunya sungai yang belum tersentuh alat berat di lereng Gunung Merapi. “Keinginan kami, Kali Trising dihapus dari peta zona tambang. Permintaan ini berdasarkan kesepakatan bersama warga. Tapi sampai saat ini kami belum tahu bagaimana tindak lanjutnya,” pungkas Yeyen. Dikonfirmasi terpisah, Dirkrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Soebagio mengklaim pihaknya sudah berkali-kali menangkap pengelola tambang pasir ilegal

Gubernur Jawa Tengah, sambungnya, telah membentuk tim terpadu yang terdiri dari Pemprov Jateng, Polda Jateng, Kejaksaan serta pihak lain untuk menindak aktivitas tambang pasir ilegal di lereng Gunung Merapi. “Pak gubernur telah menetapkan dan memutuskan untuk membentuk tim terpadu. Tim ini terus bekerja, berkoordinasi, dan menggelar razia rutin. Di lereng Gunung Merapi, aktivitas tambang memang banyak yang ilegal, meski tetap ada yang legal,” terangnya, dihubunginya Jumat (25/8/2023).

Menurut Dwi, razia tambang ilegal kerap menemui persoalan di lapangan, mengingat tak sedikit warga sekitar yang terlibat. Razia pun kerap bocor karena mereka melihat iring-iringan polisi dari kejauhan. “Kami kan posisinya di bawah, begitu bergerak ke atas sudah terlihat warga, mereka kemudian saling mengingatkan kalau bakal ada razia, alhasil kami tidak menangkap pelaku sesuai harapan. Kami seolah petak umpet, mereka kucing-kucingan dengan kami,” ucap Dwi.

Ia mengakui razia hanyalah salah satu langkah mencegah maupun menindak tambang ilegal. Namun, pihaknya juga berupaya lain, salah satunya dengan meminta penambang melakukan reklamasi untuk meminimalisasi dampak lingkungan. Ihwal backing yang kerap disebut masyarakat, hingga disebut Wali Kota Solo, Dwi mengaku sudah menerima laporan tersebut. “Laporan sudah ada, kami juga melakukan penyelidikan. Kami menjamin keamanan pelapor, termasuk identitasnya. Ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi kami berusaha,” tandasnya.

Plt Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Boedya Dharmawan, mengatakan pemerintah telah membagi zonasi kawasan tambang di kawasan Gunung Merapi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Kawasan yang diperbolehkan ditambang termasuk dalam Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c ditetapkan untuk:

- a. melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas sungai. serta untuk mengamankan aliran sungai dan meningkatkan konservasi sumber daya air, dan
- b. mengamankan kawasan sekitar sempadan sungai sebagai area limpasan banjir lahar. Sehingga, Zona L3 adalah berupa kawasan yang berpotensi terkena aliran lahar atau banjir, serta dapat berpotensi terkena perluasan awan panas dan material panas lainnya.

Zona tersebut yang berada pada sempadan:

- a. Kali Apu;
- b. Kali Trising;
- c. Kali Senowo;
- d. Mali Pabelan;
- e. Kali Lamat;
- f. Kali Blongkeng;
- g. Kali Putih;
- h. Kali Batang;
- i. Kali Bebeng;
- j. Kali Krasak;
- k. Kali Boyong;
- l. Kali Kuning;
- m. Kali Opak;
- n. Kali Gendol;
- o. Kali Woro; dan
- p. Kali Gandul.

Sungai-sungai tersebut berada di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, yakni di Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Aktivitas tambang pasir hampir seluruhnya terjadi di sungai-sungai itu, baik ilegal maupun legal.

“Persoalan yang terjadi di lapangan itu kompleks, karena banyak penambang legal, dan lebih banyak lagi yang ilegal, kemudian setengah ilegal. Kami katakan setengah ilegal karena sebenarnya mereka sudah mengurus persyaratan pratik menambang, namun izin belum juga turun karena pemerintah pusat sempat mengambil alih izin pertambangan pada 2020, kemudian didelegasikan kembali ke pemerintah daerah pada 2022,” terang Boedy, kepada Solopos.com, Rabu (30/8/2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Mineral dan Batubara (Minerba), setelah 6 bulan diundangkan, maka kewenangan perizinan pertambangan diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Kemudian berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 yang mulai efektif sejak diundangkan pada 11 April 2022 lalu, pemerintah pusat mendelegasikan izin pertambangan ke daerah (provinsi).

“Momentum tersebut memunculkan persoalan karena sejumlah pelaku tambang telah mengurus perizinan ke pusat namun izin belum turun ketika aturan pendelegasian ke pemerintah daerah berlaku, sehingga kami kebagian ratusan berkas izin tambang yang hingga saat ini masih terus diproses,” terangnya.

Pihaknya memproses ratusan berkas itu yang disinkronkan dengan tata ruang wilayah tambang di kabupaten/kota. “Dalam proses administrasi perizinan, tata ruangnya memang sulit. Kami tetap harus meminta gambaran dari daerah. Misalnya, mereka mau izin eksplorasi di titik A, dan Pemkab tidak memberi izin atau daerah itu merupakan larangan, sehingga dilarang, maka izin tidak keluar. Atau boleh ditambang, dengan catatan, ya, tentu kami akan sampaikan pula,” ucap Boedy.

Ihwal banyaknya tambang pasir ilegal dan sulitnya razia, ia membenarkan pernyataan Dirkrimsus Polda Jateng. Stigma bekingan itu muncul lantaran pelaku tambang baik legal maupun ilegal itu seolah tak kenal takut. “Selain itu, informasi razia juga kerap bocor sebelum dimulai, sehingga menguatkan stigma bahwa tambang pasir di kawasan Gunung Merapi itu punya bekingan. Kami memang mendapatkan laporan mengenai siapa-siapa saja, tapi sulit sekali pembuktiannya. Bagaimana membuktikan kalau dia ini adalah bekingan, sementara tak ada bukti,” tandas dia.

Boedy menyampaikan sejak awal tahun hingga Agustus ini, pihaknya telah menggelar razia terpadu bersama petugas gabungan sebanyak

tiga kali. Dari tiga kali razia tersebut, hanya satu yang berhasil menangkap tangan pelaku tambang ilegal.

“Razia itupun hanya berhasil menyita dua ekskavator dan 10 unit truk pengangkut. Anehnya, setelah razia itu berlangsung di hari itu, keesokan harinya mereka kembali menambang. Itulah yang menguatkan stigma kalau mereka punya bekingan,” ujarnya.

Indikasi bekingan tersebut tampak dari kerapnya rencana razia yang bocor, selain keberanian para pelaku tambang yang tak takut-takutnya kembali menambang selang sehari setelah razia dilakukan. Bekingan itu bisa saja dari kalangan aparat pemerintahan karena rapat menjelang razia dilakukan oleh mereka. Sumber Solopos.com menyebut bekingan pelaku tambang pasir ilegal itu adalah pengusaha besar yang memiliki kedekatan dengan politisi kawak.

Selain razia tim gabungan, Dinas ESDM juga kerap menyambangi lokasi untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal. Namun, untuk diproses ke arah pidana, hal itu tak bisa dilakukan karena razia tak melibatkan aparat penegak hukum.

Boedya mengatakan pemerintah memang tak bisa melarang tambang sepenuhnya mengingat material tersebut dibutuhkan untuk pembangunan konstruksi. Hanya, ia meminta pelaku tambang mengurus perizinan, mematuhi aturan yang berlaku, dan tak merusak lingkungan. “Tambang ini juga kaitannya dengan hajat hidup orang banyak. Tapi, kalau tambangnya sampai merusak lingkungan, misalnya menasar tebing sungai, tentu berbahaya apabila banjir lahar dingin menerjang pasca-erupsi Gunung Merapi. Dampaknya bisa merusak rumah warga. Nah, yang berhak menindak pelaku tambang yang menegur tebing sungai ini adalah balai besar wilayah sungai,” jelas Boedya.

Mengacu data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), ada beberapa sungai yang masuk daerah potensi bahaya. Di sisi selatan-barat daya, daerah bahaya mencakup Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km dari puncak Merapi serta Sungai Bedog, Krasak, dan Bebeng sejauh maksimal 7 km.

Di sisi tenggara, radius bahaya meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Meski demikian, BPPTKG juga menyebut adanya potensi bahaya berupa lontaran material vulkanik apabila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak.

Dinas ESDM Provinsi Jateng telah mengeluarkan surat yang meminta penghentian sementara aktivitas penambangan pasir dan batu dengan radius 7 km dari puncak Gunung Merapi.

Surat bernomor 543/2095 tertanggal 12 Maret 2023 itu ditujukan kepada para pemegang izin usaha pertambangan di sekitar lereng Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali, Klaten, dan Magelang. Dalam surat itu dinyatakan, penghentian aktivitas penambangan harus dilakukan hingga situasi dinyatakan aman.

“Aturan tersebut masih berlaku hingga saat ini karena status Gunung Merapi yang belum juga turun dari Level III Siaga. Tapi, pelaku tambang ini sepertinya masih akan masuk area bahaya kalau banjir lahar dingin belum menerjang. Saat ini masih musim kemarau, mereka tetap bandel. Kalau musim penghujan dan mulai banjir lahar dingin, mereka baru merasakan dampaknya,” pungkas Boedya.



Aktivitas tambang pasir menggunakan alat berat di Kali Woro, Kecamatan Kemalang, Klaten, Minggu (30/7/2023).





Ugal-ugalan Tambang di Sukolilo Pati

oleh: M. Dafi Yusuf

SEMARANG – Persoalan tambang di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, seperti tak ada habisnya. Selain persoalan lingkungan, beberapa waktu lalu sekelompok ibu-ibu mengadang truk tambang.

Mereka kesal karena permintaannya agar aktivitas truk tambang tidak dilakukan saat jam sekolah diabaikan. Kemarahan mereka memuncak setelah peristiwa truk tambang CV Tri Lestari kabur usai menabrak pejalan yang berangkat sekolah. Selain tuntutan itu, mereka meminta jalan yang dilewati truk tambang disirami secara rutin karena menyebabkan polusi udara. Hal itulah yang menyebabkan puluhan ibu-ibu di Desa Wegil mengadang truk tambang. Peristiwa pada 8 Agustus 2023 itu viral di media sosial. Pada 21 Agustus lalu, laporan itu masuk melalui pengaduan online Pemerintah Provinsi Jateng. Isinya, warga menuntut para penambang legal maupun ilegal bertanggung jawab mengatasi polusi udara dan rusaknya jalan umum yang disebabkan aktivitas kendaraan tambang.

Meski sudah dilaporkan ke Pemprov Jateng, aktivitas tambang itu masih ugal-ugalan, termasuk dugaan menjamurnya tambang ilegal. Berdasarkan pengakuan penambang ilegal di Sukolilo berinisial EK, ia melakukan aktivitas tambang di lahan produktif. Lahan itu sebelumnya digunakan untuk menanam jagung, kedelai, pohon randu, dan jati.

“Setelah ditambang, lahan itu memang tak bisa digunakan lagi,” katanya saat ditemui di bekas lokasi tambang ilegal miliknya. Ia mengaku sudah mulai menambang batu gamping sejak 2022. Lahan pertama yang ditambangnya merupakan perbukitan seluas 5 ha di belakang rumahnya. Untuk menambang batu gamping, ia cukup bernegosiasi dengan pemilik lahan. Dari hasil menambang itu, ia bisa mendapatkan keuntungan bersih Rp2 juta-Rp3 juta dalam sehari.

“Jika lagi sepi minus Rp4 juta-Rp5 juta. Apalagi di tengah perjalanan ada alat rusak, pendapatan berhenti tapi operasional dan bayar tenaga tetap harus jalan,” katanya. Rata-rata batu gamping yang ditambang itu dijual ke daerah Kabupaten Pati, Kudus, Demak, Grobogan, dan Kota Semarang. “Biasanya digunakan untuk urugan rumah dan pekerjaan proyek,” tambahnya.

Izin Tambang Ilegal

Selain kesepakatan dengan pemilik lahan, ia juga harus izin kepada kepala desa dan warga setempat. Sebelum melakukan penambangan, ia wajib mendapatkan tanda tangan persetujuan dari warga yang rumahnya dekat lokasi tambang. Setiap kepala keluarga yang bertanda tangan diberi uang bulanan Rp100.000 sebagai ganti rugi telah mengganggu aktivitas warga. “Mungkin mereka mau negur sungkan, ‘Yang makan kamu. Yang sengsara aku.’ Tetangga bisa terganggu dengan suara bising,” katanya. Para penambang juga mempunyai semacam “konsorsium”. Bagi penambang baru atau penambang lama yang ingin membuka lahan baru, harus izin ke seseorang yang cukup berpengaruh.

“Kami kasih tahu kami buka baru. Ada struktur yang harus kami minta izin,” ungkapnya. Dalam satu bulan, ia menyiapkan dana sekitar Rp22 juta, yang katanya mengalir termasuk ke aparat kepolisian, wartawan, dan penguasa wilayah setempat. Ada seorang yang ditugaskan untuk menagih uang bulanan ke penambang ilegal. Ia menyebut nama berinisial D yang diduga rekanan politisi elite di Jateng. “Pembayaran tersebut tidak menggunakan bukti transaksi. Jadi kita sudah sama-sama tahu,” ucapnya.

Perkumpulan Warga Peduli Sosial, Hukum, dan Lingkungan Hidup (Wali-SHL) Pati, Sutrisno, menambahkan sampai saat ini tambang ilegal yang masih beroperasi di Sukolilo berada di tiga titik, dengan rata-rata luasan tambang antara 5-10 ha. “Ada di Desa Baleadi, Desa Kedungwinong, dan daerah perbatasan,” ungkap Sutrisno. Ditanya soal nama berinisial D dan politisi elite Jateng, dia membenarkan bahwa keduanya sempat memasang banner yang berisi foto mereka di lokasi tambang. “Jadi warga sekitar mengetahui sebagai tanda itu wilayah yang dinaungi,” ucapnya.

Orang yang berinisial D itu diduga merupakan Direktur CV Bukit Batu Nusantara, yang juga ikut melakukan aktivitas penambangan di jalan Sukolilo-Prawoto. Sutrisno juga pernah mendatangi Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Wilayah Kendeng Muria soal aktivitas CV Bukit Batu Nusantra pada Selasa (20/9/2022). “CV Bukit Batu Nusantra belum memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP),” paparnya. Aktivitas tambang ilegal yang semakin menggeliat itu membuatnya curiga karena sampai saat pemerintah desa juga tak berani memanggil para penambang untuk melakukan mediasi dengan warga.

“Kita dan warga sempat menuntut. Tapi kepala desa tak berani menegur atau mengundang para penambang. Ini membuat kita bertanya-tanya,” ucap Sutrisno. Selain soal legalitas penambangan, dia juga mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum di di Polsek Sukolilo yang terkesan membiarkan aktivitas penambangan itu. “Itu sudah nyata-nyata muatan melebihi kapasitas, tak pakai terpal dan menimpa korban kemarin,” jelas dia.

Para penambang di Sukolilo

Berdasarkan data terbuka, wilayah Sukolilo pertama kali ditambang pada 2020 oleh Sudir Santoso, yang ditandatangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng pada 3 Maret 2020. Berdasarkan surat No. 543.32/2406 Tahun 2020, Kepala DP-MPTSP Jateng memberikan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi batuan (batu gamping) kepada Sudir Santoso atas nama perorangan warga Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo. Sudir Santoso sebagai pemegang IUP Operasi Produksi memiliki hak penambangan seluas 14,5 ha selama tiga tahun dan bisa diperpanjang dua kali. Sosok Sudir Santoso sudah tak asing lagi bagi warga Kabupaten Pati. Dia merupakan Wakil

Ketua Umum Partai Perkasa dengan Ketua Umum Eko Suryo Santjojo. Selain itu, Sudir Santoso juga mempunyai jabatan strategis sebagai Ketua Umum Persatuan Rakyat Desa Nusantara atau Parade Nusantara.

Pada Januari 2022, Sudir Santoso meninggal dunia. Setelah itu, lokasi pertambangan miliknya dilanjutkan Darmanto yang menjabat Direktur CV Bukit Batu Nusantara. Belum diketahui secara pasti, apa hubungan Sudir Santoso dengan Darmanto sehingga kawasan penambangan itu dilanjutkan oleh CV Bukit Batu Nusantara. Padahal, aktivitas penambangan yang dilakukan oleh CV Bukit Batu Nusantara itu baru diizinkan untuk melakukan eksplorasi belum pada tahap operasi produksi. Namun, pada kenyataannya CV Bukit Batu Nusantra sudah melakukan aktivitas operasi produksi. Hal inilah yang dipermasalahkan oleh Wali-SHL) Pati.

Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng, pada tahun 2021 hanya CV Tri Lestari yang mendapatkan izin untuk melakukan oprasi produksi di lahan seluas 5,08 hektar di Sukolilo. Kemudian, pada tahun 2022 nama CV Bukit Batu Nusantra baru muncul di perizinan tambang untuk eksplorasi bukan oprasi produksi. Rencananya PT Bukit Batu Nusantara akan melakukan oprasi produksi pertambangan seluas 11.2 hektar di Sukolilo.

Di tahun yang sama CV Tri Lestari juga menambah luasan lahan yang akan ditambah di Sukolilo. Dalam dokumen tersebut disebutkan jika CV Tri Lestari akan menambah lahan seluas 6.21 hektare. Selain itu juga ada nama CV Narafa Jaya Perkasa yang juga mendapatkan izin eksplorasi lahan di Sukolilo seluas 5,01 hektar. Jika tiga izin itu digabungkan bakal ada lahan seluas 27,5 hektar yang bakal dilakukan penambangan. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Jateng, Boedya Dharmawan menjelaskan, penambangan di Sukolilo wajib melalui tahapan yang diatur oleh pemerintah. Soal CV Bukit Batu Nusantra, lanjut Boedya, jika memang izinya baru eksplorasi seharusnya tidak diperbolehkan melakukan oprasi produksi penambangan.

“Sekali lagi dalam kegiatan usaha pertambangan ada tahapan. Jadi pada tahap eksplorasi tapi melakukan proses produksi (penambangan dan penjualan) ya sebetulnya tidak boleh,” kata dia saat ditemui di kantornya. Para penambang yang baru tahap eksplorasi hanya diizinkan untuk melakukan observasi seperti melihat ketebalan tambang. “Namun tidak melakukan penjualan atau pengangkutan ke luar. Itu masih dikategorikan eksplorasi,” imbuh dia.

Mengatahui hal itu, dia bakal melakukan pembinaan dan teguran kepada para penambang yang nakal. Untuk itu dia meminta kepada para penambang di Sukolilo untuk patuhi aturan. “Kalau mau harus melalui tahapannya semua,” ujarnya.

Selain itu Boedya juga tidak memungkiri adanya tambang ilegal atau pencurian sumber daya alam di Sukolilo. Dia mengibaratkan, tambang ilegal di Sukolilo terjadi secara terang-terangan. “Nah misalkan ada orang menganggap seperti itu ya seharusnya jangan sampai ya. Tapi ya sekali lagi memang itu pencuriannya itu terang-terangan. Saya jadi tak menyalahkan pendapat masyarakat, walaupun saya juga tak percaya ada orang jadi backup kegiatan ilegal atau kegiatan pencurian,” jawabnya.

Menurutnya, pencuri sewajarnya harus melakukan aksinya secara diam-diam dan menunggu tukang ronda sedang tidur. Namun, tambang ilegal yang terjadi di Sukolilo bisa dilihat oleh semua orang. “Bearti tidak ada alasan untuk tidak tau, semua aparat atau siapapun yang memiliki tugas pada ranah-ranah seperti itu. Jadi saya tidak menyalahkan warga tapi saya juga tidak meyakini bahwa ada backup. Terserah,” imbuh dia.

Menimbulkan Penyakit

Selain tidak mempunyai legalitas yang jelas, aktivitas penambangan di Sukolilo juga menyebabkan pencemaran udara dan mengurangi kualitas air. Salah satu warga Sukolilo, Sofi mengatakan, penyakit asma yang diderita anaknya kerab kali kambuh karena banyaknya debu aktivitas pertambangan. “Setiap bulan harus cek kesehatan. Sampai bidannya ketemu aku terus. Sesak lagi sesak lagi,” kata dia saat ditemui di rumahnya. Selain berdampak buruk untuk kesehatan anaknya, debu yang disebabkan aktivitas pertambangan itu juga membuat perabotan rumah tangganya menjadi mudah kotor. “Jadi debu-debu itu masuk. Mau ngungsi gimana,” tanya Sofi.

Dia bersyukur aktivitas penambangan yang tepat berada di belakang rumahnya itu sudah dihentikan. Saat ini asma anaknya juga tak mudah kambuh lagi.

“Tetangga sebenarnya tidak setuju tapi pada tidak berani,” paparnya.

Saat ini lahan bekas tambang di belakang rumahnya masih terlihat jelas. Lahan tersebut awalnya bisa digunakan untuk bercocok tanam. “Tapi setelah ditambang tak bisa digunakan,” ucap dia. Kerena permasalahan itu, saat ini dia secara terang-terangan melakukan penolakan aktivitas pertambangan di Sukolilo. “Saya terang-terangan menolak, saya tak peduli mau dikucilkan atau seperti apa. Daripada anak saya sakit-sakitan terus,” bebernyanya.

Sementara itu, salah satu petani Sukolilo, Gunretno mengatakan jika perusakan Gunung Kendeng seperti aktivitas penambangan dan penggundulan hutan membuat lahan para petani terkena banjir beberapa tahun lalu. “Masalah banjir memang agak melihat jauh. Harusnya ada pencapaian sudah seberapa jauh kawasan yang kembali hijau, tapi nyatanya tidak. Faktanya berganti-ganti pemimpin, lahan gundul malah makin luas,” jelasnya. Menurutnya, perusakan tambang di Gunung Kendeng saat ini identik dengan banjir dan kekeringan karena Gunung Kendeng yang ada di Sukolilo merupakan spon air dan penyerap air hujan. “Begitu ekosistem rusak, pas curah hujan tidak terserap dengan baik dan bencana banjir tidak bisa terhindarkan,” kata dia.

Berdasarkan perhitungan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), sebanyak 47 anak sungai utama dari karst Gunung Kendeng Utara bermuara di Sungai Lusi dan Sungai Juana. Sementara rata-rata curah hujan bulanan mencapai 284 mm dan karst Gunung Kendeng Utara berpotensi menerima curahan hujan sebesar 57 meter kubik atau setara dengan 11.400.000 truk tangki 5.000 liter. “Batu karst dapat menyerap air hujan sampai 30 persen sampai 50 persen dan pohon jati bisa menyerap 40 persen air hujan,” paparnya.

Banjir 3 bulan

Rusaknya Gunung Kendeng akhirnya membuat petaka. Sejak November 2022 hingga awal Januari 2023 beberapa daerah seperti Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo dihantam banjir yang tak surut selama tiga bulan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir yang merendam sejumlah daerah di Kabupaten Pati terjadi etelah hujan lebat mengguyur wilayah Pati selama satu minggu terakhir sehingga debit air Sungai Silugonggo yang berada di wilayah Kecamatan Juwana meluap. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati melaporkan 17 jiwa di Desa Mintobasuki, Kecamatan Gabus, mengungsi di rumah kerabat yang berada di desa lain. Di samping itu, di Desa Sejomulyo, Kecamatan pati, terdapat 1 warga mengungsi. Sedangkan di wilayah Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, sebanyak 2 warga juga mengungsi sementara di rumah kerabat terdekat.

Pada wilayah Desa Ngastorejo, Kecamatan Jakenan, sejumlah warga sebanyak 15 jiwa (5 KK) mengungsi sementara waktu di rumah kerabat. Masih di kecamatan ini, sejumlah warga Desa Karangrowo masih mengungsi. Petugas di lokasi terdampak masih memastikan jumlah warga yang melakukan pengungsian. Data yang berhasil dihimpun Pusat Pengendalian Operasi BNPB, sebanyak 4.521 jiwa (1.094 KK) terdampak yang tersebar pada sebelas kecamatan di Kabupaten Pati sejak Sabtu (31/12/2022).

Banjir tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga fasilitas umum, seperti sekolah, balai desa, musola dan akses jalan. Aset warga turut terendam, antara lain sawah dan kebun tebu. Saat banjir terjadi, BPBD Kabupaten Pati melaporkan tinggi muka air antara 20 hingga 120 cm. Sementara itu, berdasarkan kajian inaRISK BNPB, Pati yang berbatasan dengan Laut Jawa ini memiliki 21 wilayah kecamatan dengan potensi bahaya banjir kategori sedang hingga tinggi.

Sejumlah wilayah yang saat ini dilanda banjir termasuk pada wilayah dengan potensi tersebut, seperti di Kecamatan Sukolilo, Tambakromo, Kayen, Tayu, Margoyoso, Batangan, Gabus, Juwana, Pati, Margorejo dan Dukuhseti. Berdasarkan data LBH Semarang, bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah Pati bukan lah pertama kali dan datang dengan begitu saja. Sebelumnya pada bulan Juli 2021 banjir juga berdampak terhadap masyarakat disekitar Pegunungan Kendeng.

Sejak 2010-an terjadi banyak pertambangan di Kawasan Pegunungan Kendeng baik yang dilakukan oleh koporasi besar maupun lingkup yang lebih kecil. Baik pertambangan yang berizin maupun bukan. Jumlahnya dari tahun ke tahun tidak menunjukkan penurunan intensitas.

Setidaknya hingga September 2020 di wilayah Pegunungan Kendeng

Pati dan Rembang terdapat hampir 70 Izin Usaha Pertambangan aktif. Hal ini belum termasuk dengan pertambangan ilegal di dua wilayah tersebut.

Tim khusus

Eks Gubernur Ganjar Pranowo dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi bersepakat membentuk tim Satuan Tugas Puser Bumi. Tim tersebut bertugas menertibkan penambang ilegal yang ada di Jawa Tengah.

Ganjar menjelaskan, tim ini lahir dari keresahan masyarakat yang diterimanya setiap hari melalui berbagai kanal laporan. Ganjar mengaku setiap hari mengkhawatirkan galian C pada kondisi cuaca seperti saat ini. “Saya tuh deg-degan hampir tiap hari diingatkan terus bahwa kondisi cuaca lagi seperti ini. Kalau kemudian mereka yang menambang apalagi ilegal, tidak sesuai dengan tata cara penambangan yang baik, maka bencana itu tinggal nunggu,” ucap Ganjar dalam keterangan resminya pada Kamis (16/12/2021).

Ganjar mengatakan, ancaman tersebut tak boleh dipungkiri oleh siapapun. Sebab korbannya tak hanya jiwa, tetapi kerusakan lingkungan bahkan cerita hilangnya mata air. Penambangan ilegal seain membahayakan, juga tidak ada manfaatnya. “Kalau nggak dapat apa-apa rakyat apalagi, jalannya jalannya rusak, piye? Rakyat hampir tiap hari masuk ke handphone saya ini ngamuk. Friksi sosial terjadi,” kata Ganjar. Dengan dibentuknya tim Satgas Puser Bumi, Ganjar berharap para penambang lebih tertib dalam beraktivitas. Apalagi dalam kegiatan diskusi tersebut tak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga diikuti perwakilan Kementerian ESDM yakni Dirjen Minerba.

“Kalau minggu depan Hari Senin kita bisa sosialisasikan, maka kita akan pertemukan. Satu nambangnya bener, ngangkutnya bener, digunakan untuk proyek yang bener,” ujarnya. Apalagi Ganjar membeberkan, setidaknya dibutuhkan 71juta meter kubik hasil penambangan untuk digunakan Proyek Stategis Nasional (PSN). Saat ini, baru terpenuhi 21juta saja.

“Kalau minggu depan Hari Senin kita bisa sosialisasikan, maka kita akan pertemukan. Satu nambangnya bener, ngangkutnya bener, digunakan untuk proyek yang bener,” ujarnya. Apalagi Ganjar membeberkan, setidaknya dibutuhkan 71juta meter kubik hasil penambangan untuk digunakan Proyek Stategis Nasional (PSN). Saat ini, baru terpenuhi 21juta saja.

“Ini kan kurangnya banyak. ESDM provinsi kita minta untuk memetakan di mana lokasi yang depositnya ada. Agar tidak merusak,” katanya.

Ganjar juga telah meminta Dinas ESDM untuk menghitung rencana detail tata ruang atau RDTR. Ganjar mengatakan, RDTR ini menjadi penting agar khusus penambangan bisa dikerjakan sesuai aturan. Ganjar juga meminta agar BPN dilibatkan.

“Nah para penambang kita minta untuk mereka yang punya hati, jangan awur-awuran gitu lho dan beberapa tadi sudah ngaku banyak yang menerima, lagi eksplorasi juga sudah mengeksploitasi. Nah pengakuan pengakuan dosa mereka kita kumpulkan hari ini untuk bisa kita perbaiki, mudah-mudahan minggu depan kita bisa memperbaiki lah gitu ya,” tandasnya.

Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi mengatakan, Satgas Puser Bumi ini eksekutornya dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrim-sus) Polda Jateng dan Dinas ESDM Provinsi Jateng.

“Kita akan gunakan seluruh stakeholder yang ada dari mulai proses perijinan maupun penegakan hukum di wilayah Jateng. Prinsipnya jangan sampai prinsipnya (penambangan) ini bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa mengganggu kegiatan pembangunan nasional,” tandas Luthfi.





Foto: ANTARA/Aji Styawan

Nasib Suram Buruh Perempuan Jateng dengan Upah Murah

Oleh; Anindya Putri

KBR, Semarang - Nada suara Erma Oktavia (30), ibu satu anak asal Kabupaten Demak, Jawa Tengah meninggi kala menceritakan pengalaman pahitnya menjadi buruh di salah satu pabrik garmen ternama di Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah.

Secara gamblang ia memaparkan perlakuan pabrik tempat ia bekerja dulu pada buruh perempuan. Eksploitasi buruh perempuan, gaji di bawah rata-rata, kebijakan yang tak ramah pada buruh perempuan yang sedang hamil, hingga sistem kontrak yang tidak ada akhirnya dituturkan Erma secara menggebu-gebu. Kondisi tersebut membuat Erma memutuskan untuk mengundurkan diri dari tempat ia bekerja April 2023 lalu. Meski demikian, ia masih berjuang untuk kesejahteraan ribuan buruh perempuan di tempat ia bekerja dulu bersama Serikat Pekerja (SP) SPRING.

Erma pun bercerita banyak pada KBR, mengenai nasib para buruh perempuan di tempat ia bekerja dulu yang bisa dikatakan kurang layak, dengan sistem bak kerja paksa. Hampir tiga tahun, Erma mengais rupiah di pabrik garmen yang berjarak 19 kilometer dari kediamannya. Dikatakannya, perusahaan meminta para pekerja yang mayoritas perempuan untuk lembur hingga over time. Namun, upah lembur tak segera dibayarkan oleh perusahaan.

“Kami disuruh lembur, molornya itu tidak hanya sejam dua jam. Bahkan bisa lima jam,” ucap Erma di kediamannya, Jumat (28/07/23). Nasib para buruh perempuan di tempat ia bekerja dulu juga semakin nelangsa. Selain jam kerja over time, upah lembur acapkali ditahan oleh perusahaan.

Pabrik garmen di Gerobogan tersebut dijelaskannya juga tak ramah bagi perempuan hamil. Lantaran, setiap buruh perempuan yang tengah mengandung diminta untuk mengundurkan diri (resign). “Jadi ada beberapa perempuan hamil, saya juga heran kenapa staff bisa tahu kalau ada anak produksi yang hamil, mereka diminta ke kantor dan disuruh membuat surat pengunduran diri. Kesannya seperti perusahaan tidak mau rugi dan ambil resiko,” jelas Erma.

Selain merasa dieksploitasi, perusahaan tempat Erma bekerja dulu tak pernah mengangkat karyawan tetap alias menerapkan sistem kontrak abadi. Hal itu juga dirasakan Erma yang sudah bekerja selama tiga tahun. Setiap tiga bulan sekali ia diminta untuk memperbaharui kontrak kerja. Tak hanya itu, Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan yang sudah bekerja satu tahun lebih juga tak didapat.

“Saya sudah kerja tiga tahun, tidak ada namanya pengangkatan karyawan, yang ada setiap tiga bulan sekali tanda tangan kontrak, mau lanjut apa enggak,” ungkap Erma. Dikatakannya, upah yang diterima setiap bulannya tak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Grobogan dikisaran Rp 2 juta. Upah yang ia terima setiap bulan diberikan dua kali atau dicicil oleh perusahaan, yakni tanggal 5 dan tanggal 20. Mirisnya, total upah yang Erma terima tak pernah menyentuh Rp 2 juta. Sebab, terdapat potongan upah dari tak masuk kerja hingga telat absen.

“Kalau telat pasti potong gaji, tidak masuk kerja juga dipotong gajinya. Bisa dibilang gaji saya dulu hitungannya per hari,” keluh Erma. Rentetan kecurangan pabrik di tempat Erma bekerja membuatnya geram. Puncaknya pada akhir 2022 lalu, saat upah lembur yang tak dibayarkan oleh perusahaan dan ada paksaan lembur kepada ribuan buruh perempuan.

Kondisi itu membuat Erma naik pitam, ia berontak menuntut hak para buruh kepada perusahaan seorang diri. Meski seorang diri namun Erma merekam aksi protesnya tersebut menggunakan telepon genggamnya.

Dalam aksinya Erma meminta menejer perusahaan untuk membayar upah lembur.

Aksi protes Erma pun sempat sempat menghebohkan sosial media pada Januari 2023. Pasalnya, video yang ia rekam sempat menggegerkan dunia maya. Kalangan buruh, Pemda hingga serikat pekerja juga memberikan respon dan mendukung aksi Erma kala itu.

Aksi protes tersebut berujung adanya mediasi dengan perusahaan yang dikawal oleh Serikat Pekerja (SP) SPRING dan Disnaker Grobogan. “Waktu itu saya sudah gemas, saya buat video di situ untuk meminta hak upah lembur ke menejer, kemudian video tersebut disebar oleh teman teman. Saya sempat kaget ternyata viral,” beber Erma.

Walaupun telah mengikuti mediasi, namun Erma masih harus menelan getah pahit. Lantaran imbas dari video viral tersebut, Erma dimutasi dari ketua line (vider) menjadi bagian produksi setrika (ironing). Erma mengungkapkan, pasca dimutasi bagian produksi. Ia sempat merasa ke-walahan, lantaran dipaksa bekerja dengan kondisi berdiri selama 7 jam nonstop. “Setelah video viral itu, saya dipindah bagian, Januari kebetulan tanda tangan kontrak perpanjangan,” ungkap Erma.

Menurut Erma, mutasi yang ia terima merupakan akal-akalan perusahaan untuk membuatnya tidak betah bekerja. Beratnya ritme kerja dengan kondisi berdiri berjam-jam membuatnya Erma acapkali pingsan. “Selama satu bulan 4 kali saya pingsan, karena sudah tidak kuat. Apalagi waktu menstruasi harus kerja, cuti menstruasi juga tidak ada,” beber Erma. Selama dua bulan Erma bekerja di bagian barunya, ia mengaku tidak sanggup dan memilih untuk keluar dari perusahaan pada April 2023 tepatnya pasca Idul Fitri. THR tak juga Erma rasakan hingga di penghujung waktu kerjanya. “Akhirnya saya resign karena sudah lelah, THR juga tidak dapat apalagi tali asih,” kata Erma kecut. Berkaca ke gaji yang ia dapatkan dari perusahaan tempat ia bekerja, Erma mengaku nominal yang ia dapatkan tak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, meski ditambah dengan penghasilan sang suami.

“Gaji yang dulu saya terima sudah jelas tidak cukup buat hidup, mau tidak mau harus ngirit biar bisa beli beras, bayar listrik. Belum yang ada anak bayi beli popok dan susu,” terang Erma. Erma merupakan segelintir perempuan yang harus memikul peran ganda sebagai penyokong perekonomian keluarga dan ibu rumah tangga.

Dengan tensi kerja tinggi, namun hasil tak sebanding. Beberapa buruh perempuan sering kali terdesak dengan kondisi perekonomian. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sering kali dialami perempuan turut memperparah kehidupan para buruh perempuan.

Seperti pengakuan Kusuma (31) buruh perempuan asal Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Perempuan 31 tahun itu bahkan jadi tulang punggung rumah tangga lantaran bercerai dengan suaminya. Selain mengeluh terkait upah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia juga mengaku KDRT sangat berdampak pada kondisi psikologinya. Kusuma telah bekerja hampir 10 tahun di pabrik garmen dengan gaji awal Rp 900 ribu. Meski upah yang ia terima kini Rp 2,5 juta. Namun, ia harus menghidupi anak seorang diri. Lantaran telah bercerai pada 2022 lalu akibat KDRT.

“Gaji segitu jelas tidak cukup, pasca bercerai saya harus menghidupi anak sendirian, karena suami saya penjarakan karena KDRT,” beber Kusuma. Kusuma mengaku, untuk mendapatkan uang tambahan, ia berdagang makanan dan aksesoris perempuan secara online. Meski untung yang didapat tidak seberapa, bagi Kusuma sangatlah berarti. “Saya juga jualan online, buat tambah-tambah dan biaya operasional kerja, udah bisa buat beli bensin aja Alhamdulillah,” kata Kusuma.

Dikatakannya, menjadi buruh perempuan memang tidak mudah, ditambah dengan kondisi psikologinya pasca menjadi korban KDRT dan harus tetap bekerja untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. “Pernah dikondisi drop sekali, sudah sakit fisik dan hampir depresi tapi saya harus tetap bekerja,” tutur Kusuma.

Pengawasan Permasalahan Buruh Perempuan Hanya Normatif Tanpa Solusi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Jateng mencapai 8,13 juta orang. Angka tersebut dari pendataan yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah lewat Profil Ketenagakerjaan Jawa Tengah tahun 2022. Dari pendataan tersebut para buruh perempuan di Jawa Tengah juga tercatat memiliki jam kerja mencapai 37,6 jam per pekan. Tentunya angka TPAK tersebut sangat berpengaruh dengan peningkatan perekonomian di Jawa Tengah. Namun, nasib para buruh perempuan di Jawa Tengah belum bisa dikatakan layak.

Sekertaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng Aulia Hakim, 8 juta buruh perempuan di Jateng harusnya diimbangi perlindungan yang kuat.

Meski demikian fakta di lapangan proteksi dan hak buruh perempuan sangat kurang. Bahkan ia menemukan kontrak kerja buruh perempuan acapkali tak diperpanjang.

Perempuan pekerja yang hamil, kemudian melahirkan juga diputus kontrak. “Kemudian hak cuti haid yang dipotong, beberapa kasus tersebut memang banyak kami temui. Bahkan ketersediaan ruang laktasi tidak layak, kondisi tersebut membuat pekerja perempuan sampai menyusulkan anaknya ke pabrik untuk mendapatkan ASI,” tegasnya.

Kondisi tersebut membuat KSPI Jateng terus mendorong pemenuhan hak pekerja perempuan. Termasuk mendorong perusahaan untuk menyediakan penitipan anak bagi ibu yang sedang menyusui. Ia mengaku sangat miris melihat kondisi buruh perempuan di Jateng, hal itu bakal jadi bom waktu. “Pengawasan juga sangat lemah, eksekusi dilakukan saat ada laporan. Itupun kalau ada serikat pekerja jika tidak buruh perempuan takut untuk melapor. Hal itu wajib diperbaiki oleh pemerintah,” tuturnya.

Ia menuturkan, banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah untuk kesejahteraan buruh perempuan. Apalagi adanya Omnibuslaw, di Kabupaten Semarang misalnya kini banyak program padat karya yang akan memicu aksi para serikat buruh. Banyak buruh yang vokal menyuarakan nasib pekerja tapi justru dipangaks dan diintimidasi. “Harusnya pemerintah tetap memprioritaskan dan melindungi pekerja, entah mereka berserikat atau tidak wajib dilindungi. Hal itu menjadi tugas dari instansi terkait yang menjadi dewan pengawas untuk memastikan kesejahteraan pekerja,” imbuhnya.

Meski Pemerintah Provinsi Jateng mengklaim telah memberikan kebijakan yang ramah bagi buruh perempuan. Namun, fakta di lapangan berbeda 360 derajat. Nasib para buruh perempuan masih tergadaikan tanpa ada kepastian akan hak hingga perlindungan. Pemerintah Provinsi Jateng, melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jateng pun memberikan tanggapan terkait nasib para buruh perempuan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, mengatakan, jika menemui perusahaan yang melakukan kecurangan serta tak sesuai dengan UU Permenaker No.5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang terdampak Perubahan Ekonomi Global, bakal ditindak secara tegas.

“Tahap awal surat peringatan, kemudian ada mediasi dan membentuk tim pengawas,” jelas Aziz.

Menyoal kontrak kerja buruh, Aziz menerangkan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. “Kalau sekarang yang sudah kerja lima tahun, pada tahun ke enam harusnya sudah diangkat jadi karyawan tetap,” ucap Aziz.

Menurutnya, terkait dengan sejumlah fasilitas khusus seperti ruang laktasi hingga ketersediaan air bersih memang harus diberikan bagi buruh perempuan. “Itukan ada audit, nah biasanya dari pemda dan jika ada temuan tidak sesuai perusahaan diminta untuk evaluasi dan memperbaiki,” imbuhnya.

Politik Upah Murah Abaikan Nasib Buruh Perempuan

Empat provinsi di Pulau Jawa memiliki kawasan industri besar, sejumlah provinsi tersebut ada di Banten, Jabar, Jateng dan Jatim. Dari empat provinsi itu, Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) terkecil ada di Jateng. Di mana UMK di Jateng pada 2023 paling tinggi di Kota Semarang dengan Rp 3 juta lebih, sementara UMK terendah di Banjarnegara yang mencapai Rp 1,9 juta.

Sementara UMK tertinggi di Provinsi Jabar tembus Rp 5,1 juta lebih di Bekasi dan terendah di Kota Banjar Rp 1,9 juta lebih. Di Provinsi Banten UMK tertinggi ada di Kota Cilegon dengan Rp 4,7 juta dan terendah di Kabupaten Lebak Rp 2,9 juta.

Lalu UMK tertinggi di Provinsi Jatim ada di Surabaya dengan Rp 4,5 juta lebih dan terendah di Kabupaten Sampang Rp 2,1 juta lebih. Melihat angka tersebut, tak khayal Jateng bakal jadi sasaran ekspansi hingga relokasi industri. Bahkan wacana ekspansi dan relokasi industri juga didenungkan oleh pemerintah pusat.

Melalui Perpres RI Nomor 79 Tahun 2019, wilayah Jateng dijadikan satu di antara titik percepatan pembangunan ekonomi nasional. Beberapa titik di Jateng bakal berdiri kawasan industri untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan perekonomian nasional.

Pada pasal 1 Perpres Nomor 79 Tahun 2019 disebutkan, ada tiga kawasan yang jadi titik utama percepatan investasi dan perekonomian nasional di Jateng. Yang pertama Kawasan Kedungsepur atau Kendal, Semarang, Salitga, Demak dan Gerobogan.

Lalu Kawasan Purwomanggung atau Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Temanggung. Kemudian Kawasan Bergasmalang atau Brebes, Tegal dan Pemalang. Sejak Perpres tersebut dikeluarkan, Jateng bak magnet bagi investor. Catatan Pemprov Jateng pada akhir 2022 lalu, terdapat 97 pabrik yang melakukan relokasi ke Jateng. Puluhan pabrik tersebut hanya bagian kecil dari total perusahaan yang ada di Jateng. Pasalnya data Kementerian Perindustrian RI hingga semester II 2023 menyebutkan, jumlah perusahaan di Jateng mencapai 3313.

Serbuan investor ke Jateng tersebut membuat realisasi investasi meroket. Pendataan Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Terpadu (DPMSPT) Jateng. Realisasi investasi di Jateng pada akhir 2022 di angka Rp 58,8 triliun. Nilai tersebut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan 2020 yang hanya Rp 50 triliun dan 2021 dengan Rp 52 triliun lebih.

Jumlah serapan tenaga kerja di Jateng juga tak main-main. Sepanjang 2022, ribuan perusahaan di Jateng telah menyerap 170 ribu tenaga kerja. Meski demikian potensi investasi dan serapan tenaga kerja tersebut, patut diwaspadai, karena akan berdampak pada kesejahteraan buruh. Khususnya bagi pekerja perempuan yang masih dianggap sebelah mata oleh para investor.

Menurut Dian Septi Pengamat Buruh Perempuan, politik upah murah menjadi senjata untuk mendatangkan investor ke Jateng. Kondisi tersebut bakal menjadikan Jateng sebagai sasaran relokasi industri oleh investor. Ia memberikan contoh pada industri garmen, di mana para investor fokus mencari lahan murah, ongkos produksi murah dari upah buruh minim.

“Hal tersebut bakal jadi daya jual perekonomian di Jateng. Namun prinsip pembangunan industri itu mengabaikan kesejahteraan buruh dan hak-haknya,” jelasnya.

Ditambah lagi fleksibilitas kerja seperti sistem kontrak yang bisa melakukan PHK sewaktu-waktu, bakal semakin menyengsarakan pekerja. Menurutnya, politik upah murah dipakai agar perputaran modal lebih cepat serta keuntungan investor mudah diperoleh.

“Belum lagi adanya program padat karya yang mayoritas pekerjaanya perempuan, karena industri tekanan tenaga manusia lebih banyak dengan harga tenaga yang lebih murah dan bersaing,” paparnya. Diah menuturkan, politik dan perhitungan tersebut bukan berdasarkan asas kemanusiaan tapi bisnis.

Seharunya bisnis perlu dikontrol dan yang wajib melakukan kontrol adalah pemerintah. Upah murah dan program padat karya dikatakannya bakal menyengsarakan pekerja perempuan. “Karena perempuan masih dianggap pencari nafkah kedua bukan utama. Sementara yang dianggap pencari nafkah utama itu suami dan perempuan dianggap hanya membantu suami, hal itu juga dilegalkan oleh UU Perkawinan,” jelas Dian.

Bisnis dikatakannya juga tidak melihat gender atau kebutuhan perempuan. Seperti cuti haid, cuti melahirkan hingga keguguran yang dianggap tidak produktif. Ia menyebutkan waktu pekerja perempuan haid justru dianggap lambat dalam mengerjakan produksi dan dianggap mengganggu pekerjaan.

“Celaknya dalam hitungan bisnis perusahaan tidak mau membayar hak-hak tersebut. Bahkan ada yang diminta mengundurkan diri,” paparnya. Ditambahkan Dian, cara pandang bisnis menjadi bias gender dan mengabaikan hak-hak khusus perempuan. Kondisi itu membuat upah pekerja perempuan lebih murah karena adanya landasan-landasan patriarki.

Selain dianggap bukan pencari nafkah utama, perempuan dianggap tidak memiliki skill sehingga ditempatkan di ranah domestik. “Upah di Jateng memang paling murah dan jelas sekali mengabaikan kebutuhan pekerja perempuan. Upah selama ini tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup dan jelas tidak adil,” imbuhnya.



Foto: Change.org

Upah Murah di Jawa Tengah: Buruh Sekarat, Industri Merapat

Oleh; Baihaqi Annizar

ISWATUN hampir tak pernah istirahat. Buruh pabrik ini mengisi akhir pekan untuk mencari tambahan penghasilan. Saat saya menemuinya pada akhir Juli 2023, ia baru saja pulang memanen padi dari sawah, bermandikan keringat. “Panen padi orang lain, saya cuma bantu,” celetuknya.

Perempuan berusia 49 tahun ini bercerita sejak suaminya lumpuh saraf pada 2016, ia jadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Mereka memiliki dua anak laki-laki. Saat suaminya lumpuh, anak bungsunya masih SMP. Kini anak pertamanya, usia 30-an, sudah menikah dan tinggal bersama mertua. Anak bungsunya, usia 20-an tahun, sudah bekerja selepas lulus SMA.

Pagi buta, selepas subuh, Iswatun sudah beberes rumah dan menyiapkan makan serta memandikan suami yang hanya bisa terbaring di kasur. Di hari kerja, ia harus bergegas menyelesaikan pekerjaan domestik tersebut agar tak terlambat masuk kerja. “Nggak boleh telat. Telat semenit saja dihitung masuk jam berikutnya,” ucapnya.

Iswatun, yang tinggal di Demak, adalah buruh perusahaan garmen yang berada di perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ia minta merahasiakan nama pabrik tersebut agar tak timbul ma-

salah. Jarak rumah dan pabrik sekitar 7 km. Karena tak punya kendaraan bermotor, ia pergi dan pulang bekerja dengan mengayuh sepeda selama setengah jam.

Jam kerja pabrik dari jam 8.00 sampai 16.00. Pada saat bekerja, suaminya sendirian di rumah. Biasanya, ia minta tolong tetangganya untuk mengecek kondisi suaminya saat siang hari, membantu mengganti plastik untuk air kencing, dan menggeser posisi kaki. Istawaton sudah bekerja selama 33 tahun di pabrik tersebut; bukan karena sangat betah, tapi lantaran tidak ada pilihan lain. Sistem kerja di pabrik itu cenderung santai dan ia tak pernah mengambil lembur.

Pabrik tempatnya bekerja tidak sebesar dulu. Dulu punya 3.000-an pekerja, sekarang 650-an. Kalau pesanan produksi sedang tinggi, biasanya pabrik menambah pekerja serabutan yang disebut “pekerja pocokan.” Meskipun menua di pabrik, jenjang karier Iswatun tak ada perubahan. Pun gaji yang diterimanya hanya standar upah minimum dan kenaikan per tahunnya tidak seberapa. Masalah kesenjangan pendapatan dan kebutuhan juga dirasakan Rozikan, buruh asal Kabupaten Grobogan. Meski usianya belum genap 30 tahun, ia sudah menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal.

Rozikan adalah buruh PT Pungkook Indonesia One pabrik Grobogan, perusahaan manufaktur tas yang berekspansi di wilayah Jawa Tengah pada 2016. Upah Rozikan di atas sedikit upah minimum Kabupaten Grobogan. Masalahnya, UMK Grobogan tahun 2023 hanya Rp2,029 juta. Praktis, jika dihitung-hitung, pendapatan Rozikan masih kurang untuk mencukupi kebutuhan dirinya, ibunya, dan adiknya.

“Kalau dihitung-hitung, enggak cukup untuk hidup, masih jauh dari survei kebutuhan hidup layak,” tutur Rozikan, Juli lalu. Menurut survei kebutuhan hidup layak di wilayah sentra industri, termasuk Semarang, seharusnya kenaikan upah berkisar 12-15%.

Praktik Politik Upah Murah

Besaran upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2023 adalah Rp 1.958.169. Ketetapan itu menempatkan daerah yang dipimpin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini sebagai provinsi dengan UMP

terendah secara nasional. Nilai upah ini naik 8,01 persen (Rp145,16 ribu) dari UMP 2022.

Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah Ahmad Aziz berkata sekalipun persentase kenaikannya tinggi, tapi perubahannya tidak terlalu terlihat sebab upah minimum tahun sebelumnya rendah. “Ketika basic upah seperti wilayah di luar Jawa Tengah sudah tinggi, ya ketemunya akan tinggi,” ucapnya, Agustus lalu. Ia menampik ada politik upah murah di belakang UMP Jawa Tengah.

Sebaliknya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang berpandangan berbeda dengan menilik fase-fase pemberlakuan regulasi yang mengatur upah minimum. Sebelum tahun 2016, penghitungan upah minimum mengacu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah minimum ditetapkan melalui perundingan dalam Dewan Pengupahan, di dalamnya ada serikat buruh yang dapat mengusulkan besaran upah minimum sesuai hasil survei kebutuhan hidup layak.

Pada fase ini, politik upah murah mulai diterapkan dengan cara tidak mengakomodasi survei kebutuhan hidup layak yang diusulkan buruh Jawa Tengah. Salah satu contohnya, saat itu buruh di Kota Semarang menuntut upah minimum dinaikkan menjadi Rp2 juta, tapi ujungnya hanya sekitar Rp1,4 juta. Politik upah murah juga terjadi saat penentuan upah minimum berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pada fase ini, peran serikat buruh melalui Dewan Pengupahan Provinsi telah dikurangi.

Dewan Pengupahan Provinsi secara hukum hanya dapat mengajukan usulan kenaikan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak sekali dalam lima tahun. Artinya, pada 2015 boleh mengusulkan tapi kenaikan upah empat tahun berikutnya ditetapkan hanya berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Setelah itu, pada 2019, baru diperbolehkan lagi mengacu survei kebutuhan hidup layak.

LBH Semarang memandang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak punya komitmen menaikkan upah layak, meskipun ada peluang melalui survei kebutuhan hidup layak pada 2015 dan 2019. Upah minimum yang ditetapkan cenderung rendah. Alhasil, upah minimum tahun-tahun berikutnya semakin jauh dari harapan buruh. Penerapan politik upah murah kian menguat saat penentuan upah mulai tahun 2021 mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada fase ini, ruang bagi buruh

untuk mengajukan usulan yang punya landasan hukum telah tertutup. Dewan Pengupahan, yang menjadi ruang formal bagi buruh untuk mengajukan usulan kenaikan upah, tidak lagi memiliki fungsi. Kenaikan upah sepenuhnya bergantung pada kondisi pasar, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Akibat skema ini, nilai upah di Jawa Tengah akan tetap rendah.

Hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, kian mempersempit kesempatan buruh memperoleh upah layak. UU Cipta Kerja memasukkan ketentuan baru terkait aturan upah minimum. Selain mempertimbangkan faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi, juga memperhitungkan “indeks tertentu”.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam “keadaan tertentu” yang cenderung menjadi ruang diskresi bagi pemerintah untuk menjaga upah minimum tetap rendah.

Harapan Semu Upah Layak

Peran buruh dalam penentuan upah minimum memang semakin tergerus. Namun, masih ada ruang untuk memperjuangkan upah layak, di antaranya melalui pengawalan kebijakan struktur upah dan skala upah. Struktur dan skala upah mulai muncul di PP Nomor 78 Tahun 2015. Aturan itu kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan wajib diterapkan pengusaha sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021.

Aturan itu mewajibkan pengusaha menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman menetapkan upah bagi buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. Aktivis LBH Semarang, Rizky Putra Edry, berpendapat struktur dan skala upah memang memiliki semangat memperbaiki upah buruh. Namun, antara regulasi dan implementasinya belum sejalan.

Menurut Rizky, tidak ada upaya serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak memiliki kebijakan struktur dan skala upah. Meskipun perusahaan telah memiliki kebijakan struktur dan skala upah, peluang buruh untuk mendapatkan upah yang lebih baik masih minim. Hal itu didorong tingginya angka buruh yang dipekerjakan secara kontrak.

“Sistem kontrak membuat buruh memiliki peluang kecil untuk naik jabatan atau memiliki masa kerja panjang. Tanpa ada kenaikan jabatan atau masa kerja panjang, maka struktur dan skala upah tidak akan berdampak,” kritiknya.

Aturan terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerjaan kontrak tertuang di dalam Pasal 56 sampai 59 Perppu Cipta Kerja. Pasal itu mengatur sistem kerja kontrak tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap.

Namun, Pasal 59 Perppu Cipta Kerja justru menghapuskan ketentuan mengenai batas waktu pekerja kontrak yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU Ketenagakerjaan mengamanatkan, perusahaan hanya bisa melakukan kerja kontrak paling lama tiga tahun. Jika sudah melebihi batas waktu, perusahaan hanya memiliki dua pilihan, yakni tidak memperpanjang kontrak pekerja atau mengangkatnya sebagai karyawan tetap.

Dengan adanya pembaruan ketentuan pada Perppu Cipta Kerja, maka konsekuensinya perusahaan tidak lagi memiliki batasan waktu dalam melakukan kontrak dengan pekerjanya. Artinya, perusahaan dapat terus memperbarui kontrak tanpa perlu mengangkatnya menjadi pekerja tetap.

Buruh dihadapkan pada harapan semu. Upah layak kian sulit dijangkau seiring lahirnya kebijakan-kebijakan politik baru yang justru melegitimasi upah murah.

Karpas Merah Investasi

Atas nama daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, banyak daerah di Indonesia terlibat persaingan memperebutkan investasi swasta. Dan, yang dijadikan daya tawar adalah upah buruh murah.

Jawa Tengah, provinsi di pulau Jawa dengan luas wilayah 3,28 juta ha, ini menjadi wilayah incaran para pemodal untuk berinvestasi. Upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kota (UMK) di wilayah berpenduduk 37,49 juta jiwa ini menjadi pertimbangan sejumlah investor.

Jawa Tengah menyandang status sebagai provinsi dengan upah minimum terendah di Indonesia. Sebagai perbandingan, UMP Jawa Tengah 2023 yaitu Rp1.958.169, sementara UMP DKI Jakarta pada tahun yang sama mencapai Rp4.901.798 atau lebih dari dua kali lipatnya.

Ketimpangan upah antara wilayah sudah berlangsung lama. Sepuluh tahun silam, pada 2013 saat UMP DKI Jakarta mencapai Rp2.200.000, UMP Jawa Tengah baru Rp830.000.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DP-MPTSP) Provinsi Jawa Tengah dalam Platform Investasi Jawa Tengah menyebut, iklim investasi di wilayahnya “kondusif”, yang didukung pertumbuhan ekonomi yang baik, peningkatan infrastruktur, kemudahan perizinan, dan ”upah yang kompetitif”.

Upah yang kompetitif atau bahasa lainnya upah murah menjadi salah satu yang ditawarkan. Dikatakan, dengan upah minimum rendah, investor dapat merekrut tenaga kerja yang loyal dengan kualifikasi yang baik di Jawa Tengah.

“Dari sisi UMK, di Jawa Tengah dapat memberi keuntungan tersendiri bagi calon Investor,” tulisnya dalam website resminya. Peluang investasi tersebar di 35 kabupaten/kota dan terbagi ke dalam sektor pariwisata, industri, pertanian, infrastruktur, properti, dan energi.

Alfian Al-Ayyubi Pelu dan Syarif Arifin dalam “Fakta di Balik Relokasi dan Ekspansi Pabrik Garmen” (2018), menulis upah murah menjadi salah satu kondisi yang memungkinkan relokasi dan ekspansi pabrik padat karya.

“Relokasi dengan pertimbangan perbedaan upah ini dapat menekan ongkos produksi dalam jumlah besar, dan bahkan disebut mendongkrak nilai ekspor. Terdapat selisih upah yang cukup besar di daerah-daerah basis industri lama dengan daerah-daerah yang menjadi basis industri baru,” tulisnya.

Jawa Tengah dengan upah murahnya yang konsisten, perlahan menjadi incaran para pemodal. Secara bertahap, investor yang mempunyai pabrik di daerah industri lama seperti Jabodetabek mulai bergeser untuk melakukan relokasi ataupun ekspansi bisnis ke wilayah Jawa Tengah.

Kawasan industri di Indonesia bisa diklasifikasikan berdasarkan karakteristik dan waktu pembentukannya, demikian riset bersama Lem-

baga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN), dan Workers Rights Consortium (WRC).

Kawasan industri generasi pertama dibangun pada kurun 1970-1980-an dan dikelola sepenuhnya oleh negara. Contohnya Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Jakarta, Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), dan Kawasan Industri Medan.

Kawasan industri generasi kedua berkembang pada 1990-2000-an. Bentuknya, lokasi pabrik yang diinisiasi swasta lalu pemerintah mengeluarkan izin status Kawasan Berikat (KB) atau Pabrik Dalam Kawasan Berikat (PDKB). Kawasan industri ini tersebar di Tangerang, Serang, Bogor, Depok, dan Bandung Raya.

Pada 2009, pemerintah memberikan kewenangan kepada swasta untuk membangun kawasan industri atau meningkatkan status PDKB menjadi kawasan industri. Kawasan industri baru pun bermunculan, salah satunya di Jawa Tengah.

Sentra industri baru di Jawa Tengah di antaranya Jatengland Industrial Park Sayung seluas 300 ha di Demak pada 2013, Aviarna Industrial Estate di Semarang seluas 460 hektare (2016), dan BSB Industrial Park di Semarang seluas 112 hektare.

Selain itu, ada Kawasan Industri Kendal yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seluas 2.200 ha (2016), dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) seluas 4.000-an ha yang kini masih proses pembangunan. Keberadaan kawasan industri baru pun diikuti fenomena relokasi dan ekspansi pabrik secara massif. Pada 2019, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan ada 140 pabrik yang direlokasi ke Jawa Tengah.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, perusahaan yang pindah ke Jawa Tengah pada 2019 antara lain PT Batang Apparel Indonesia dari Tangerang, PT Daehan Global dari Bogor, PT Dream Sentosa dari Karawang, PT Paka Garment dari Bandung, PT Pelita Tomang Mas dari Tangerang, PT Sinar Terang Benderang dari Bogor, PT Sumber Alfaria Trijaya dari Banten, dan PT Yeon Heung Mega Sari dari Jakarta,

Pada akhir 2022, Ganjar mengungkapkan setidaknya ada 97 perusahaan yang merelokasi pabriknya ke berbagai daerah di Jawa Tengah. Kepala Dinas Penanaman Modal Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, belum men-

konfirmasi berapa data pasti perusahaan yang telah berekspansi atau direlokasi ke Jawa Tengah per 2023. “Terkait data tersebut, saya update dulu,” jawabnya, Agustus lalu.

Dari 97 pabrik yang disebut Ganjar, salah satu yang terkonfirmasi mendirikan pabrik baru di Jawa Tengah adalah PT Hwa Seung Indonesia. Perusahaan manufaktur ini membuka pabrik di Kabupaten Pati sebagai pengembangan pabrik di Kabupaten Jepara yang lebih dulu dibangun.

Dilansir dari website resmi Pemprov Jateng, General Manager PT PT Hwa Seung Indonesia Pati, Sugito, mengatakan ekspansi pabrik tetap di wilayah Jawa Tengah karena “kondusifitas” wilayahnya “terus terjaga” di saat daerah lain mulai menurun. Pabrik di Pati, katanya, berpotensi menyerap 15 ribu tenaga kerja pada 2025. UMK Pati tahun 2023 adalah Rp2,1 juta.

Menjamurnya pabrik-pabrik baru memang akan membuka lapangan kerja baru. Namun, jika pembukaan pabrik di Jawa Tengah diiringi penutupan pabrik di kawasan industri lama, maka sama saja akan banyak buruh yang kehilangan pekerjaan.

Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah, Mulyono, berpendapat masih banyak kasus pelanggaran ketenagakerjaan di Jawa Tengah, di antaranya perusahaan menggaji buruh di bawah upah minimum dan pemutusan hubungan kerja sepihak.

Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, katanya, hanya berpihak pada kepentingan pengusaha. Contohnya sistem kerja kontrak hingga regulasi yang melanggengkan upah murah.

Mulyono berkata masuknya perusahaan-perusahaan baru di Jawa Tengah seharusnya diiringi kebijakan yang menguntungkan buruh. “Jangan sampai industrinya merapat, tetapi buruhnya dibuat sekerat,” kritiknya.



Nasib Hutan Mangrove di Pesisir Semarang Jawa Tengah : Dikejar Abrasi, Dihantam Oligarki

Oleh: Iwan Arifianto

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Hutan mangrove tampak memanjang ratusan meter persis di sisi timur Kawasan Industri Terboyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Sesekali burung Blekok hilir mudik lalu hinggap di pundak pohon mangrove setinggi sekira 7 meter. Di sebelah timur hutan mangrove itu, seorang nelayan tampak asyik dengan jaring ikan, tangannya cekatan mengambil ikan hasil tangkapan.

Suguhan pemandangan alam tersebut hanya ditanggapi dengan hem-busan nafas panjang oleh nelayan pesisir Semarang, Agus Isnaini (44). Ia mahfum, hutan mangrove tersebut yang telah ditanamnya sejak 20 tahun lalu bakal dibabat habis demi proyek pembangunan tol Semarang-Demak.

“Ya ibarat sudah seperti anak sendiri, hutan mangrove ini dirawat dari bibit kecil hingga sekarang tumbuh besar. Sayang, sebentar lagi mau ditebangi,” ucapnya kepada Tribun Jateng, Jumat (14/7/2023).

Pembabatan hutan mangrove di proyek tol Semarang-Demak adalah bagian dari contoh inkonsistensi pemerintah dalam gambar-gembar melakukan konservasi mangrove. Namun, di sisi lain mereka merusaknya. Nasib hutan mangrove saat ini di ujung tanduk imbas pembangunan jalan tol sekaligus menjadi tanggul laut. Hutan mangrove tersebut akan habis

dalam Pembangunan jalan tol ini.

Pemerintah pusat menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare (Ha). Begitupun pemerintah provinsi Jawa Tengah yang menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 750 hektare melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2019.

Sejurus dengan hal itu, pemerintah mengancam keberlangsungan ekosistem mangrove seluas 42,7 hektare dengan adanya pembangunan tol Semarang-Demak. Belum lagi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 tahun 2022 yang menjadi karpet merah pembangunan kawasan industri di pesisir utara wilayah Jawa Tengah.

“Semisal hutan mangrove ini hilang sumber nafkah kami juga hilang tetapi misal tidak ikhlas atau melawan nanti berbenturan dengan pemerintah, mau tidak mau diam saja. Mau gimana lagi, kami orang kecil,” sambung Agus.

Ia mengaku, telah menanam hutan mangrove tersebut bersama belasan nelayan dari dua kelurahan yakni Terboyo Wetan dan Trimulyo. Mereka menanam mangrove tersebut di atas lahan milik warga sekitar. Bibit mangrove ditanam di atas lahan bekas tambak. “Kami merasa sudah melakukan perjuangan untuk lingkungan hanya saja dari pemerintah yang kurang memperhatikan,” tutur warga Terboyo Wetan ini.

Perkiraannya jumlah bibit yang ditanam di hutan mangrove tersebut dulunya mencapai ratusan ribu bibit yang memanjang di pesisir dua kelurahan antara Terboyo Wetan dan Trimulyo. Proyek penanaman mangrove tersebut berhasil sebelum tergusur akibat proyek Kawasan industri Terboyo. Nasib Hutan mangrove itu saat ini di ujung tanduk imbas pembangunan jalan tol sekaligus menjadi tanggul laut. “Luasan hutan mangrove yang tersisa tinggal tinggal 5 hektare lebih,” ujarnya.

Informasi yang diterima Agus, kawasan hutan mangrove di Trimulyo yang akan dibabat pemerintah seluas 5 Hektare (Ha). Pembabatan hutan mangrove tersebut belum tahu kapan akan dilakukan. Pihaknya juga sudah berhenti menanam bibit mangrove setahun lalu ketika ada pengerukan sedimentasi Kali Babon. Ditambah ada proyek tanggul laut yang sudah mulai dikerjakan.

Para nelayan berpendapat percuma ditanami mangrove sebab nantinya tergerus proyek tol dan polder. “Kabarnya pemerintah akan tanam

mangrove sebagai gantinya tetapi di Demak bukan di Semarang. Ini kan aneh yang dihilangkan di Semarang malah tanamnya di Demak,” tuturnya.

Padahal selama ada mangrove nelayan memperoleh beberapa manfaat seperti tangkapan ikan stabil lantaran mangrove menjadi tempat ikan bertelur. Kemudian sebagai penahan gelombang dan angin kencang, abrasi serta lainnya. Tak hanya itu, hutan mangrove tersebut dimanfaatkan pula sebagai wisata berupa jogging track dan gardu pandang.

Pemanfaatan kayu mangrove untuk tanggul hibrid. Sedangkan buah mangrove diambil warga sebagai bahan pembuatan makanan ringan. “Banyak manfaat dari hutan mangrove untuk warga pesisir tetapi ketika ada proyek seperti ini kita bingung. Mau gimana, ga bisa apa-apa,” jelasnya.

Dampak pembangunan tol di pesisir ternyata tak butuh waktu lama, penghasilan para nelayan di dua kelurahan tersebut kini sudah turun drastis. Sebelumnya, nelayan dalam sehari mampu mengantongi pendapatan bersih sekitar Rp200-Rp300 ribu perhari.

Namun, pendapatan mereka saat ini di angka Rp100 ribu, itupun diperoleh dengan susah payah. Turunnya pendapatan mereka lantaran sumber nafkah mereka terenggut setelah adanya proyek tol. Ditambah, mereka adalah nelayan harian. Artinya, ketika melaut tidak sampai ke tengah perairan melainkan hanya di pinggiran. Sedangkan di pinggiran sedang ada proyek tol.

“Kejadian terakhir ada gesekan antara nelayan dengan pelaksana proyek tol terkait mangrove dan lokasi penangkapan warga. Mau cari ikan tidak boleh. Mendekat 100 meter saja disuruh pergi padahal lokasi itu tempat kami mencari ikan,” bebarnya.

Agus khawatir ketika tol dibangun maka kawasan pesisir tempatnya mencari nafkah akan benar-benar lenyap. Jenis ikan karapu, kakap, udang, kepiting hingga rajungan yang setiap saat ada bakal musnah digantikan bangunan beton. Nelayan bisa saja melaut tetapi harus melaut lebih jauh.

Namun, otomatis mereka harus mengganti perahu dan peralatannya karena perahu dan alatnya sekarang hanya cukup untuk kebutuhan melaut di wilayah tepian atau tak lebih dari 1 kilometer dari pesisir. “Mau alih profesi kerja apa? Nenek moyang kami pelaut, masak kerja di darat semua, terus siapa yang kerja di laut,” tegasnya.

Terpisah, Koordinator Lapangan (Korlap) kelompok Cinta Alam Mangrove Asri dan Rimbun (Camar) Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara, Zazid (49) mengatakan, kelompoknya tak setuju dengan berbagai bentuk proyek pembangunan di wilayah pesisir Semarang terutama saat harus menggusur hutan mangrove. Meski begitu, ia tak bisa berbuat banyak sehingga hanya bisa berkompromi dengan keadaan.

“Misal kita melawan ditanya legalitasnya? Kita kalah sebab lahan mangrove yang kita tanam itu bukan milik kita pribadi tapi dikuasai swasta maupun pemerintah,” katanya.

Ia mencontohkan ketika adanya proyek pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang berimbas pada hilangnya kawasan hutan mangrove. Kala itu, petani mangrove dan nelayan tak bisa apa-apa. Mereka dipaksa ikhlas meski harus menyadari mereka telah kehilangan sebagian ruang kehidupan.

Mereka juga dipaksa melakukan proyek pemerintah berupa reboisasi mangrove dengan dalih menggantikan hutan mangrove yang telah dibabat habis. “Hasilnya reboisasi gagal imbas gerusan gelombang yang tinggi,” tuturnya.

Kelompoknya sudah menanam mangrove sejak 2011 hasilnya saat ini sudah ada 2 hektare hutan mangrove menjadi dinding alami penahan abrasi di timur kawasan industri Lamicitra dan pelabuhan Tanjung Emas.

Ia pun ketar-ketir ketika mendengar pesisir Semarang bakal menjadi sasaran tembak pembangunan beragam proyek dalam paket PSN. “Pemerintah seharusnya tidak hanya membangun tetapi harus memikirkan kawasan hijau dan pemanfaatannya ekonomi masyarakat pesisir,” harapnya.

Proyek Tol, Jalan Tanpa Hambatan untuk Babat Hutan Mangrove

Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah, dampak pembangunan jalan tol Semarang-Demak merusak hutan mangrove seluas 42,7 Ha. Hutan mangrove terdampak langsung dari pembangunan seluas 14,1 ha, dan dampak tidak langsung seluas 28,5 ha.

Rinciannya, wilayah terdampak di Trimulyo meliputi dampak langsung seluas 12,4 ha, dan tidak langsung seluas 21,9 ha. Kemudian di Sayung, Kabupaten Demak, terdampak langsung 1,6 ha tidak langsung 6,4 hektare. Wilayah Bedono, Kabupaten Demak, terdampak langsung 0,15 hektare, tidak langsung 0,15 hektare. Upaya pemerintah dalam merelokasi mangrove demi jalan tol bukanlah langkah yang tepat. Hal itu diungkapkan oleh Peneliti Teran Yohana Putri dan Fitri Liana Dewi dalam riset yang diterbitkan Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) tahun 2023.

Dalam penelitian mengungkapkan, upaya relokasi hutan mangrove di daerah yang akan diambil untuk jalan tol merupakan langkah tidak efektif. Perlu ada kajian kembali mengenai pernyataan akan keberhasilan dan keefektifan pemindahan mangrove yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan jalan tol tanggul laut Semarang-Demak. Sebab, pada kenyataannya hal ini mustahil dilakukan.

Selain itu, pada awal perencanaan pembangunan tol tanggul laut Semarang-Demak ini semestinya pemerintah mempertimbangkan lokasi yang lebih tepat yang tentunya tidak akan mengorbankan keberadaan dari tempat tinggal mangrove tersebut. “Meningat pula bahwasanya sekarang ini sebenarnya pemerintah sedang menggalakan program mangrove dan dijadikan program yang prioritas dikarenakan manfaatnya yang sangat banyak, terlebih di kota Semarang banyak terdapat program penanaman mangrove. Hal ini tidak selaras dengan apa yang dikorbankan untuk pembangunan jalan tol tanggul laut Semarang-Demak ini,” tulis riset tersebut.

Sementara, Pakar mangrove dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Diponegoro, Rudhi Pribadi mengatakan, secara umum mangrove di pantura Jawa khususnya Semarang sudah mengalami degradasi dari tahun 1920 akibat pembukaan lahan tambak. Kemudian, proses penanaman yang serius dilakukan untuk mengatasi degradasi mangrove dilakukan pada rentang tahun 1990 hingga 2000 sehingga usia mangrove di

rentang 10 hingga 30 tahunan.

Artinya, mangrove dahulu telah terdegradasi sehingga mangrove yang ada sekarang mayoritas adalah hasil penanaman atau jerih payah warga pesisir maupun aktivis peduli lingkungan, dan pihak-pihak lainnya. “Mayoritas hutan mangrove sekarang memang hasil dari ditanam,” paparnya kepada Tribun. Ia menyayangkan adanya proyek pembangunan tol Semarang-Demak lantaran akan menghilangkan ekosistem mangrove di kota Semarang.

Hutan mangrove ada yang alami kerusakan secara langsung akibat dibabat untuk proyek kolam retensi atau bagian dari sistem polder. Sedangkan jalan tol memberikan dampak kerusakan tidak langsung karena efek tidak masuknya air laut imbas tertutup tanggul tol. “Tentu saja harapannya ekosistem mangrove akan selalu ada. Sebab, manfaat ekosistem mangrove sangat banyak tak hanya secara fisik tetapi secara ekologi dan ekonomi,” katanya.

Terkait solusi pemerintah dengan melakukan relokasi mangrove, menurutnya, langkah pemerintah melakukan relokasi atau re-vegetasi mangrove bakal menghadapi beberapa kendala. Hal itu dapat terjadi lantaran mangrove memerlukan ekosistem khusus seperti pasang surut air laut, sedimentasi dan lainnya.”Sementara di kota Semarang sudah tidak ada lahan mangrove yang ideal,” paparnya. Relokasi rencananya dilakukan di luar wilayah kota Semarang. Imbasnya, langkah tersebut menimbulkan kontradiksi seperti dari petani mangrove Semarang dan Dinas Perikanan Kota Semarang menyayangkan perpindahan lokasi mangrove ke wilayah lain.

Begitupun selepas relokasi, hal itu tidak secara otomatis menggantikan fungsi hutan mangrove sepenuhnya. Artinya, ekosistem baru masih butuh waktu lama untuk menggantikan fungsi hutan yang lama. “Itu kan mulai dari nol lagi, jadi kalau mau dibandingkan tidak apple to apple. Namun, Mungkin harapan pemerintah secara luasan itu bisa sebagai pengganti,” cetusnya.

Lahan relokasi mangrove imbas pembangunan jalan tol Semarang-Demak rencananya dilakukan di sebelah kiri dan kanan Banjir Kanal Timur (BKT). Kemudian di Sidogemah , dekat pintu tol dan Betah walang, Demak.

Lokasi Sidogemah masih berupa perairan sehingga relokasi ke tempat tersebut perlu dilakukan pengerjaan pendangkalan terlebih dahulu.

Sebaliknya, di Betah Walang berupa daerah sedimentasi yang terdapat pasang surut air laut sehingga ideal untuk mangrove. “Hanya saja di sana tampaknya sudah ada beberapa institusi merencanakan kegiatan penanaman sehingga dibutuhkan pengaturan pembagian lahan,” terangnya. Ia menjelaskan, rencana pemindahan ke empat lokasi tersebut belum sampai tahap rancangan teknis atau hanya masih sebatas wacana. Padahal dibutuhkan detail teknis untuk proses relokasi dari penataan ekosistem baru mulai dari siapa yang menanam, siapa yang memelihara, hingga memastikan status lahan. “Itu yang sampai saat ini belum dibicarakan. Idenya seperti itu, tetapi detail teknis ya perlu dibicarakan lebih jauh,” bebernya saat ditemui di ruang kerjanya pada pertengahan Juli 2023.

Ia menilai, proyek relokasi mangrove yang dicanangkan pemerintah memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Selain kesulitan mencari lahan pengganti di Semarang dan Demak yang memang sudah parah digerus abrasi, merawat mangrove tetap hidup bukan persoalan gampang. Sarannya, sebagai antisipasi sebaiknya dilebihkan luasan dan jumlah bibit mangrove yang hendak direlokasi.

Setidaknya Pemerintah butuh sebanyak 460.000 bibit pohon mangrove sebagai pengganti pohon mangrove yang hilang di lahan seluas 46 hektare dampak dari pembangunan tol. Angka tersebut diperoleh menggunakan standar kerapatan mangrove yang biasa ditanam pemerintah yakni jenis *Rhizophora*. Umumnya setiap 1 ha lahan mangrove terdapat 10 ribu bibit tanaman. “Setiap jenis mangrove berbeda, bibit jenis *Avicennia* jumlahnya bisa lebih dari itu,” imbuhnya. Selebihnya, re-vegetasi mangrove boleh dikatakan berhasil ketika mangrove bisa bertahan paling tidak umur tiga tahun. “Umur mangrove 1-2 tahun masih fluktuatif. Artinya belum bisa dikatakan berhasil. Di rentang usia tersebut masih rawan yang dipengaruhi perubahan arus dan penyebab lainnya,” jelasnya.

Pembabatan Mangrove di Tengah Ancaman Krisis Iklim

Manajer Kajian dan kampanye Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jateng, Patria Rizky Ananda menyayangkan proses relokasi hutan mangrove terdampak tol Semarang-Demak. Pihaknya masih mempertanya-

kan lokasi tanam baru yang akan dilakukan pemerintah dan tingkat presentase keberhasilan dari proyek relokasi tersebut. “Kebutuhan mangrove sangat besar sekali untuk mengatasi perubahan iklim tetapi pemerintah bertingkah sebaliknya dengan tidak melindungi mangrove malah membatasnya,” ujarnya kepada Tribun, Selasa (1/8/2023).

Walhi menyangkan langkah pemerintah yang melakukan pembabatan mangrove di tengah ancaman krisis iklim. Dampaknya tentu lagi-lagi akan menyasar ke para nelayan. Padahal mereka saat ini juga sudah kesusahan mencari sumber penghasilan di laut. Kondisi tersebut nantinya akan semakin parah ketika mangrove hilang. “Lebih jauh pengaruhnya ke ketahanan pangan warga pesisir,” jelasnya.

Tak heran, para nelayan sudah tidak mau anak-anaknya bekerja sebagai nelayan. Hal itu sudah tampak di kampung pesisir Tambakrejo, Kota Semarang. Para nelayan di sana menyuruh anaknya kerja di darat dengan mayoritas berbekal ijazah SMA. “Kebanyakan mereka akhirnya kerja di pabrik, bengkel, pekerja bangunan dan lainnya. Misal kerja jadi nelayan akan lebih susah,” tuturnya.

Ketidakberpihakan pemerintah baik daerah maupun pusat terhadap hutan mangrove sudah tampak dari segi regulasi. Seperti yang dilakukan pemerintah daerah Kota Semarang. Mereka telah menyiapkan Kecamatan Tugu untuk dibuka sebagai kawasan jasa dan industri. Padahal kawasan itu masih memiliki hutan mangrove yang cukup luas. Bahkan, pemkot telah menerbitkan Perda Nomor 5 tahun 2021 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Menurut Patria, dalam perda disinggung soal reklamasi pantai yang akan dilakukan di pesisir Mangunharjo, Tugu, Kota Semarang. “Pantauan kami reklamasi dilakukan berjarak 350 meter ke arah utara. Panjang 5 kilometer. Nantinya akan berpengaruh ke mangrove terutama dari perubahan arah arus dan kekeruhan air laut,” paparnya. Belum lagi kebijakan pemerintah pusat yang menerbitkan Perpres Nomor 60 tahun 2022 yang mengukuhkan ambisi pemerintah dalam membebani kawasan pesisir khususnya di tiga daerah meliputi Kendal, Semarang dan Demak.

Ia mengatakan, pendekatan rezim ini berupa tenokratik top-down, artinya tanpa mengajak rembulan wong cilik sehingga tidak mengakomodir kepentingan masyarakat khususnya pesisir. “Kami sih tidak percaya ketika kebijakan top-down akan berpihak ke lingkungan dan masyarakat. Pemerintah Jakarta tahu apa sih soal semarang?,” tegasnya.

Walhi Jateng telah melakukan kajian terkait pengaruh kawasan industri terhadap mangrove di pesisir Semarang, Demak dan Kendal. Kajian ini menjabarkan kerusakan mangrove mayoritas terjadi akibat alih fungsi lahan baik untuk perluasan kawasan industri, bandara udara, pelabuhan dan reklamasi.

Atas dasar itu, ia mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan bersifat bottom-up, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) jangan hanya bersifat angin lalu saja lantaran dampak pembangunan yang terpapar adalah warga pesisir. Berikutnya, beragam rencana-rencana pembangunan industri seharusnya dihentikan.

Pihaknya mendorong pula pemerintah untuk membuat skema adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di pesisir yang mampu menolong para warga pesisir yang terdampak perubahan iklim. “Sejauh ini kami melihat belum ada skema tersebut. Andalan pemerintah sekarang masih bersifat defensif seperti membuat tanggul,” katanya.

Mangrove Vs Penggusuran

Pakar mangrove Rignolda Djamaludin mengatakan, ekosistem mangrove saat ini masih dihargai dengan sangat rendah dibandingkan jalan tol dan kawasan industri. Pun adanya penggusuran hutan mangrove di Semarang, Jawa Tengah demi proyek tol.

Diakuinya, political will masih berperan penting dalam penyelamatan konservasi mangrove. Jangankan kawasan mangrove dalam kasus-kasus seperti ini situs budaya saja bisa dipindahkan demi mulusnya proyek jalan tol. “Gimana bisa 40 hektare lebih hutan mangrove dipindahkan (imbis proyek tol Semarang-Demak). Yang benar adalah memusnahkan mangrove lalu kompensasi tanam di tempat lain. Itu hanya kata pembenaran. Kalau sudah salah janganlah cari-cari pembenaran,” beber penulis Buku *Magrove Biologi, Ekologi dan konservasi* ini.

Ia berpendapat wilayah Jawa Tengah Jateng secara oseanografi sudah mengalami permasalahan di wilayah pantainya. Kondisi tersebut seharusnya jangan lagi ditambah tekanan dengan beragam proyek infrastruktur. Sebaliknya lakukan Ecological Restoration atau memulihkan habitat dan ekosistem yang telah terdegradasi. “Sayangnya, pengambil keputusan

menggunakan nilai-nilai tak jelas. Pakai hitungan untung-untungan. (Lingkungan) selalu menjadi objek yang dikorbankan,” jelasnya.

Lepas dari itu, ia tetap mendorong semangat warga pesisir Jawa Tengah yang memiliki energi peduli terhadap lingkungan pesisir. Terkadang usaha kecil lebih berharga karena membudidayakan mangrove bukan soal luasan yang penting tetapi karakteristik, genetik dan fungsi ekologi. “Warga pesisir Jateng yang sudah melakukan penamaan mangrove di sana apapun ancamannya tetap lakukan penanaman,” pesannya.

Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Muhamad Karim, menuturkan, terkait relokasi mangrove yang akan dilakukan di pesisir Semarang Jateng demi proyek tol hal itu merupakan langkah tak tepat. Baginya, tidak mungkin kawasan ekosistem yang mempunyai interaksi kompleks dan menjamin metabolisme alam di kawasan kemudian dipindahkan. “Pemprov Jateng keliru untuk mengatasi hal itu karena itu tak logis, relokasi (mangrove) adalah suatu tindakan tak tepat,” paparnya saat diskusi RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Magrove, Rabu (26/7/2023).

Pemprov Jateng dalam terancamnya hutan mangrove pesisir bisa mengacu kepada wewenangnya sebagai otonomi daerah yang memiliki kuasa dalam pengelolaan kawasan pesisir. “Apapun istilahnya dari relokasi, re-vegetasi tak masuk akal sehingga itu akan menghancurkan ekosistem dan pos-pos ekologi yang sudah berlangsung secara alamiah akan hilang semua,” terang Dosen Universitas Trilogi Jakarta ini.

Keberlanjutan Hutan Magrove?

Sub Koordinator Pengelolaan Ruang Laut Bidang KP3K Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah, Benovita Dwi Saraswati mengatakan, terdapat dampak langsung dan tidak langsung dari pembangunan proyek tol Semarang-Demak.

Dampak langsung yakni mangrove yang dibabat lantaran untuk kebutuhan pembuatan tanggul maupun dampak tidak langsung yakni mangrove yang mati akibat paska pembangunan tol yang berdampak daerah sisi selatan tol akan kering sehingga mangrove dimungkinkan mati. Wilayah yang terdampak Trimulyo terdampak langsung seluas 14 Ha,

terdampak tidak langsung 24 Ha. Tahapan awal yang dilakukan penebangan di Trimulyo, Genuk luasan 12,4 Ha. “Kapan ditebang belum tahu, magrove yang hendak ditebang merupakan dari terdampak langsung, sebaliknya mangrove tak terdampak langsung dibiarkan,” terangnya.

Kemudian di Sayung, terdampak langsung 1,6 Ha tidak langsung 6,4 Ha. Bedono, terdampak langsung 0,15 Ha, tidak langsung 0,15 Ha. “Paling luas memang di Semarang,” imbuhnya. Mengantisipasi kerusakan tersebut, pihaknya menyebut, mengacu surat dari Badan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional sudah menentukan lokasi re-vegetasi mangrove di empat lokasi meliputi Kalimati, timur tanggul banjir kanal timur, Sidogemah, Sayung, Betah Walang Bonang Demak. “Empat lokasi ini sejauh ini belum ada kajiannya,” ungkapnya, Kamis (13/7/2023).

Pembabatan mangrove tersebut memang tak sejalan dengan program konservasi mangrove yang dicanangkan pemerintah provinsi Jawa Tengah. Namun, Benovita mengklaim, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan realisasi konservasi mangrove total telah mencapai seluas 1.686 Ha. Ditambah pada tahun tahun 2023, sudah melakukan konservasi seluas 96,2 Ha. Masih ada potensi tambahan konservasi sekitar 90 hektare di tahun ini yang berasal dari dana CSR perusahaan. “Seperti program PLN punya target menaman 100 hektare di Pantura Jateng. 10 hektar di Rembang sudah sisanya survei Pekalongan Brebes,” tuturnya.

Meskipun adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan pesisir, ia yakin sesuai Perpres Nomor 60 tahun 2022 yang mengatur Rencana Tata Ruang Strategis Kedungsepur telah mengatur alokasi ruang keberlanjutan mangrove. Ia tak menyebut detail seberapa luasan ruang yang disediakan pemerintah melalui aturan tersebut. “Tiga daerah Kendal, Semarang, Demak kedepannya nanti jadi zona industri namun menjamin keberlanjutan mangrove tetap di situ,” katanya.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto mengatakan, relokasi mangrove terdampak tol Semarang-Demak masih dikomunikasikan terkait lokasi penggantinya. Komitmen penanaman kembali mangrove yang hilang akibat pembantu tol Semarang-Demak tetap dilakukan karena sudah masuk ke dokumen lingkungan.

“Masih mengkomunikasikan, pembangunan kan belum selesai. Nanti lihat terdampak berapa bisa saja perencanaan berubah saat pelaksanaan,” bebernya kepada Tribun, Jumat (28/7/2023).

Disinggung ancaman pesisir Jateng terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), Widi memastikan, pihaknya bakal melakukan pengawalan dan pengawasan supaya proyek yang ada tak semestinya menghilangkan ekosistem mangrove. Pengawasan dilakukan sejak awal penyusunan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Di dalam dokumen AMDAL ada kewajiban menyelamatkan magrove. Kuncinya, berada di dokumen persetujuan lingkungan di AMDAL sudah diatur dan tak semuanya ditebangi,” katanya. Ia juga memastikan kepada pelaksana proyek seperti pekerjaan jalan tol wajib melakukan rehabilitasi atau penanaman mangrove di area lain sekaligus merawatnya sampai tumbuh besar. Setiap pelaku usaha wajib melakukan rehabilitasi menanam mangrove dengan luasan yang sama ketika dalam proses pembangunan menghilangkan kawasan mangrove.

“Jadi ada pengganti, hilang mangrove terus tidak ada pengganti, ketika ada pengganti maka luasan Magrove tidak berkurang. Itu kewajiban pelaku usaha dari rehabilitasi mangrove,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui DLHK mengklaim tiap tahunnya terus memperluas wilayah rehabilitasi mangrove. Widi menyebut, selama kurun lima tahun dari 2017-2021 ada kenaikan luasan sebesar 3.148 hektare. Rinciannya, pada tahun 2017 luasan rehabilitasi mangrove di angka 12.661 hektare. Ditahun 2021 bertambah menjadi 15.809 hektare. “Data tahun 2022 masih dihitung, misal ditambah yang peningkatannya lebih,” klaimnya.

Di samping itu, adanya pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) magrove di pasar Bangi Rembang, Mojo di Pemalang, dan Muara Kali Ijo di Kebumen. “Kami melakukan pula gerakan rehabilitasi mangrove bersama masyarakat. Bahkan memberikan bantuan ekonomi produktif berupa alat-alat pengolahan kopi mangrove. Bentuk pemberdayaan masyarakat,” tandasnya.



Cerita Pejuang Mangrove Semarang : Upaya Terakhir Selamatkan Tembok Pesisir

Oleh; Iwan Arifianto

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kawasan hutan mangrove di pesisir Kota Semarang, Jawa Tengah, berada diambang kehancuran. Beragam rencana pembangunan sudah disiapkan pemerintah untuk menggeser mangrove. Rencana pembabatan hutan mangrove di proyek tol Semarang-Demak bagian dari contoh inkonsistensi pemerintah dalam gambar-gembor melakukan konservasi mangrove. Namun, di sisi lain mereka merusaknya. Nasib hutan mangrove saat ini di ujung tanduk imbas pembangunan jalan tol sekaligus menjadi tanggul laut. Hutan mangrove akan habis dengan pembangunan jalan tol ini.

Menyikapi hal itu, para pegiat mangrove Semarang kembang kempis. Mereka kebingungan dengan sikap Pemerintah yang di satu sisi sibuk kampanye penghijauan. Di sisi lain malah berencana menghancurkan hutan mangrove.

“Kemana para pejabat yang dulu tanam mangrove sama pasang spanduk besar bertuliskan peduli lingkungan ikut hijaukan pesisir Semarang. Sekarang kog mangrove malah mau dibabat untuk pembangunan?” ungkap Pegiat Mangrove Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Sutopo.

Ia mengatakan, tentu menolak ketika ada alih fungsi lahan dari wilayah konservasi mangrove diubah menjadi kawasan industri. Sebab, mangrove yang ada sekarang bukanlah pohon yang tumbuh sendiri melainkan ditanam dan dirawat oleh para warga pesisir. “Kami tentu menangis ketika wilayah hutan mangrove dihancurkan untuk industri,” katanya kepada *Tribun*, Rabu (2/8/2023).

Ia menyebut, wilayah Tapak Tugu menjadi kawasan hutan mangrove yang masih terjaga dengan baik. Kondisinya lebih luas dibandingkan dengan pesisir lainnya di kota Semarang. Ditambah, kawasan Tapak menjadi satu-satunya wisata edukasi mangrove yang ada di kota Semarang. “Kalau mangrove di Semarang tidak ada bagaimana kita mengedukasi kepada para generasi penerus,” ucapnya.

Diakuinya, ketika warga ingin melawan terganjal aturan pemerintah baik melalui Peraturan Presiden maupun Peraturan Daerah. Berikutnya, status lahan mangrove di pesisir Tapak yang dikuasai oleh swasta. “Mayoritas milik swasta. Kurang lebih perbandingannya 70 persen swasta, 30 persen milik masyarakat,” katanya.

Ketika semua mangrove ditebang habis dampaknya bisa ke 200an nelayan dan petani tambak yang menggantungkan hidup di pesisir Tapak. “Tentu miris Indonesia sebagai negara maritim tetapi kawasan pesisirnya dihilangkan untuk industri,” papar pria yang juga Ketua Pokdarwis Wisata Magrove Tapak.

Ia meminta pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembangunan industri hendaknya menyisakan ruang terbuka hijau. Harapannya, ruang tersebut sebagai penyeimbang di kawasan pesisir. Selain itu, pemerintah hendaknya melibatkan warga pesisir sebelum melakukan perencanaan pembangunan di kawasan tersebut. Musababnya, ketika ada proyek pembangunan pesisir para wargalah yang terdampak. “Kami tetap berjuang, melakukan negosiasi untuk upaya-upaya penyelamatan mangrove sebagai tembok terakhir di pesisir kami,” tegasnya.

Pegiat Lingkungan dari Perkumpulan Pemuda Remaja Pencinta Alam Tapak (Prenjak), Eko Nugroho mengatakan, penanaman mangrove di kampung Tapak Kelurahan Tugurejo, sudah intensif dilakukan sejak tahun 1999.

Awalnya banyak warga yang mencemooh aksi tanam mangrove yang dilakukan kelompoknya padahal mereka hanya ingin menyelamatkan desanya dari ancaman abrasi di pesisir. “Kami hanya melanjutkan perjuangan dari kakek nenek yang sebelumnya sudah ikhtiar menanam mangrove,” terangnya.

Sebelum ada mangrove, kawasan pesisir itu dalam kondisi gersang karena hanya ada segelintir pohon mangrove. Kini, kawasan itu sudah diselimuti mangrove dengan total ada lima jenis mangrove seperti *Bruguiera*, *Avicennia Marina*, *Rhizophora apiculata*, *R. mucronata*, dan *R. stylosa*. “Hasilnya dapat dilihat sekarang ketika kampung pesisir di wilayah lain mulai hilang tergerus abrasi kampung kami masih aman, jarak dengan bibir pantai sejauh 2 kilometer,” katanya.

Ia masih ingat ketika fase gelombang rob tinggi pada disertai curah hujan terjadi hampir seluruh pesisir kota Semarang pada akhir Mei 2022. Imbasnya, hampir seluruh wilayah kota Semarang terendam banjir. Namun, kampung Tapak dan sekitarnya kala itu tidak terdampak. “Wilayah Mangkang ketika itu kena rob, tapi kami aman, begitupun kampung di dekat kami seperti di Tugurejo, Karanganyar Randugarut Tambakharjo, Jarakah, juga ikut merasakan dampak manfaat hutan mangrove kami karena terlindungi dari banjir rob,” bebarnya.

Sektor lain dari pemanfaatan konservasi mangrove adalah sumber penghidupan petani tambak. Di lokasi tersebut, terdapat 60-70 tambak ikan bandeng. Selain itu, terdapat wisata bahari berupa wisata mangrove. Di kampung Tapak wisata tersebut sudah dimulai sejak September 2015.

Paket wisata itu dikelola oleh Pokdarwis Tapak yang terdiri dari beberapa kelompok meliputi nelayan, petani tambak, petani sawah, ibu-ibu putri Tirang, dan Prenjak. Tingkat kunjungan wisatawan di tempat wisata cukup menggembirakan yakni sebulan tercatat terdapat 500 hingga 700 pengunjung. Wisatawan berasal dari para pelajar dari TK hingga Universitas, maupun masyarakat umum.

Pemanfaatan sektor ekonomi tersebut jelas sangat membantu ekonomi bagi warga. Ada sekira 150 sampai 200 orang yang merasakan manfaat ekonomi dari kawasan konservasi mangrove. Hal itu tentu menjadi sumber alternatif ekonomi bagi para nelayan saat terjadi musim paceklik. “Kami berharap mangrove pesisir menjadi tempat mengais rezeki dan mengembangkan skill pengelolaan mangrove,” tuturnya.

Sementara, Petani Mangrove di Kelurahan Mangunharjo, Tugu, Kota Semarang, Sururi mengatakan, merasa khawatir bila hutan mangrove di wilayahnya ikut dibabat seperti yang dialami di Trimulyo, Genuk. Isu terkait proyek strategis nasional yang merambah kawasan pesisir Semarang memang membuatnya was-was sebab kabar tersebut sepertinya kian nyata selepas adanya proyek tol Semarang-Demak. “Kabar itu sudah lama terdengar, tapi kalau bisa kawasan ini tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau,” katanya kepada Tribun, Sabtu (22/7/2023).

Mangrove yang ditanam Sururi beserta nelayan di kampung Mangunharjo telah menjadi sabuk pantai yang cukup kuat menahan abrasi di kawasan pesisir barat kota lumpia. Menurutnya, telah menanam mangrove sejak tahun 1995. Hasilnya lahan seluas sekitar 70 Hektare mangrove telah menyelimuti pesisir di tiga kelurahan meliputi Mangunharjo, Mangkang Kulon, Mangkang Wetan dan kini mulai merambah ke Randu Garut. Dibandingkan dengan wilayah pesisir lainnya di kota Semarang, wilayah kecamatan Tugu memiliki hutan mangrove yang masih lebat.

Pesisir di kecamatan Semarang Utara dan Genuk sudah dalam kondisi memprihatinkan lantaran tingkat abrasi yang tinggi akibat proyek kawasan industri. Akan tetapi, ia khawatir apakah aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah meng-cover kawasan Tugu untuk tetap dipertahankan sebagai kawasan konservasi mangrove. “Entah diubah atau tidak kurang tahu. Meski begitu, selagi kita hidup akan terus menanam mangrove di sini,” bebernya.

Di sisi lain, ia menyebut, kebijakan untuk proyek strategis nasional biasanya tetap menabrak apapun sehingga ketika mendengar adanya proyek tersebut tak bisa berbuat banyak. “Kebijakan bisa berubah-ubah, apapun bisa ditabrak. Namun, kalau kebijakan pasti duduk bersama cari solusi yang terbaik,” ungkapnya.

Ia hanya meminta pemerintah tetap menyisakan 30 sampai 40 persen hutan mangrove di pesisir misal kawasannya akan dipaksa menjadi kawasan industri maupun proyek lainnya. Semisal mau dibangun jalan tol serupa di Semarang-Demak hendaknya jangan membuat jalan tol sekaligus tanggul sebab akan mematikan ekosistem di pesisir.

Sebaiknya, ketika memaksakan jalan tol dibuat hendaknya tetap memberikan ruang air laut menyentuh pesisir. “Pemerintah sepertinya bingung menangani rob sehingga melakukan bendung laut lewat jalan tol. Cara alami memang lama tak bisa instan,” jelasnya.

Tak ada mangrove akan semakin membuat nelayan nelangsa akibat melaut semakin susah. Ditambah, usia nelayan saat ini sudah berusia tua sehingga kesusahan ketika hendak alih profesi. Kemudian generasi berikutnya juga enggan menjadi nelayan dengan kondisi tersebut.

Mereka tentu lebih memilih bekerja di bidang pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. “Ingat, nelayan Semarang saat ini masih banyak. Tidak puluhan tapi ribuan,” beber Sururi.

Lahan Mangrove Menyusut

Merujuk data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terdapat 637 ribu hektare ekosistem mangrove yang kondisinya kritis. Luas total mangrove di Indonesia mencapai 3,3 juta hektare, artinya 19 persen mangrove dalam kondisi kritis. Pemerintah berupaya melakukan pemulihan dilakukan dengan rehabilitasi. Targetnya, pada tahun 2024 sudah bisa merehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare.

Sementara data di Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2016, luasan mangrove di Kota Semarang 268,56 hektare yang terbagi di empat Kecamatan meliputi Tugu seluas 187,98 Ha, Semarang Barat 23,67 Ha, Semarang Utara 3,54 Ha, dan Genuk 53,37 Ha. Dari seluruh wilayah pesisir Kota Semarang, kawasan mangrove yang masih ada seluas 268,56 Ha.

Jumlah tersebut kian menyusut, data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang pada tahun 2021 luas total kawasan mangrove di kota Semarang seluas 169,91 hektare. Rincian, di Kecamatan Genuk seluas 43,36 Ha, Semarang Utara 21,86 Ha, Semarang Barat 1,95 Ha dan Tugu seluas 102,74 Ha.

Terdapat selisih luasan mangrove bila merujuk data tersebut dibandingkan dengan hasil survei lapangan yang disusun oleh tim Kelompok Advokasi Pesisir dari Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang dan WALHI Jawa Tengah pada tahun 2023. Tim tersebut melaporkan hasil survei luasan mangrove di kota Semarang menyisakan 111,06 Ha meliputi Kecamatan Tugu 62,32 Ha, Semarang Barat 11,08 Ha, Semarang Utara 2,86 Ha, dan Genuk 34,80 Ha.

Konservasi mangrove di pesisir Semarang sebenarnya sudah masuk dalam Peraturan Gubernur Jateng (Pergub) Nomor 24 tahun 2019. Beberapa poin dalam Pergub menyebutkan, Pemprov Jateng menargetkan rehabilitasi ekosistem mangrove seluas 750 hektare dari tahun 2019 hingga 2023. Tercatat di Kota Semarang ada 62,9 hektare lahan mangrove yang hendak dilakukan konservasi.

Alih-alih melakukan konservasi, terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2022 terkait Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur), yang mengatur rencana tata ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Pakar mangrove dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Diponegoro, Rudhi Pribadi mengatakan, adanya Perpres tersebut semakin mengancam eksistensi hutan mangrove di kawasan pesisir Pantura Jawa Tengah. Ia sudah mulai khawatir terhadap eksistensi hutan mangrove di pesisir Semarang dan sekitarnya ketika proyek Semarang-Demak sudah mulai dikerjakan.

Kekhawatirannya bertambah ketika proyek tol Semarang-Demak nantinya akan merambah ke sisi barat dengan adanya proyek Jalan Tol Semarang Harbour atau jalan tol berintegrasi dengan polder, tanggul Laut, dan pengembangan kawasan. Proyek itu dilakukan di Kaliwungu, Kabupaten Kendal yang akan menghubungkan proyek tol Semarang-Batang.

“Sebetulnya di sisi barat dampaknya akan lebih signifikan karena mangrove di Semarang bagian barat lebih luas begitupun jumlah populasi masyarakat yang tergantung terhadap ekosistem mangrove juga lebih banyak dibandingkan dengan Trimulyo Genuk atau Semarang sisi timur,” cetusnya.

Dosen Undip tersebut mengkhawatirkan, jalan tol yang didesain sekaligus untuk bendungan akan merusak kawasan mangrove di sisi barat Kota Semarang seperti di Tapak dan Mangunharjo. Secara umum pembuatan bangunan ke arah laut itu akan berdampak ke sisi kiri dan kanannya.

Dasar ilmu tersebut sudah dipaparkan di buku Teknik Pantai karya Bambang Triatmodjo dari UGM bahwa disebutkan membangun satu bangunan sejauh satu kilometer ke arah laut berdampak sejauh tujuh kilometer ke kiri dan kanan bangunan tersebut baik dari sedimentasi, abrasi

dan lainnya. “Tinggal arah arusnya dari mana. Ini pun sempat mencuat bangunan tol bakal mengubah pola arus,” terangnya.

Kekawatirannya bertambah ketika melihat masih tidak ada sinkronisasi antar stakeholder pemerintah dalam menyikapi hal itu. “Misal di Dinas Perikanan kota Semarang , DPRD kota Semarang , mereka tidak menganggap itu menjadi permasalahan besar ke depannya,” tuturnya.

Pemerintah dalam penanganan konservasi di pesisir seharusnya bertindak satu kesatuan. Perlu ada Integrated Coastal Manajemen (ICM) yakni pengelolaan pesisir yang terintegrasi. “Itu banyak belum diaplikasikan dengan baik di sini. Jadinya seperti jalan sendiri-sendiri Kelihatan yang mau bangun, bangun, konservasi ya konservasi,” keluh Rudhi.

Diakuinya , pengaturan itu sebenarnya sudah tertulis di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sedangkan pengaturan wilayah di laut terdapat rencana zonasi. Pelaksanaan aturan bilamana dilakukan secara konsisten dan sesuai komitmen maka ketidaksinkronan tersebut bisa dihindari. Maka tak ada kegiatan yang kontraproduktif dengan upaya konservasi. Hanya saja, praktiknya lemah di lapangan. “Kenapa kawasan wilayah ditetapkan sebagai konservasi sedangkan aturan lain sebagai kawasan pemanfaatan itu kan membutuhkan kesepakatan. Sementara kesepakatan itu berdasarkan pendapat stakeholder. Nah, di situ belum diintegrasikan dengan baik,” tegasnya.

Sementara, Pakar Lingkungan dan Tata Kota Semarang, Mila Karmila, mempertanyakan aturan yang dibuat oleh pemerintah baik pusat dan daerah yang tidak sinkron terutama untuk menjalankan proyek di pesisir Jawa Tengah. Contohnya, antara Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 tahun 2019 dengan Adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2022 terkait Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur)

Dalam Pergub pemerintah Jateng “macak” bakal melakukan konservasi mangrove yang alami kerusakan. Di sisi lain, Pemerintah pusat malah memproyeksikan kawasan tersebut untuk beragam proyek strategis nasional yang otomatis bakal mengancam ekosistem pesisir. “Gubernur keluarkan Pergub tentang konservasi luasan mangrove. Namun, munculnya Perpres akhirnya Pergub kalah mengikuti PSN Kedungsepur,” ucapnya.

Pemerintah pusat, lanjut Mila, memiliki angan-angan yang begitu besar tanpa melihat daya dukung dan daya tampung kawasan pesisir. Sepatutnya ketika hendak membuat kawasan industri di pesisir hendaknya melihat daya dukung apakah mencukupi atau sebaliknya di antaranya terkait kebutuhan pasokan air.

Padahal penurunan muka tanah di kota Semarang dan Demak begitu mengerikan. Di Sayung saja tercatat penurunan muka tanah dari angka 0,56 sentimeter sampai dengan 11,5 sentimeter pertahun. Kota Semarang tak kalah parah di angka 8-11 sentimeter pertahun. Tak hanya itu, tanah daratan Semarang sudah di bawah muka air laut sekitar 4 sentimeter. “Ini ditambah lagi kawasan industri dan tol, Beban pesisir tambah banyak. Misal ditambah lagi mau jadi apa itu Semarang?” ungkapnya.

Dosen dari Kampus Universitas Sultan Agung Semarang (Unissula) ini mengungkapkan, seharusnya pemerintah memilih alternatif yang lebih manusiawi dalam menjalankan berbagai kepentingan proyek bertajuk PSN.

Semisal ingin membuat kawasan industri di Jawa Tengah hendaknya memilih daerah di Grobogan bukannya di pesisir. Misal dipusatkan di tempat tersebut tidak banyak orang dirugikan. Selain itu, menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan tak hanya di Semarang. “Tetapi kembali ke Pemimpin Daerahnya bisa tidak dia menyampaikan PSN jangan merusak pesisir?” tegasnya.

Di samping itu, ia mengkritisi pula tindakan pemerintah yang hendak melakukan relokasi mangrove di pesisir Semarang. Ia menilai pemerintah tak menjalankan fungsi-fungsi perawatan mangrove tetapi melakukan sebaliknya yakni membabat hutan mangrove. Seharusnya pemerintah ketika ingin merelokasi mangrove sudah dilakukan jauh-jauh hari sehingga ketika mangrove dihancurkan demi proyek maka penggantinya sudah ada. “Proyek PSN di pesisir Semarang disebut-sebut sudah lama sekitar 5 tahun lalu. Harusnya jauh-jauh hari sudah adaantisipasi bila peduli terhadap lingkungan. Bukan seperti sekarang, mau bangun baru mau tanam mangrove,” bebernya.

Ia pun mengkhawatirkan dampak proyek yang ugal-ugalan dilakukan pemerintah terutama ke masyarakat pesisir. Ia tahu persis kondisi masyarakat pesisir di kota Semarang dan Demak dalam kondisi tak baik-baik saja. “Nelayan dikorbankan ketika proyek di pesisir dibangun. Sayangnya, mereka dipaksa beradaptasi tanpa adanya bantuan,” ujarnya.

Rencana pengembangan wilayah Kecamatan Tugu sebagai kawasan investasi baru sudah diungkapkan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita. Menurutnya, wilayah pesisir barat Kota Semarang tersebut akan dibangun sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan.

“Kawasan Tugu ini akan dijadikan pusat perindustrian, pariwisata, perumahan, penyangga ketahanan pangan, ruang terbuka hijau, titik perbatasan dengan kawasan industri Kendal dan Batang,” katanya melalui website resmi pemerintah kota Semarang di akses Rabu (2/8/2023) malam.

Ia melanjutkan, pengembangan ini sangat strategis sehingga harus ada tata ruang baru atau revisi sehingga diharapkan akan bisa disahkan Perda RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang di kawasan Kecamatan Tugu. Dalam pengembangannya, akan tetap memperhatikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. “Pengembangan wilayah Tugu ini pun sejalan dengan Perda 5/2021 tentang RTRW Kota Semarang,” katanya.

Pihaknya menyebut, akan tetap mempertahankan kawasan hijau dan ruang terbuka hijau di kecamatan Tugu. “Kawasan lindung seluas 767,74 hektar atau 22,38 persen dari total wilayah Tugu akan tetap dipertahankan sebagai kawasan lindung sekaligus ruang terbuka hijau,” klaimnya.

Pesimis Terhadap RPP Mangrove

Di sisi lain, Pemerintah kini tengah menggodok draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pakar mangrove Rignolda Djamaludin mengatakan, sudah pesimis dengan draf RPP tersebut. Penyebabnya, draf akhir yang menjelaskan sanksi perusakan mangrove hanya berupa Sanski administrasi. “RPP itu memiliki ujung lemah, jelas fatal sekali karena kondisi mangrove sudah dalam kondisi kritis malah sanksinya administrasi,” katanya.

Ia menilai, pemerintah dalam menangani mangrove dari awal sudah salah urus. Buktinya, dalam kurun waktu tiga dekade terakhir, ada lebih dari 50 persen wilayah hutan mangrove yang hilang. Mirisnya, upaya mengentikan degradasi mangrove tidak berjalan beriringan. Fakta yang

ada degradasi mangrove sejak tahun 2014 kecepatan degradasi di angka 0,05 juta hektare pertahun. Sayangnya, hutan mangrove yang alami saja banyak dibongkar.

“Sampai hari ini kerusakan mangrove paling besar terjadi akibat konversi lahan baik untuk kontruksi maupun lahan perkebunan,” jelasnya.

Dalam RPP tersebut ada komponen yang membuka celah mangrove bisa dikonversi apalagi kondisi mangrove dianggap bukan komponen penting ketika berhadapan dengan konversi lahan. Ditambah iming-iming investasi sehingga mangrove rentan akan digusur. “Seharusnya mangrove jangan hanya dijadikan sebagai ikon orang peduli lingkungan sama buat foto-foto,” terangnya.

Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Muhamad Karim, Draif RPP perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove merupakan turunan dari Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa masalah pengelolaan ekosistem mangrove yang harus dijawab dalam RPP tersebut di antaranya aturan konversi lahan di wilayah pesisir untuk tambak dan infrastruktur termasuk reklamasi.

Masalah berikutnya yang eksploitasi berlebihan semisal pembatasan mangrove untuk diambil kayunya. Tata ruang wilayah yang belum mengakomodir perlindungan mangrove “Tumpang tindih peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan penegakkan hukum yang lemah dan seterusnya,” jelasnya.

Dalam RPP terdapat pula paradoks kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di antaranya PP nomor 27 tahun 2021 yang mengubah zona inti kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan untuk proyek strategis nasional atau turunan dari UU cipta kerja. “Semisal program shirmp estate (kawasan budidaya udang berskala besar) di beberapa daerah yang tidak menyediakan green belt di wilayah pesisirnya minimal 200 meter dari daratan ke arah garis pantai, contohnya yang sekarang dilakukan pemerintah yaitu di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah,” ungkapny.

Berikutnya, model tata kelola mangrove dalam RPP juga harus diper tegas. Sebab, selama ini posisi pengelola mangrove sangat lemah. “Sebaiknya dalam RPP harus dijelaskan siapa pihak yang berhak melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove,” tuturnya.

Poin penting lainnya, kata dia, RPP dalam memberikan sanksi masih berupa administrasi padahal kerusakan dan degradasi ekosistem mangrove berdampak luas dan kompleks baik secara ekologi, ekonomi sosial dan keberlanjutan sumber daya perikanan yang menggantungkan hidup pada ekosistem. Bahkan, hilangnya daratan selepas Magrove dibabat.

Misalnya Pesisir Pantai Utara Jawa alami abrasi parah paska kebijakan revolusi biru orde baru di tahun 1980an melalui pembukaan tambak udang secara besar-besaran sehingga dampaknya sampai kini belum teratasi. “Semestinya ada sanksi pidananya, Karena jika dilakukan valuasi ekonomi dengan asumsi tanpa adanya proses deforestasi maka nilainya lebih besar dalam menjamin keberlanjutan ekologi dan sosial,” terangnya.

Manajer Kajian Hukum Eksekutif Nasional (Eknas) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Satrio Manggala Nurwahid mengungkapkan, RPP tersebut dinilai tak begitu kuat dalam melindungi konsistensi kawasan mangrove. Menurutnya, untuk melindungi kawasan mangrove yang harus dibatasi adalah undang-undang ekstraktifnya.

Di satu sisi kebiasaan dialektika hukum tata negara Indonesia masih tumpang tindih aturan sehingga undang-undang yang melindungi kawasan mangrove akan dimakan oleh predator undang-undang yang lain. “Jadi sama saja. Kalau mau melindungi beri batasan terhadap undang-undang yang ekstraksi atau aturan yang memiliki izin kewenangan yang menggeser kawasan esensial,” bebarnya.

Kondisi itu bukan hanya soal kawasan mangrove melainkan pula di ekosistem lain yang memiliki tantangan yang sama. Tak heran, konflik agraria acapkali terjadi di negara ini. Ia mencontohkan, dari dulu sampai sekarang konflik agraria terus berlangsung padahal sudah ada berbagai macam kebijakan yang mengatasi konflik agraria. Hal itu dipicu lantaran persoalan penyelesaian konflik berjalan lambat di sisi lain izin konsensi pelepasan kawasan terus menerus dikeluarkan. “Nah itu yang menciptakan konflik baru muncul sedangkan konflik lama belum selesai,” tandasnya. v





Tol Tanggul Laut Semarang Demak Ancam Timbulkan Abrasi Tinggi

Oleh; Ulil Albab Alshidq

Pembangunan tol tanggul laut diakui menimbulkan dampak abrasi dan banjir rob ke wilayah lain di luar tanggul. Maka dari itu, warga sekitar berharap dibangun sabuk pantai. Kondisi Dukuh Bedono, Desa Bedono, tak lagi sama. Rusipan masih ingat sekitar tahun 1995, saat usianya 37 tahun, masih memiliki sawah dan tambak, yang hanya berjarak beberapa meter dari depan rumahnya. “Dulu gemah ripah loh jinawi,” katanya. Sawahnya seluas 2 hektare. Saat panen, ia bisa mendapatkan hasil rata-rata 7-8 kuintal, terkadang mencapai 1 ton. Hasil tambak bisa mendapatkan 4-5 kuintal bandeng.

Ia sepenuhnya menggantungkan hidupnya dari hasil panen, yang dirasa lebih dari cukup untuk kebutuhan keluarganya. Saat itu abrasi dan banjir rob belum jadi masalah. Meski begitu, penanaman mangrove sudah dimulai para petambak. Memasuki tahun 2005, gelombang air laut perlahan meninggi dibandingkan biasanya. “Karena reklamasi Tanjung Mas Semarang sampai ke tengah, maka gelombang sampai ke sini,” katanya. Perlahan gelombang laut yang kian meninggi melahap habis sawah dan tambak pada 2006. Hilangnya sumber mata pencaharian, praktis membuat Rusipan dan sebagian warga sekitar beralih profesi jadi nelayan.

Selain sawah dan tambak, abrasi secara perlahan menghancurkan

jalan desa. Spanjang 1,5 km jalan di sisi barat Dukuh Bedono hilang. Pada akhirnya, abrasi membuat warga kompak memandangnya sebagai persoalan serius. Sebagai respons, warga menggalakkan penanaman pohon mangrove.

Hasilnya, lewat citra satelit Google Earth, sisi utara Dukuh Bedono terlihat pohon mangrove dalam jumlah yang banyak sejak 2012, dan hanya ada beberapa mangrove di sisi selatan. Walaupun begitu, mangrove tetap tak cukup kuat menahan abrasi. Pasalnya, arus gelombang memasuki desanya masih tinggi setiap tahun. Bahkan, pada akhir tahun 2020, sekitar 40 rumah hancur tersapu gelombang. Imbasnya, pemerintah memberikan bantuan bedah rumah dan peninggian jalan. Saat ini usia Rusipan 65 tahun dan ia tahu peninggian jalan hanya bisa mengatasi masalah abrasi dan banjir rob dalam waktu singkat.

Rusipan menduga, jika pengerjaan Tol Tanggul Laut Semarang Demak usai, arus gelombang ke wilayahnya akan semakin tinggi. Ini seolah mengingatkannya kembali pada kejadian tahun 2006. “Ini akan berdampak semua gelombang akan cepat ke pinggir laut. Nanti pinggir laut akan (masuk) ke pinggir jalan ini,” katanya

Rusipan berkata mayoritas warga telah lam mengusulkan kepada pemerintah agar ada pembangunan sabuk pantai. Tujuannya untuk menahan gelombang tinggi yang masuk ke wilayahnya. Selain itu, warga meminta pendirian talud untuk pemukiman Dukuh Bedono di sisi selatan. Sebagian besar rumah di sisi ini sudah tak lagi berada di atas tanah melainkan rumah panggung yang mengandalkan fondasi kayu dan bambu.

“Mangrove itu enggak akan mampu sendirian lawan musuh gelombang laut dan angin laut juga kencang,” katanya Tepat di sisi timur Dukuh Bedono, yakni di Dukuh Badong, Desa Sidogemah, masalah banjir abrasi dan rob juga jadi persoalan serius. Tinggi air rob di dukuh ini antara 40-70 cm. Kalau jam 12 malam (saat rob tinggi), enggak bisa dilewati motor,” kata Abdullah Uyer, warga Dukuh Badong. Kondisi Dukuh Badong pernah memiliki lahan sawah dan tambak, sama seperti Dukuh Bedono. Namun, lahan-lahan ekonomi warga itu pun hilang ditelan air laut setelah memasuki tahun 2020, abrasi bahkan sempat menghancurkan jembatan penghubung Dukuh Badong ke Dukuh Mondoliko, Desa Bedono. Di samping itu, abrasi telah menghantam fondasi rumah di samping musala warga.

Akibatnya, di sisi selatan Dukuh Badong, air laut langsung masuk tanpa penghalang ke jalanan setiap hari. Air pasang rob terkadang merendam dua ruas jalan akses di Dukuh Badong menuju Dukuh Bedono. “Suara ombak karo angin walalah...” ujar Abdullah. “Kalau orang yang enggak kenal, wes wedi.”

Perasaan Abdullah juga makin khawatir bila pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang Demak usai. Ia menduga akan ada gelombang tinggi bergeser ke wilayahnya. Guna mengantisipasi, penduduk Dukuh Badong juga menginginkan pembangunan sabuk pantai, sama seperti warga Dukuh Bedono. “Sabuk pantai itu harus dikasih masyarakat. Kalau enggak, nanti air rob bisa sampai ke jalan,” katanya

Hanya 500 meter dari arah utara Dukuh Bedono dan Dukuh Badong, abrasi dan banjir rob paling parah terlihat jelas di Dukuh Timbulsloko, Desa Timbulsloko. Bahkan, jalan tak bisa lagi digunakan lantaran sepenuhnya terendam air. Untuk menggantikan jalan yang terendam, warga menggunakan papan kayu selebar 1 m dengan panjang sekitar 500 m. Papan kayu ini terhubung antara satu rumah dan rumah lainnya.

Dengan papan kayu itu pula, kita cukup mudah mengetahui mana rumah yang ditinggalkan dan mana yang tidak. Rumah yang tak terhubung papan kayu, artinya rumah itu tak berpenghuni. “Dulu jalan perkampungan ada dua,” kata Sulkhan. Sulkhan menceritakan abrasi mulai melanda dukuhnya pada 2016. Ini terlihat saat tanaman mangrove di timur Dukuh Bedono berangsur-angsur rusak. Rusaknya mangrove itu berdampak bagi warga. Jalan Dukuh Timbulsloko yang terhubung ke Dukuh Bogorame kemudian hancur tergenang abrasi.

Abrasi terus berlanjut. Pada 2017, saat air pasang, sesekali warga merasakan jalanan sebelah selatan itu terendam. Bagi Sulkhan, kondisi itu masih tak mengkhawatirkan. Rumahnya tepat di jalan sebelah utara. Saat tahun 2019, ia sempat membangun musala dengan bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Demak.

Namun, Sulkhan tak menduga jika tahun itu jadi tahun terakhirnya bisa mengakses jalan tanpa hambatan. Pada 2020, Sulkhan dan seluruh warga Dukuh Timbulsloko tak bisa lagi melewati dua ruas jalan Dukuh Timbulsloko karena terendam air laut. Setahun berikutnya, warga memutuskan membangun papan kayu sebagai ganti jalan raya yang terendam.

Beberapa rumah warga hanya menyisakan tinggi sekitar 1,5 m hingga 2 m. Untuk masuk ke pintu depan rumah, kita harus membungkukkan

badan. “Kampung ini sudah diviralkan jadi kampung gladak. Semua rumah digladak (fondasinya menggunakan kayu). Kalau diuruk enggak bisa, materialnya enggak bisa ke sini,” katanya. Dulunya, kampung ini memiliki 400 kepala keluarga. Sekarang tersisa sekitar 101 KK. Sebelum abrasi, kampung ini dihuni 150-an rumah. Sekarang sekitar 60 rumah. “Yang tinggal di sini kebanyakan tidak punya biaya karena harus punya uang dan tanah untuk bangun rumah di tempat lain,” katanya. Satu-satunya jalan yang masih dapat dinikmati warga adalah jalan yang menghubungkan Dukuh Timbulsloko dengan Dukuh Dempet. Jalan ini memiliki panjang 800 m. Tapi, jalan ini kadang timbul tenggelam terkena air rob.

Jika air pasang surut, jalan itu muncul. Di saat itu, warga bisa sejenak beraktivitas ke luar dari Dukuh Timbulsloko dengan menggunakan motor ataupun berjalan kaki. Namun, jika air pasang dan jalan itu tenggelam, satu-satunya moda transportasi warga adalah perahu. Perahu itu berada di belakang masjid Darul Ibad. Jika ingin menggunakan perahu, warga diharuskan membayar ongkos Rp5.000 untuk sekali jalan. Ongkos ini untuk biaya pengganti bensin bagi pemilik perahu.

Kondisi timbul tenggelamnya jalan itu membuat warga yang memiliki kendaraan bermotor kerepotan. Motor tak bisa terparkir di rumah masing-masing warga. Hanya ada dua pilihan: motor terparkir di tempat penitipan di tepi kampung, atau motor terparkir di Dukuh Dempet. Kedua opsi mengharuskan warga membayar biaya parkir Rp2.000 setiap hari. “Makanya warga sini enggak suka pergi terus-terusan setiap hari. Aku pergi sekali, pergi lagi nggak mau karena harus naik perahu, belum lagi ambil motor yang terparkir harus bayar” katanya Sulkhan juga khawatir atas pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang Demak. Alasannya, gelombang laut akan bergeser ke wilayahnya tanpa ada perlindungan termasuk mangrove.

Sulkhan tak tahu pasti kapan situasi abrasi dan banjir rob berakhir dari Dukuh Timbulsloko. Ia dan mayoritas warga berkeinginan agar pemerintah kembali menghidupkan jalan warga sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut. “Abrasi nambah tiap tahun ini. Saat musim hujan, gelombang di sini gede, ketok depan omah,” katanya

Dukuh Timbulsloko merupakan satu-satunya dukuh di Desa Timbulsloko yang langsung berdekatan laut tanpa ada pembatas, baik sabuk pantai maupun mangrove. Dukuh lain di desa ini seperti Dukuh Bogorame dan Dukuh Pandansari cukup terlindungi dengan keberadaan mangrove.

Tol Tanggil Laut Tak Bisa Selesaikan Sepenuhnya Masalah Abrasi dan Banjir Rob

Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung, Mila Karmilah, mengatakan pembuatan Tol Tanggul Laut Semarang Demak tak bisa menjadi solusi tunggal untuk menyelesaikan abrasi dan banjir rob di Semarang dan Demak.

Mila menjelaskan penyebab abrasi dan banjir rob dapat dilihat pada sejarah alih fungsi lahan di pesisir Demak. Perubahan ini dimulai sejak tahun 1970-an. Ini berawal dari Indonesia yang menjadi pemasok utama udang windu ke Amerika Serikat yang mulai mengkampanyekan kebutuhan makanan sehat. Dari situ, masyarakat berbondong-bondong beralih profesi dari petani menjadi petambak. Alhasil, lahan sawah dan mangrove berubah jadi lahan tambak. Meski demikian, saat itu rob belum mengkhawatirkan masyarakat.

Memasuki tahun 1980-an, barulah abrasi dan banjir rob mulai mengkhawatirkan. Ini dampak dari beberapa pembangunan di Kota Semarang di Pantai Marina, pembangunan Pusat Rekreasi & Promosi Pembangunan di Tawang Sari, dan pengembangan pelabuhan Tanjung Mas. Akibatnya, gelombang laut bergeser ke arah Demak.

“Yang awalnya banjir rob mungkin tidak setiap saat, namun karena pembangunan dua kawasan ini, sekarang robnya hampir setiap hari terjadi,” katanya. Imbasnya, sebagian besar penduduk dua dukuh di Desa Bedono, yakni Dukuh Rejosari Senik dan Dukuh Tambaksari, direlokasi. Namun, “Mereka yang pindah tahun 2010 sudah mulai mengalami kem-bali air rob lagi. Artinya, perpindahan itu tak menyelesaikan masalah.”

Abrasi dan banjir rob menjadi lebih parah lagi ketika tahun 2000-an. Pembangunan industri semakin masif di kawasan pesisir Sayung, Demak. Ini diperparah saat industri tersebut menggunakan air tanah dan berim-bas pada penurunan muka air tanah.

Mila mencatat, di Kecamatan Sayung, ada sekitar 30-40 pabrik menggunakan air tanah. Sementara itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, kawasan industri pun diperluas, yakni mencapai 5.313 ha. Ditambah beberapa lahan pesisir telah beralih menjadi pemukiman.

Cornelius Gea dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang menjelaskan pemerintah sebenarnya sadar akan imbas pembangunan tol tanggul laut berimbas ke wilayah lain. Dalam dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup proyek ini, ada dampak perubahan arus laut ke arah utara. “Dampak itu adalah perubahan arus laut ke arah Desa Bedono dan Timbulloko sehingga otomatis dengan proyek ini membuat banjir rob makin parah,” katanya.

Proyek tol tanggul laut juga tak sepenuhnya melindungi abrasi dan banjir rob, menurut Cornel. Masalah utama seperti alih fungsi lahan dan ekstraksi air tanah yang masif oleh pelaku industri sama sekali tak disentuh pemerintah. “Harusnya itu dilihat sebagai akar persoalan dari banjir rob,” katanya.

“Upaya adaptasi terhadap perubahan iklim di Dukuh Timbulloko itu perlu dicontoh dan diperkuat dengan rumah-rumah panggung dan lain sebagainya,” tambahnya. Benovita Dwi Saraswati, Sub Koordinator Pengelolaan Ruang Laut Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng, mengakui pembangunan tol tanggul laut akan menimbulkan dampak ke wilayah lain yang berada di luar tanggul. “Revegetasi mangrove akan dilakukan penanganan minimal untuk menangani dampak-dampak yang ditimbulkan dari tol tanggul laut,” katanya.

Benovita berkata pembangunan proyek tol tanggul laut bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan masyarakat yang terimbas abrasi dan banjir rob parah di pesisir Semarang-Demak. Data dari Pemprov Jateng, abrasi di Kabupaten Demak mencapai 2.119 ha dan abrasi di Kota Semarang 2.020 ha. Selain itu, pembuatan proyek ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar. Salah satunya ada industri yang kembali bergeliat di wilayah pesisir Semarang-Demak sehingga dapat menciptakan efek ganda ke masyarakat. Terkait ada usulan warga untuk pembangunan sabuk pantai, ia berkata perlu mengkaji lebih mendalam. “Kalau di pesisir itu tidak hanya per wilayah penanganannya, perlu terintegrasi, jadi dampak itu bisa diminimalisir,” katanya

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Nanang Tasunar, berkata usulan pembuatan sabuk pantai sudah masuk dalam pertimbangan Pemerintah Kabupaten Demak. Pengerjaannya untuk sementara pada 2024 akan mulai dengan rancang bangun rinci terlebih dulu.

“Tahap awal nanti dari Sayung sampai ke Desa Tambakbulusan, nanti ke Morodemak dan tembus ke Jepara,” katanya.

Ia berkata pembangunan sabuk pantai bersifat urgen untuk menangani pesisir Demak dari abrasi dan banjir rob. Masalah ini juga sempat ditinjau oleh Kepala Bappenas dan salah satu wilayah yang dikunjungi adalah Desa Timbusloko. Hasil dari tinjauan itu, Bappenas sepakat Pemerintah Pusat akan membiayai anggaran pembangunan sabuk pantai. “Nanti kalau sabuk pantai sudah jalan, insyaallah wilayahnya aman,” katanya.





Tol Tanggul Laut Semarang Demak, Minim Sosialisasi dan Ganti Rugi Belum Tuntas

Oleh; Ulil Albab Alshidq

Pagi itu Agus Isnaini cekatan. Tangan kanannya mengarahkan mesin perahunya sesegera mungkin ke dermaga. Setelah dermaga tampak dekat dalam jangkauan tangan, ia mengeluarkan tali tambat perahunya dan ia ikat ke sebatang kayu di dermaga.

Dengan begitu, perahu Agus berkelir hijau berhasil menepi sepenuhnya ke dermaga kecil yang lokasinya berkisar beberapa meter dari pompa Kali Sringin, Semarang. Sesampainya di dermaga, Agus langsung mengangkat jaring berisi hasil tangkap dan menaruhnya ke dalam sebuah tong besar. Keringat mengucur dari wajah Agus. Ia pun memutuskan rehat sejenak dengan memesan kopi hangat di sebuah warung di ujung dermaga. Tangan kanannya mengambil tahu bacem. Makanan pertama yang masuk ke dalam perutnya.

Setelah perutnya terisi, Agus menyulut rokok dari tas selempang. Di waktu luang itu, Agus masih menunggu seorang kawan yang biasa menjual hasil tangkapnya.

“Hari ini saya ngejar udang hidup. Ini nanti mau ditimbang, biasanya 3 kg dapat sehari Rp180 ribu lah tergantung nanti besar kecilnya,” kata Agus, Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Rizky Bahari.

Agus sadar setahun belakangan jumlah hasil tangkapnya tak sebesar dulu. Dua tahun lalu, setiap kali Agus melaut sangatlah mudah mendapat hasil tangkap dengan pendapatan kotor Rp300 ribu dalam sehari.

Kini hasil tangkapannya sudah jauh berbeda. Begitupun 60 nelayan lain. Agus meyakini musababnya adalah pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang Demak. Sejak awal 2022, pembangunan proyek ini mulai memasuki masa pembangunan trial embankment atau pemadatan tanah dengan menggunakan matras bambu. Lokasinya sekitar 1 km dari dermaga, atau hanya 15 menit menggunakan perahu. Masalah muncul ketika lokasi trial embankment adalah tempat lokasi ikan yang melimpah. Di situlah biasanya sehari-hari nelayan menebar jaring. “Sekarang lokasinya susah. Kita enggak bisa lagi ke lahan yang hilang itu,” katanya

Beberapa kali para nelayan dimarahi dan dibentak-bentak oleh petugas proyek tol tanggul laut hanya karena mendekati area tersebut, cerita Agus. “Mendekat enggak boleh, mencari ikan di situ enggak boleh, lalu-lalang di situ enggak boleh, jarak 50 meter lewat enggak boleh,” katanya

Mendengar keluhan teman nelayan itu, Agus langsung bergerak. Pada Januari 2022, Agus memberanikan diri datang ke proyek trial embarkment. Untuk berjaga-jaga, ia mengajak Airud, Koramil, dan Babinsa. Petugas proyek memberitahukan Agus bahwa larangan nelayan mendekati trial embarkment untuk keselamatan karena area itu masuk kategori berbahaya. Persoalan hasil tangkap berkurang, petugas tak menanggapi. Di samping itu, Agus baru tahu desain tol tanggul laut tahap satu ini memanjang dari wilayah Terboyo di Semarang hingga ke wilayah Sayung di Demak.

Dari gambaran desain itu, ia mendapati akses nelayan di dermaga Kali Sringin ke laut akan ditutup permanen. Petugas proyek itu berkata masih ada jalan melaut, yakni sebuah pintu akan terbuka di dua wilayah. “Di Semarang, alur laut terbuka dekat Pintu Polder Kali Babon. Di Demak, alur laut akan dibuka di Pantai Morosari,” kata si petugas proyek.

Agus mulai cemas sesudahnya. Ia berpikir, jika pembangunan trial embarkment usai, praktis aktivitas nelayan terhenti. Sementara pembangunan dermaga Kali Babon pun belum pasti kapan dikerjakan. Pada Maret 2022, Agus mengirimkan surat pengaduan ke DPRD Semarang, tapi belum direspons sampai sekarang.

Agus menilai masalah yang diterimanya merupakan imbas minimnya sosialisasi proyek tol tanggung laut yang terang-benderang. Ia mengaku sosialisasi atas dampak pembangunan proyek itu tak pernah sekalipun disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. “Memang dari dulu perhatian pemerintah masih kurang ke kita (nelayan daerah Semarang),” katanya.

Di samping itu, menempatkan perahu di dermaga Kali Babon bukan sekadar memindahkan perahu. Kali Babon memiliki arus deras jika suatu saat polder dibuka. Oleh karena itu, nelayan perlu mengganti bahan material perahu agar kuat menahan deras air. “Kalau memang harus menunggu sampai tol selesai, kita mau dikompensasi berapa? Itu yang kita inginkan. Kita enggak mungkin alih profesi karena pekerjaan nelayan ini seumur hidup. Kita enggak nuntut mau dikasih berapa asalkan bisa untuk makan,” katanya.

Tak hanya di Kota Semarang, minimnya sosialisasi pembangunan tol tanggul laut juga dirasakan para nelayan di Demak. Matriman, Ketua Kelompok Nelayan Mina Bahari di Dukuh Morosari, Desa Bedono, mengatakan dari ratusan nelayan di tiga dukuh, belum sekalipun ada yang pernah menerima sosialisasi atas adanya dampak proyek tersebut.

Matriman berkata belum tahu bagaimana gambaran desain proyek yang masuk sebagai Proyek Strategis Nasional atau PSN itu. Ia hanya mendapatkan kabar angin bahwa akses ke laut tetap akan ada di wilayahnya. Ia berharap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jateng memberikan sosialisasi sesegera mungkin.

“Kalau tanggul tol tertutup, wilayah penangkapan berkurang, seng dirugike aksese nelayan,” katanya

Ganti Rugi Lahan Belum Usai, Warga Tolak Skema Tanah Musnah

Proyek tol tanggul laut juga masih menyisakan persoalan lain berupa ganti rugi yang belum selesai. Hal inilah yang membuat ratusan warga dari tiga desa di Demak, yakni Bedono, Purwosari, dan Sriwulan, mengadakan aksi protes di depan Kantor Gubernur Jateng pada 31 Juli 2023.

Jatiari, salah satu petambak, berkata saat sosialisasi pada 18 Juli, para petambak diberitahu bahwa ganti rugi hanya mencapai 30% dari harga pasar. Padahal lahan tambak yang terkena proyek ini merupakan lahan produktif. “Hak-hak manusia, hak rakyat yang mempunyai lahan harus diuntungkan,” katanya. Ia menduga munculnya skema ganti rugi 30% dari harga pasar merupakan imbas dari Permen ATRBPN No. 17 tahun 2021 terkait penetapan tanah musnah. Padahal, saat Presiden Jokowi meresmikan proyek tol tanggul laut tahap dua, para petambak telah dijanjikan ganti rugi lahan tidak akan memakai skema tanah musnah dan menjanjikan semua harus dapat “ganti untung”.

Sejak 2018, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak telah menyuruh para petambak memasang patok di tiap lahan karena akan diganti rugi. Jatiari telah mengukur tambak miliknya memiliki luas 11 ha. Tambak itu dimilikinya sejak 1989 dengan bukti dokumen SHM dan Letter C. Tambak miliknya juga selalu produktif. Setiap hari secara keseluruhan bisa menghasilkan Rp7 juta. “Punya saya untuk rumpon kerang, pemancingan, dan untuk mencari ikan lainnya,” katanya.

Ia kesal waktunya terus terbuang hanya untuk menunggu ganti rugi yang tak kunjung selesai. Ia membandingkan ganti rugi di Kota Semarang yang sudah mulai dihitung harga appraisal, meski ia tahu uang itu belum ada yang cair. “Di Semarang nilainya per meter ada Rp1,5-Rp1,8 juta. Bahkan yang sudah diuruk Rp2,5-Rp3 juta,” katanya

Dengan acuan harga appraisal di Kota Semarang, ia berkata ganti rugi harga tanah miliknya per meter seharusnya bisa Rp1,2 juta-Rp1,5 juta. Kalau pun disuruh menguruk tanah, ia siap tapi harga tukar gulingnya harus dua kali lipat dari harga tanah yang tidak diuruk.

Kepala Desa Bedono, Agus Salim, berkata sekitar 113 warga desa tak hanya meminta ganti rugi atas tambak yang hilang akibat proyek tol tanggul laut, melainkan juga pemukiman yang telah hilang akibat abrasi dan banjir rob. Total luas yang terdampak mencapai 80 ha.

“Warga menyampaikan kepada kami menolak skema penggantian tanah dengan Perpres tanah musnah (Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023), warga minta ganti untung yang selayaknya,” katanya

Ia menjelaskan pemukiman yang hilang itu akibat pembangunan di Kota Semarang seperti pembangunan Kawasan Industri Terboyo, Pantai Marina, hingga pembangunan bandara. Di samping itu, warga Desa Bedono meminta semua tanah yang tak dapat diakses gara-gara proyek tol tanggul laut turut mendapatkan ganti rugi. “Kami meminta ganti untung yang sepatutnya sehingga masyarakat dapat berkehidupan yang layak untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka ke depan,” katanya.

Arianto Abas, koordinator aksi warga tiga desa di Demak, berkata ratusan warga yang terdampak sepakat menolak ganti rugi dengan skema tanah musnah. Menurutnya, ganti rugi dengan skema 30% dari harga pasar merupakan penggantian yang tidak adil dan tidak layak.

Sesuai UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, telah mengamanatkan penggantian ganti rugi harus dilakukan dengan perhitungan yang adil dan layak. Tujuannya agar rakyat dapat mencari mata pencaharian atau rumah tinggal yang lebih baik. Pembangunan untuk kepentingan umum tentu memerlukan tanah yang pengadaannya haruslah dilaksanakan dengan mengedepankan hak-hak dasar sesuai UUD 1945, ujarnya.

“Segera lakukan pembayaran uang ganti rugi bagi masyarakat Semarang-Demak (Tahap 1) yang telah ditetapkan dalam musyawarah. Penggantian harus seluruh bidang,” tambahnya.

Benovita Dwi Saraswati, Sub Koordinator Pengelolaan Ruang Laut Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng, memastikan pembangunan proyek tol tanggul laut tetap akan memberikan akses nelayan ke laut. Setidaknya ada tiga tempat yang memiliki akses ke laut. “Dari pihak kontraktor akan menyediakan akses di tiga lokasi. Dua lokasi di banjir kanal timur ke Kali Babon dan ke arah Sungai Morosari di Sayung,” katanya.

Ia mengaku sosialisasi kepada nelayan sudah pernah dilakukan sejak 2018, bahkan sebelum pembangunan tol tanggul laut tahap dua. Adapun kewajiban sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang maupun Kabupaten Demak. Meski begitu, ia mengaku mungkin saja tak semua warga menerima sosialisasi tersebut.

Adapun terkait ganti rugi, pemerintah menjamin tidak akan menggunakan skema tanah musnah. Hal ini juga sejalan dengan arahan dari Presiden Jokowi.

Ia menjelaskan saat ini Kementerian Pertanahan Kota Semarang dan Kabupaten Demak sedang mendata ulang. “Ini perlu pendataan ulang karena posisi tanah ada yang tidak kelihatan, sudah terendam. Ini perlu klarifikasi lagi karena batas-batas tidak terlihat. Jadi yang mendapatkan ganti rugi merupakan orang yang berhak mendapatkan ganti rugi,” katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkata pembebasan lahan tak lagi menggunakan skema tanah musnah, melainkan menggunakan Perpres No. 27 tahun 2023. “Sekarang, sedang diinventarisir di-apparaisal, berapa ganti untungnnya. Jadi tidak lagi dianggap sebagai tanah musnah,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi Infrastruktur DPR pada 7 Juni 2023.

Basuki berkata pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp1,1 triliun untuk ganti rugi pembebasan lahan. Apabila urusan pembebasan lahan tanah musnah selesai, janjinya, konstruksi tol tanggul laut tahap satu akan bisa dikebut dalam waktu dekat.*





Usulan Penambahan Pasir Laut untuk Tol Semarang-Demak, Ancam Abrasi di Tiga Desa

Oleh; Ulil Albab Alshidq

Abrasi dan banjir rob menyulitkan aktivitas warga sehari-hari di Desa Morodemak. Untuk dapat mengakses ke sana, ruas jalan di Pasar Gebang tenggelam. Tinggi air rob mencapai 40-an cm dan sepanjang 500-an meter.

Tak heran terlihat beberapa mobil terparkir menepi di pinggir jalan, meski sesekali beberapa mobil menerabas jalan tersebut. Sementara warga yang mengendarai sepeda motor harus memutar dengan melewati jembatan yang tinggi dan amat curam bernama Jembatan Cinta. Rob telah menghancurkan bangunan Taman Pendidikan Al-Qur'an. Juga beberapa bangunan vital seperti aula pertemuan, yang akhirnya ditinggikan 1 meter. Saat rob pernah setinggi 1 meter juga menenggelamkan tempat pelelangan ikan," cerita Abdul Manaf, nelayan Desa Morodemak.

Abdul berkata tinggi rob seringkali menghambat distribusi pengangkutan ikan dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Kalau banjir rob setinggi setengah pinggang dewasa, praktis aktivitas sekolah pun diliburkan. Imbas rob setiap tahun ditambah amblesnya tanah di desa ini juga membuat peninggian jalan dan rumah jadi hal lumrah.

Rumah Abdul telah ditinggikan sekitar 1 meter pada 2019. Menelan uang tabungannya Rp50 juta. Sayangnya, hanya bertahan empat tahun rumahnya kembali kemasukan air rob.

“Pembenahan rumah itu kalau ekonomi kita lancar,” katanya. “Meski begitu, saya tetap di sini karena sementara belum ada yang pindah dan terbiasa dengan rob.” Abdul berkata rob di Desa Morodemak bakal lebih parah jika tak ada pasir laut. Pasir laut berhasil mengurangi deras gelombang laut mengarah ke desa.

Namun, pada 2023, Abdul kaget saat mendengar ada wacana penambangan pasir laut. Ia pun membicarakan informasi dan rencana itu ke sesama nelayan, tak cuma melawan Desa Morodemak tapi juga nelayan Desa Purworejo dan Desa Margolinduk. Kesimpulannya, ribuan nelayan kompak menolak penambangan pasir laut.

“Kalau pasir itu diambil, dan kita enggak dikasih benteng semaksimal mungkin, bisa hancur desa ini. Pasir itu bisa jadi pemecah gelombang. Kalau diambil, bisa sangat susah nelayan,” katanya Aji Musaka, nelayan Desa Morodemak, menduga rencana penambangan pasir laut bermula pada September 2022. Waktu itu ia didatangi beberapa orang yang mengaku “peneliti” dari perguruan tinggi negeri di Semarang.

Para peneliti itu meminta diantarkan ke lokasi pasir laut di Desa Morodemak. Jarak pasir laut dari dermaga sekitar 300 meter, atau kurang dari 5 menit dengan kapal. “Mereka ngebor sampai kedalaman 5 meter di dermaga Muara Demak, daerah lain diambil sampel dari permukaan,” katanya.

Beberapa minggu berselang, Aji Musaka didatangi orang lain yang ingin ke lokasi pasir laut. Kali ini bukanlah peneliti, melainkan dari petugas Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Demak dan salah satu perusahaan konstruksi. Lokasi yang dituju lebih luas, mulai dari Pantai Morodemak sampai Pantai Wedung. “Waktu itu kami tanya, ‘Ini untuk apa?’ Katanya, untuk pembangunan tanggul Demak,” katanya

Pada Juni 2023, Aji mendapatkan kabar dari pernyataan Bupati Demak Esti'anah bahwa pasir laut di Desa Morodemak akan dikeruk untuk pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang Demak. Aji bersama sejumlah nelayan lantas mengadakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Demak pada 5 Juli. Hasilnya, Pemkab Demak dan Komisi Maritim DPR dan Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan meninjau lokasi

tersebut pada 17 Juli.

Sayangnya, kunjungan mereka dengan menggunakan dua kapal hanya meninjau sedimentasi laut di dekat dermaga, bukan pasir laut. Adapun beberapa nelayan yang protes dan meminta waktu untuk berdiskusi dengan mereka, justru dihiraukan. Aji berkata di Desa Morodemak, selain pasir laut juga ada sedimentasi laut. Nelayan sudah beberapa tahun mengeluhkan hal itu lantaran menyulitkan kapal keluar masuk dermaga.

Oleh karena itu, para nelayan meminta sedimentasi laut itu diuruk tapi sebatas untuk kepentingan keluar masuk dermaga, atau disebut lak dermaga. Adapun jika pengurukan lebih dari itu, nelayan memprotes karena bisa mengarah ke penambangan pasir laut. “Kita mau normalisasi sungai dan membuka alur pintu masuk kapal. Usulan kami itu pengerukan dan kelanjutan pembangunan dermaga sepanjang 400-500 meter yang mangkrak,” katanya.

Selain itu, Aji meminta pengurukan sedimentasi laut di lak dermaga harus dikerjakan oleh pemerintah. Jika pihak swasta yang mengerjakan, katanya, “itu penambangna pasir namanya.” Aji sadar bahaya penambangan pasir laut bukanlah omong-kosong. Ia melihat abrasi di Desa Balong, Jepara, yang bertambah parah akibat ada penambangan pasir laut untuk proyek Tol Tanggul Laut Semarang-Demak. “Kalau seandainya itu terjadi di sini, jelas nasibnya akan sama seperti di Jepara, rumah-rumah dipinggir laut habis,” katanya.

Aji, yang tinggal di Desa Morodemak sejak kecil, masih ingin berharap anaknya kelak masih bisa menikmati desa ini. Ia cukup yakin keberadaan tanaman mangrove dan pasir laut yang terus bertambah akan menjadi benteng kuat untuk melindungi wilayahnya dari ancaman abrasi dan banjir rob. Sebagian besar warga juga banyak yang sadar akan pentingnya keberadaan pasir laut. Hal ini terlihat saat banyak penduduk lebih memilih meninggikan rumah dengan cara membeli material pasir dari kantong pribadinya, dibandingkan mengambilnya langsung dari pasir laut. “Eh, ini kok ada investor masuk mau ambil pasir? Keuntungan bagi kita enggak ada. Jelas dampaknya akan merugikan desa kita. Nelayan di sini jumlahnya hampir ribuan,” katanya.

Serat.id mengamati penambangan pasir laut dari pantauan citra satelit Google Earth. Terlihat sejak 2009 ada dua area pasir laut dengan panjang hampir 600-an meter. Pasir laut ini terus berkembang hingga 2023 yang panjangnya 1,7 km.

Patria Rizky Ananda, manajer dan kampanye advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah, berkata penambangan pasir laut akan berdampak langsung pada lingkungan penduduk sekitar. Jika pasir laut dikeruk, abrasi bakal berdampak parah. “Memang yang disoroti Tol Tanggul Laut itu material tambang pasir lautnya itu dari mana? Mau ambil dari manapun kalau penambangan pasir laut itu merugikan nelayan,” katanya. Ia menjelaskan penambangan pasir laut akan menyebabkan kerugian bagi hasil tangkap nelayan. Hal ini lantaran dampaknya akan membuat habitat ikan jadi rusak akibat air yang keruh.

Cornelius Gea dari LBH Semarang juga menuding wacana penambangan pasir laut tak memperhatikan aspirasi masyarakat lantaran tak ada satupun nelayan yang terlibat dalam rencana tersebut. Cornel menilai penambangan pasir laut justru bakal menyebabkan abrasi dan banjir rob lebih parah di tiga desa terdampak, yakni Desa Morodemak, Desa Margo-linduk, dan Desa Purworejo.

“Kalau pasir laut itu jadi ditambang,” ujarnya, “banjir rob akan semakin parah yang diderita warga, apalagi kawasan mangrove di Morodemak sangat bergantung pada pasir laut,” jelasnya. Melihat abrasi di Desa Balong, Jepara, yang bertambah parah akibat ada penambangan pasir laut untuk proyek Tol Tanggul Laut Semarang-Demak, para nelayan dari Demak menolak rencana yang sama.

Memang, kata Cornel, dalam pembangunan TTLSD ini kajian analisis mengenai dampak lingkungan tidak pernah jelas, terlebih terkait asal-usul material urukan yang akan digunakan. Dua tahun lalu, material urukan TTLSD dari pasir laut di Desa Balong, Jepara. Akibatnya, abrasi dan banjir rob menjadi lebih parah di kawasan itu. Maka, berkaca pada peristiwa yang sudah ada, penambangan pasir laut justru hanya merugikan nelayan. Selain itu, penambangan pasir laut akan merusak ekosistem pesisir, baik mangrove maupun terumbu karang serta ikan.

Seharusnya Pemkab Demak dan Pemprov Jateng berfokus pada permintaan nelayan yang meminta normalisasi lak dermaga. “Kalaupun harus dipulihkan, hanya lak keluar masuk kapal,” tambahnya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Demak Nanang Tasunar menyangkal wacana penambangan pasir laut dalam jangka waktu dekat di Pantai Morodemak. Ia beralasan perizininan penambangan pasir laut bukanlah suatu hal mudah, meskipun telah ada PP No.26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Pemerintah, katanya, akan berfokus pengurukan sedimentasi laut. Pengerjaannya akan dilakukan Pemprov Jateng karena wilayah itu masih di bawah 12 mil dari garis pantai.

Sub Koordinator Pengelolaan Ruang Laut Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng, Benovita Dwi Saraswati, mengakui pernah ada permintaan penambangan pasir laut di Pantai Morodemak. Namun, permintaan ini tidak bisa dilaksanakan lantaran tak sesuai ketentuan. Pertimbangan lain menolak rencana itu karena aturan turunan PP 26 Tahun 2023 masih dikaji pemerintah pusat. Aturan turunan itu berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, jika ada penambangan pasir laut, juga harus sesuai Perda Pemprov Jateng No. 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038. Dalam perda ini disebut bahwa penambangan pasir laut hanya dapat dilakukan dengan jarak 2 mil dari garis pantai. “Kami belum tahu ke depan akan ada penambangan pasir laut atau tidak, tapi yang penting kami tetap akan mengutamakan kepentingan nelayan terutama nelayan kecil,” katanya. “Ketika dilakukan penambangan, harus dilakukan kajian aspek strategis.”

Perihal ada pengurukan pada arus keluar masuk kapal, Benovita menyebut akan dikerjakan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dengan tetap berkoordinasi pada KKP Demak. “Karena itu untuk kepentingan nelayan yang susah keluar masuk dari dermaga. Itu akan jadi pertimbangan kami. Nanti kami koordinasikan dan akan kami lakukan normalisasi,” katanya.





Anggaran Besar Pengendalian Banjir Semarang Tak Sentuh Akar Masalah - Banjir Masih Mengancam Semarang

Oleh; Aris Mulyawan

Banjir masih menjadi momok bagi warga Kota Semarang. Meskipun pemerintah sudah membangun berbagai infrastruktur untuk mengatasi banjir yang dikerjakan hampir setiap tahun, tapi masih juga terjadi banjir.

Warga yang merasa waswas itu di antaranya mereka yang tinggal di Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kota Semarang. Hampir tiap tahun warga di RT 06 RW 26 selalu dilanda banjir. Bahkan dari tahun ke tahun ketinggian banjir terus naik. Ketua RT, Fajar mengungkapkan, dulu ketinggian banjir hanya setinggi mata kaki. Namun, pada 2021, air sudah masuk rumah atau setinggi pinggang.

Terakhir, pada awal 2023, luapan Kali Babon menerjang perumahan tersebut dengan ketinggian mencapai atap rumah. Dalam kejadian itu, satu warga tewas bernama Agus Purbantoro (50). Banjir yang terus berulang melanda kawasan itu juga membuat warga trauma. Karena trauma, kini buah hati Fajar terpaksa tinggal bersama orang tuanya yang lokasinya tidak jauh dari Perumahan Dinar Indah. “Anak saya ketakutan. Sekarang di sana dulu sampai di sini benar-benar aman,” katanya.

Dampaknya, ada beberapa warga yang memilih pindah rumah. Namun, bagi sebagian warga yang tidak mampu membeli rumah lagi, mereka

terpaksa tetap bertahan.

“Dulu jumlah warga di sini sebanyak 33 keluarga, kini tinggal 28 keluarga,” terang nya. Dia menjelaskan, daerahnya rawan banjir karena berada di lokasi cekungan. Dengan demikian, jika hujan deras, air dari perumahan di atasnya otomatis mengalir ke bawah.

Apakah sudah ada penanganan dari pemerintah? Dia mengungkapkan, warga sudah pernah dilatih Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghadapi banjir dan diberi perahu karet.

Warga juga berinisiatif memasang sirine. Jika mulai banjir, sirine dinyalakan sehingga warga bisa bergegas untuk mengungsi. Selain itu, kata dia, sudah ada pembangunan tanggul pasca banjir pada 2019. “Tapi, banjir kembali menerjang perumahan, saat Covid-19 pada 2021,” katanya.

Untuk itu, dia berharap pemerintah merelokasi warga ke tempat yang aman. Namun, karena relokasi itu tidak mudah lantaran pengembangnya sudah lari, maka dia mengusulkan ada penguatan tanggul di perumahan tersebut pada musim kemarau ini. Sebab, tanggul yang terbuat dari tumpukan karung berisi pasir itu kini mreteli (terkikis).

Selain banjir karena hujan, Kota Semarang juga rawan banjir rob. Hal itu kerap dialami warga Terboyo yang juga Ketua Kelompok Nelayan KUB Rizky Bahari, Agus Isnaini.

“Pada tahun baru 2021 terjadi banjir, tahun baru 2022 tidak banjir, dan tahun baru 2023 banjir lagi,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk mengatasi banjir tersebut, pemerintah sudah membangun rumah pompa di Kali Sringin Baru dan membangun sheet pile di dekat rumah pompa itu sampai ke kawasan Industri pada 2018. Pompanya tidak bisa mengatasi banjir, kata dia, maka beberapa bulan yang lalu dibangun pintu darurat. “Pintu air itu fungsinya hanya untuk menghalau air laut ke atas.”

Memang warga terbantu dengan pembangunan rumah pompa itu karena air laut tidak melimpah ke kampung. Namun, jika di daerah atas curah hujannya tinggi, tetap banjir. Sebab, banyak sungai yang bermuara ke Kali Sringin.

“Tidak bisa mengatasi. Banjir awal tahun lalu setinggi lutut. Kawasan Terboyo dan Trimulyo banjir total,” katanya.

Untuk mengatasi banjir, kata dia, seharusnya saluran-saluran air itu dibenahi semua. Adapun untuk mengatasi rob di kawasan Tambaklorok, Semarang Utara, hingga berita ini dirilis masih berlangsung pembangunan tanggul laut. Anggaran pembangunan tanggul itu sebesar Rp225 miliar. Tanggul di tepi pantai itu dibangun untuk menghindari pasang tinggi sehingga tidak masuk ke pemukiman. Adapun tinggi tanggul direncanakan sekitar 3 meter.

Lima DAS Rawan Banjir

Menurut Eka Hadriana, anggota Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS), pemicu banjir di Kota Semarang tidak terkunci pada persoalan teknis seperti hujan terlalu lebat dan fungsi pompa yang kurang optimal.

Selain persoalan teknis seperti di atas, menurutnya, ada persoalan-persoalan nonteknis seperti berkurangnya area tutupan vegetasi dan bertambahnya area terbangun yang dipengaruhi keputusan-keputusan politik.

Dalam konteks banjir di Kota Semarang, kata dia, berkurangnya area tutupan vegetasi di hulu-hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) ditentukan oleh di antaranya izin-izin pembangunan, peraturan-peraturan tata ruang di Kota Semarang, dan pergerakan arus modal.

Misalnya, bagaimana kawasan industri terbangun atau bagaimana suatu dataran tinggi, seperti Kelurahan Sekaran, bisa menjadi kawasan permukiman padat penduduk, tentu tidak terlepas dari hal-hal nonteknis tersebut. Dia menjelaskan, setidaknya ada lima DAS di Kota Semarang yang rawan banjir. Kelimanya adalah DAS Babon, DAS Garang, DAS Beringin, DAS Silandak, dan DAS Karanganyar.

DAS Silandak berada di tengah-utara Kota Semarang, melintasi Kelurahan Bambankerep dan Ngaliyan, Kelurahan Tawangmas, Tambakharjo, Tawangsari, Krobokan dan Karangayu. Untuk mengatasi banjir di DAS ini dibangun rumah pompa dan pintu air di Kampung Tambakharjo.

Adapun DAS Babon memiliki panjang 17,2 km dengan hulu di lereng Gunung Ungaran dan bermuara di Laut Jawa. Aliran Sungai Babon melewati tiga kabupaten/kota, yakni Kabupaten Semarang dan Demak serta Kota Semarang.

Untuk sistem pengendalian banjir di kawasan hilir DAS Babon, kata

Eka, dilakukan dengan menggunakan sistem polder dan dam lepas pantai. Selain itu, pemerintah membangun rumah-rumah pompa dilengkapi mesin-mesin pompa besar untuk menyedot air dari darat ke laut. Dibangun pula kolam retensi untuk menampung banjir sebelum dialirkan ke sungai.

Secara keseluruhan, sistem polder di kawasan pantai Kota Semarang akan dilakukan dengan membangun 12 polder, tujuh kolam retensi, sembilan stasiun pompa, dan dua bendung.

“Normalisasi dan pembuatan embung juga menjadi agenda pengendalian banjir,” terangnya.

Dalam buku *Banjir Sudah Naik Seleher: Ekologi Politis Urbanisasi DAS-DAS di Semarang (2021)* karya Bosman Batubara, Bagas Yusuf Kausan, Eka Handriana, Syukron Salam, dan Umi Ma’rufah, ada dua jilid pekerjaan konstruksi dalam proyek Pengendalian Banjir dan Rob Semarang-Demak.

Masing-masing jilid terdiri atas dua paket pekerjaan yang dibiayai Pemerintah Pusat melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum.

Dua paket pertama jilid I dimulai pada 2016 dengan biaya sekitar Rp227 miliar. Dua paket pekerjaan jilid II selanjutnya pada 2021 dengan nilai proyek Rp206 miliar.

Paket pekerjaan I meliputi pekerjaan pembuatan kolam retensi Banjardowo dengan kapasitas 30 ribu m³, normalisasi serta perbaikan parapet Kali Sringin, dan pembangunan pintu muara dan polder Kali Sringin dengan tanggul dari Kali Tenggang ke Sringin.

Paket II jilid I meliputi pekerjaan pembangunan tanggul rob sepanjang 2,17 km dari kampus Universitas Islam Sultan Agung hingga ke Kawasan Industri Terboyo-Kali Sringin.

Untuk pekerjaan paket II berupa membangun kolam retensi di Kawasan Rusunawa Kaligawe dengan kapasitas tampung 66 ribu m³, pembangunan pintu muara dan Polder Kali Tenggang, serta perbaikan parapet Kali Tenggang.

Masing-masing polder dilengkapi rumah pompa yang dapat menyedot air untuk dibuang ke laut. Polder Kali Tenggang memiliki pompa berkapasitas 6x2.000 m³/detik. Adapun rumah pompa Sringin dilengkapi pompa dengan kapasitas 5x2.000 m³/detik.

Paket Pekerjaan Pengendalian Banjir dan Rob Semarang-Demak jilid II dimulai pada 2021. Proyek itu terdiri atas dua paket, lokasinya di wilayah Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Pekerjaan ini meliputi pembangunan tanggul di Desa Sriwulan Demak dan pembangunan drainase tanggul Kali Babon dan Sungai Sayung.

Namun, paket pembangunan tanggul di Desa Sriwulan dibatalkan karena sudah ada proyek tol tanggul laut Semarang-Demak.

Sementara itu, DAS Karanganyar merupakan DAS terkecil di Kota Semarang dengan luas 1943,91 ha, mencakup wilayah Kecamatan Tugu dan Kecamatan Ngaliyan.

Untuk DAS Garang, hulunya di Kawasan Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, dan bermuara di pesisir utara Kota Semarang. DAS ini melintang di tiga kabupaten/kota, yakni Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang.

Untuk mengatasi banjir dari DAS itu, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, di antaranya pelebaran sungai dengan mengeruk bantaran Kali Garang di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur, dan normalisasi sungai-sungai di pusat kota. Proyek ini didukung pembuatan pintu-pintu air di hilir DAS Garang. Selain itu, didukung dengan pembangunan Waduk Jatibarang dan normalisasi Banjir Kanal Barat.

Sedangkan DAS Beringin lokasinya berbatasan dengan DAS Plumbon di Kabupaten Kendal. DAS ini melintas Mijen (hulu), Ngaliyan, dan Tugu (hilir). DAS sungai ini berkali ulang banjir, terakhir pada 2022; enam mobil terseret banjir. Untuk mengatasi banjir itu, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana sudah melakukan normalisasi sungai dengan anggaran Rp230 miliar.

Hasil penelusuran di LPSE Kota Semarang misalnya, diketahui sudah banyak proyek yang dikerjakan untuk penanganan banjir di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut.

Proyek Pengendalian Banjir Semarang (2012-2023)

Proyek	Nilai Proyek (Rupiah)	Pemenang Tender	Tahun
Normalisasi sungai Detail Engineering Desain (DED) kawasan Sigar Bencah	150 juta	Mitratama Indokarya	2012
Normalisasi Kali Tenggang (pengadaan konstruksi kanal permukaan)	600 juta	CV. Bonindo Cipta Daya	
Pengadaan konstruksi kanal permukaan peningkatan saluran drainase Kali Tenggang (dari arteri sampai muara)	4,8 miliar	PT.Reka Esti Utama	
Pembangunan sub sistem Kali Banger (lanjutan)	2,4 miliar	CV. Widya Utama	
Pembangunan Rumah Pompa Trimulyo Kecamatan Genuk	4 miliar	PT. Sumber Alam Berkarya	2013
Pengadaan & pemasangan pompa & ME Pompa Trimulyo	2,5 miliar	CV. Budi Mulyo Tehnik	
Kajian daya tampung Sungai Babon	76 juta	Primasetia Eng Con	
Konsultan Supervisi Peningkatan Saluran Drainase Kali Tenggang (Jembatan Daendels, Jembatan LIK 2 & Jembatan Muktiharjo)	160 juta	CV. Catur Eka Karsa	
Konsultansi supervisi (pembangunan sistem Polder Kali Banger)	120 juta	PT. Annaba Persada	
Peningkatan saluran drainase Kali Tenggang (Jembatan LIK Kaligawe 2)	3,2 miliar	PT Duta Mas Indah	
Penambahan prasarana dan normalisasi inlet stasiun pompa	2,1 miliar	CV. Aditia Jaya Mukti	

Perbaikan pipa buang pompa Tawang	443 juta	Dwi Mitra Mandiri Manunggal	
Talud Sungai Sinar Asih 1 dan 2 Kedungmundu	250 juta	CV. Umega Artha Jaya	
Pembangunan sub sistem kali banger (lanjutan)	2,3 miliar	CV. Widya Utama	
Pengadaan Jasa Konstruksi Pelebaran Jembatan Sungai Beringin Kelurahan Wates	485 juta	Fikanova	
Peningkatan saluran dan kapasitas pompa Kartini	2,8 miliar	PT Gracia Enggal Sentosa	2014
Pengadaan dan pemasangan pompa kapasitas 1500 liter/detik	5,4 miliar	CV. Budi Mulyo Tehnik	
DED subsistem Sungai Bandarharjo	75 juta	CV. Studi Teknik	
Penyusunan dokumen evaluasi penanganan banjir dan rob	277,5 juta	PT. Bina Buana Raya	
Paket II normalisasi saluran Kali Tenggang (Jembatan LIK I)	3,6 miliar	Bima Agung	
Paket III normalisasi saluran Kali Tenggang (Jembatan Muktiharjo)	2,3 miliar	Putra Mas Indah Baroe	
Normalisasi saluran Sriwijaya Tegalsari	2,3 miliar	CV. Maula	
Paket I normalisasi saluran Kali Tenggang (Jembatan Daendels)	1,7 miliar	CV. Anantyo	

Konstruksi talud saluran Kali Tenggang seksi C	3,2 miliar	PT.Reka Esti Utama	
Pengadaan dan pemasangan pompa dan ME	19 miliar	CV. Budi Mulyo Teknik	2015
Evaluasi dan <i>review</i> DED Sungai Tenggang	433 juta	PT.Adhistya Dharmastitya	
Pembangunan Rumah Pompa Banjardowo	4,3 miliar	PT Delta Median	
Jasa konsultan supervisi pembangunan tanggul penutup Kali Banger dan pembangunan Kolam Retensi Kemijen	710 juta	CV.Titis Engineering Consultant	
DED kolam retensi dan rumah pompa Kampung Bahari Tambaklorok	850 juta	PT. Saranabudi Prakarsaripta	2016
Pengadaan pompa mobile 3 unit	4.2 miliar	PT.Transformasi Sejahtera Indonesia	
<i>Review</i> DED <i>sheet pile</i> Kali Banger	450 juta	CV. Mitra Muda Rekayasa	
<i>Review</i> DED Kolam Retensi Kali Banger dan dam penutup Kali Banger	370 juta	CV. Mitra Muda Rekayasa	
Pengadaan pompa <i>mobile</i>	6 miliar	PT Bimasakti Unitama	2017
<i>Review design</i> kolam retensi dan dam penutup Kali Banger	200 juta	CV. Mitra Muda Rekayasa	
Peningkatan sub sistem Kali Tenggang	5,9 miliar	CV. Duta Karya	
Supervisi peningkatan talud Kali Banger	157 juta	CV.Jati Utama	2018
Penataan talud saluran Kali Semarang	4,8 miliar	CV. Widiagung Bangun	2019

Penanganan banjir di Sungai Penggaron sepanjang 5 km	2,7 miliar		2020-2021
Penanganan banjir Sungai Beringin sepanjang 5,03 km	232 miliar		2020-2022
Pengendalian banjir dan rob Kawasan Tambaklorok tahap II	225,1 miliar		2020-2024
Pengendalian banjir dan rob Semarang Paket I di Sungai Babon dan Sungai Sayung, Kota Semarang-Kabupaten Demak	131,2 miliar		2021-2022
Pengendalian banjir dan rob Semarang Paket II untuk mengurangi dampak rob di Kawasan Industri Terboyo	207 miliar		2021-2022
Normalisasi saluran kawasan Simpanglima (lanjutan)	1 miliar	CV. Borobudur Timur	2021
Normalisasi saluran kawasan Kedungmundo Raya	4,9 miliar	Dwi Insan Berkah Mandir	
Rehabilitasi Rumah Pompa Lanal	2,8 miliar	Purisidi	2023
Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku Embung Plumbon Kota Semarang di Kelurahan Wonosari	2,7 miliar		

Sumber: LPSE Kota Semarang, LPSE Pemprov Jateng, Laporan BBWS Pemali-Juana 2022

‘Tak Selesaikan Akar Masalah’

Namun, berbagai penanganan banjir dengan menggunakan pendekatan infrastruktur ini dinilai tidak efektif jika tidak dibarengi penanganan faktor penyebab banjir. “Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah banjir, apa cukup dengan tanggul? Harusnya tidak cukup dengan tanggul. Kalau dengan tanggul itu, siapa yang diuntungkan?” kata Mila Karmila,

akademisi lingkungan dan tata kota dari Universitas Islam Sultan Agung, dalam bedah buku “Urip Di oyak-oyak Banyu: Perjumpaan Abrasi dan Infrastruktur di Sayung”, 5 Agustus 2023.

Menurutnya, pendekatan infrastruktur bukan satu-satunya untuk mengatasi banjir. Namun, pendekatan itu dipilih karena lebih mudah dilihat. “Infrastruktur itu kalau ada masalah, mudah tertangani karena tidak terkait dengan cuaca. Selain itu alat ukurnya jelas dan lebih mudah,” ungkapnya. Dan selama ini pemerintah selalu menjadikan infrastruktur sebagai solusi karena terkait dengan serapan anggaran, dibandingkan dengan *capacity building*. “Kasus yang terakhir, banjir yang paling parah di Dinar. Hal itu, kan, sudah dirasakan warga sejak 10 tahun lalu. Tapi, antisipasinya tidak ada yang sangat pas, misalnya tidak boleh ada pembangunan di daerah sempadan sungai. Pembangunan itu, kan, menyalahi aturan, namun tidak ada tindakan dengan memberhentikan pembangunan di daerah itu,” katanya.

Dia menilai penanganan banjir di Semarang itu parsial. Dalam artian, kalau di daerah atas tidak dibenahi, misalnya ada pelarangan pembangunan di daerah atas, daerah tangkapan air, tapi di bawah dibangun tanggul, tetap saja tidak menyelesaikan masalah. “Di bawah sudah banyak pembangunan, seperti tanggul, sistem polder diperbaiki, dan lain-lain. Tapi, kalau daerah atas tidak dibenahi, jadi susah.”

“Solusi jituinya mungkin tidak ada. Hanya, kalau hanya mengandalkan infrastruktur ya rasanya juga belum pas. Mesti ada solusi lebih terkait dengan lingkungan, selain kebijakan tata ruang yang harus diterapkan dengan benar. Walaupun itu memang sudah mulai,” jelasnya

Pendapat senada diungkapkan Cornel Gea, pengacara publik LBH Semarang, yang menilai pemerintah tidak pernah menyelesaikan akar persoalan banjir. Di sisi lain, ruang hidup di Kota Semarang diatur dengan kepentingan bisnis. Hal itu terlihat dari alih fungsi lahan di kawasan Bukit Semarang Baru (BSB) di Kecamatan Mijen, pembangunan di daerah atas, ekspansi industri, kawasan industri, dan reklamasi.

”Jadi, kalau dibilang belum dikasih tahu, sebenarnya sudah dikasih tahu di mana akar persoalannya. Namun, pemerintah dari tahun ke tahun tidak pernah menganggap catatan penyebab banjir itu sebagai acuan untuk penanganan banjir,” kata Cornel.

Dia menilai pemerintah lebih memilih menyelesaikan banjir dengan pendekatan pembangunan infrastruktur karena bisa menyerap anggaran besar. “Misalkan, sampai hari ini, belum jelas sebenarnya pengambilan air secara besar-besaran oleh pabrik itu bagaimana? Alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan itu, mereka tertib enggak? Apa mereka membuat area resapan?”

“Lalu alih fungsi lahan yang sembarangan, termasuk pembangunan properti di kawasan sempadan sungai.” Dia menilai pemerintah “senang-senang” saja bila menerima banyak pembangunan, menerima banyak investasi, menerima banyak pembangunan properti dan lainnya. “Seakan-akan Semarang ini jadi pasar bebas untuk investor properti, industri. Tanpa ada penegakan aturan yang jelas dan pengawasan yang jelas.”

Cornel juga menyoroti pembangunan tanggul laut. Dia menilai tanggul itu bisa membuat masalah banjir makin parah. Kenapa? Karena beberapa jalur sungai dari Semarang ke laut

‘Daerah Hulu Belum Ditangani’

Sub Koordinator Operasi Pemeliharaan Drainase DPU Kota Semarang, Hisyam Ashari, mengungkapkan jumlah sungai di Kota Semarang ada 46 sungai. Dari jumlah itu, dulu yang rawan banjir adalah Kali Beringin. Sekarang sungai tersebut sudah dilebarkan. “Dengan demikian,” katanya, “ke depan sudah tidak rawan lagi.”

Begitu juga Kali Babon. Daerah hilir sudah dilebarkan sehingga daerah Trimulyo dan sekitarnya menurutnya aman. Kini tinggal di daerah Meteseh dan sekitarnya masih rawan jika daerah hulu hujan deras. “Kalau intensitas hujan ekstrim, memang agak kewalahan. Sepanjang curah hujan normal, Inshaallah teratasi,” katanya.

Apa saja yang dilakukan selama lima tahun ini untuk mengatasi banjir? Ia mengatakan, ada beberapa pembangunan, di antaranya rumah pompa dan normalisasi. Rumah pompa itu di antaranya Rumah Pompa Kali Tenggang, Rumah Pompa Kali Seringin, Rumah Pompa Hasanudin, dan Rumah Pompa Madukoro. Untuk normalisasi sungai di antaranya Kali Banjir Kanal Timur, Kali Tenggang, Kali Beringin, dan Kali Babon.

“Sebenarnya cukup lumayan pembangunan di pusat-pusat pengendalian banjir di Kota Semarang,” ia menilai. Sementara untuk mengatasi banjir rob, sejak awal tahun 2023 dibangun tanggul laut di wilayah Tambaklorok. “Insyaallah, kalau pembangunan itu selesai, Tambaklorok yang paling terdampak rob bisa teratasi.”

Pengelolaan 46 Sungai di Kota Semarang

Jumlah Sungai	Wewenang	Total Panjang
25 sungai	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	64.163
16 sungai	Dinas Pekerjaan Umum Semarang	62.275 meter
5 sungai	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana	13.447 meter

Sumber: <https://sungaiipu.semarangkota.go.id/>

Tapi kenapa masih terjadi banjir setiap tahun? Ia berkata banyak permasalahannya. Selain drainase, ada persoalan sampah, katanya. “Sehingga pola-pola kehidupan masyarakat berpengaruh sekali terhadap banjir di suatu wilayah. Tapi, sudah berkurang. Untuk menghilangkan banjir itu tidak mungkin, tapi paling tidak dari tahun ke tahun sudah berkurang.”

Dalam mengatasi banjir, kata dia, tidak hanya dengan pendekatan pembangunan infrastruktur, melainkan juga melakukan edukasi ke kelurahan dan sekolah agar tidak membuang sampah sembarangan.

“Sebab infrastruktur tanpa dibarengi perilaku bersih sungai, tidak akan banyak berpengaruh. Pemanfaatan air bawah tanah seharusnya dikurangi juga untuk mengurangi laju penurunan tanah,” katanya.

Penutupan sungai dengan pompanisasi apa benar-benar bisa menyelesaikan banjir? Dia berkata, “Asalkan pompa hidup semua, atau sesuai standar operasional prosedur, saya kira masih mampu, kecuali ada kerusakan.”



Terkait perumahan Dinar Indah, dia mengatakan, posisi daerah itu berada di bawah elevasi air sungai. Meski demikian, dengan pelebaran hilir Sungai Babon di Trimulyo, paling tidak bisa mengurangi banjir. “Untuk di wilayah atas, masih dikonsep oleh Balai Besar Wilayah Sungai. Sebab, cukup unik, alur sungainya hampir datar,” katanya.

“Untuk daerah hulu belum ditangani. Untuk daerah hulu yang harus diperhatikan adalah tata guna lahan,” tambahnya.

Berkurangnya Wilayah Resapan Air di Semarang dan Banjir Menahun

Oleh: Jamal

Semarang - Berlembar-lembar kain bahan produksi kaos milik Golbi Nadifi Said, 30 tahun, warga Perumahan Dinar Indah Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang terendam air bercampur lumpur pada Jumat sore, 6 Januari 2023. Sungai Pengkol di sebelah perumahan tersebut tiba-tiba meluap dan menggenangi pemukiman tempat tinggalnya. Ketinggian air mencapai atap rumah.

Golbi sehari-hari menjalankan usaha konveksi di rumahnya. Hari itu dia mengerjakan sejumlah pesanan dari pelanggannya. Namun, kain-kain yang dia potong sesuai pola direndam air bercampur lumpur. Banjir juga merendam barang-barang lain di rumahnya. Dia lantas membatalkan sejumlah pesanan kaos yang telah dikerjakan. Bahan-bahan miliknya dinilai tak lagi layak untuk dijahit menjadi kaos. “Terpaksa saya batalkan. Pelanggan saya persilakan untuk memesan di tempat lain,” kata dia. Lantaran banjir tersebut istri dan anaknya mengungsi. Pasalnya pemukiman tersebut menjadi penuh lumpur setelah diterjang banjir. Sementara bersama lelaki lain sesama penghuni perumahan tersebut tetap berada di sana untuk berjaga.

Banjir yang hanya berlangsung sekejap kemudian surut tersebut juga merenggut korban jiwa. Seorang warga terjebak di dalam rumah ketika banjir datang. Korban dalam kondisi sakit dan di rumah seorang diri ditinggal kerja oleh saudaranya. Jasadnya dievakuasi oleh petugas setelah air surut. Selang kurang dua pekan, banjir bandang kembali melanda perumahan tersebut. Warga sebelumnya telah membersihkan rumah mereka dari lumpur dan sampah dipaksa kembali mengungsi.

Kejadian tersebut menjadi rentetan banjir yang menggenangi Kota Semarang pada awal 2023. Sejak hari terakhir 2022 banjir telah mengepung Kota Semarang. Hampir semua jalan protokol dan pemukiman di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut direndam air hingga satu meter lebih.

Jalan Kaligawe Kota Semarang menjadi titik terparah yang direndam banjir. Sejumlah kendaraan besar seperti truk dan bus mogok karena me-

sin tergenangan air. Butuh waktu berminggu-minggu banjir di jalur nasional Pantai Utara atau Pantura itu surut. Warga yang hendak melintasi kawasan tersebut seperti ke Rumah Sakit Sultan Agung dibantu relawan naik perahu karet. Banjir juga merendam Stasiun Tawang dan jalur kereta api. Akibatnya sejumlah perjalanan kereta terganggu. Banjir juga menyebabkan 13 perjalanan pesawat dari dan menuju Bandara Internasional Ahmad Yani Kota Semarang ditunda. Pasalnya akses menuju bandara direndam banjir.

Sebelumnya banjir juga melanda wilayah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Hujan mengguyur wilayah Kota Semarang sejak pukul 15.00 pada Ahad, 6 November 2022 lalu. Termasuk Kecamatan Ngaliyan yang berada di wilayah atas Ibu Kota Jawa Tengah tersebut. Hingga petang menjelang, hujan tak kunjung reda. Saat hujan masih mengguyur, sungai yang melintasi Perumahan Wahyu Utomo Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tiba-tiba pasang. Awalnya air meluber menembus pembatas antara jalan dan sungai. Jalan Wahyu Asri Selatan di RT 9 RW 6 Kelurahan Tambakaji tersebut dalam sekejap tergenang.

Debit air bercampur lumpur itu semakin membesar dan menerjang apa saja yang dilewati. “Datangnya tiba-tiba, surutnya juga cepat,” ujar Putri, 25 tahun, warga perumahan tersebut. “Terus arusnya gede, terus menghanyutkan semuanya.” Mobil milik Putri turut menjadi korban banjir bandang. Mobil jenis sedan tersebut hanyut dibawa arus banjir. Awalnya, mobil itu di parkir di seberang jalan depan rumahnya. Lokasi parkir tersebut tepat berada di samping aliran sungai.

Tak hanya kendaraan Putri, mobil milik warga lain di perumahan tersebut juga diseret banjir. Empat mobil itu kemudian ditemukan berada sekitar dua kilometer dari lokasi semula. Ketika ditemukan kondisi mobil telah rusak. Seluruh kacanya pecah, bodi penyok, dan kabin dipenuhi material lumpur bercampur batu. Pemukiman lokasi ditemukan mobil-mobil tersebut juga tak luput dari terjangan banjir. Di Beringin Baru Kelurahan RT 10 RW 8 Kelurahan Tambakaji tersebut ada tiga rumah warga yang jebol dihantam banjir. “Barang-barangnya hilang semua,” kata Faizin, 50 tahun, salah seorang warga Beringin Baru.

Tak jauh dari Perumahan Wahyu Utomo di sebelah atasnya terdapat tambang galian C. Berdasarkan citra satelit Google, tambang itu muncul pada 2013. Dua tahun sebelumnya lahan di sebelah tanjakan Silayur Jalan Prof Hamka itu masih nampak hijau.

Pengerukan material tanah dari kawasan tersebut masih berlangsung hingga kini. Setiap hari truk dump keluar masuk kawasan tersebut. Akibat aktivitas itu jalan Prof Hamka mengalami kerusakan tepat di akses masuk area pertambangan. Aspal jalan bergelombang dan berlubang karena dilintasi truk bermuatan material. Padahal jalan yang menghubungkan Kota Semarang bawah dan atas serta Kabupaten Kendal itu dilarang dilintasi kendaraan dengan berat 8 ton ke atas mulai pukul 05.00 sampai 23.00. Namun, selama ini truk dari lokasi pertambangan dan kawasan industri di Kecamatan Mijen dibiarkan melintas.

Larangan itu dibuat karena jalan tersebut dinilai rawan kecelakaan. Kontur jalan yang menurun dikhawatirkan sopir kendaraan berat tak mampu mengendalikan. Sementara jalur tersebut cukup sibuk dilintasi warga. Menurut citra satelit Google, awalnya bukit yang dikeruk berada di sebelah jalan pada 2013. Pengerukan terus dilakukan menjauh dari tepi jalan. Hingga 2023, kawasan yang semula nampak hijau pada 2010 kini memperlihatkan bekas galian yang menganga.

Pengerukan tersebut juga hingga tepi sungai yang mengalami banjir bandang dan menerjang perumahan di bawahnya. Bahkan kawasan di seberang kali tersebut juga nampak menyisakan bekas galian. Aktivitas tambang di Kota Semarang juga terjadi di wilayah Kecamatan Tembalang. Lokasi tambang ini berbatasan dengan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Tempat ini dikenal warga Kota Semarang dengan sebutan Brown Canyon.

Menurut citra satelit Google, aktivitas tambang telah terjadi pada 2010. Pada tahun-tahun sebelumnya dokumentasi Google tak memperlihatkan dengan jelas kondisi di kawasan tersebut. Pada 2013 nampak lahan yang dikeruk semakin luas. Bertambah dua kali lipat dibanding tiga tahun sebelumnya. Penambangan tersebut juga menyisakan lubang yang digenangi air. Awalnya genangan air nampak kecil dan menyebar. Namun, genangan yang ditimbulkan semakin melebar. Pada 2019 kubangan tersebut telah mirip rawa atau danau buatan. Pada 28 April 2019 seorang anak tenggelam di kubangan bekas tambang. Jasadnya baru ditemukan keesokan harinya.

Hingga kini aktivitas tambang di Brown Canyon semakin meluas. Lubang-lubang sisa pertambangan dibiarkan menganga tanpa direklamasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah atau Per-

da RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031, tak ada kawasan di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut yang diperuntukkan lokasi pertambangan. Pada Pasal 93 disebutkan pertambangan yang dimaksud adalah minyak dan gas bumi di Kecamatan Tugu.

Namun, klausul itu diubah dalam RTRW yang direvisi pada 2021. Pada pasal 96 muncul jenis pertambangan baru yaitu batuan. Sejumlah kecamatan diplot untuk pertambangan tersebut yaitu Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Tembalang, Pedurungan, dan Genuk. Dua lokasi pertambangan yang telah lama operasi di Kota Semarang berada di Kecamatan Tembalang dan Ngaliyan. Mengacu Perda RTRW yang lama kegiatan itu melanggar. Selain tempat, pertambangan jenis tersebut juga tak ada dalam RTRW Kota Semarang.

Perubahan lain yang diatur dalam RTRW setelah direvisi adalah tentang kawasan resapan air. Kota Semarang memiliki luas 39.923 hektare termasuk daratan asli dan reklamasi. Dalam RTRW 2011 Pasal 59 kawasan resapan air di Kota Semarang kurang lebih 433 hektare. Pasal tersebut juga mengatur wilayah yang diperuntukkan sebagai kawasan resapan air yaitu Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Gajahmungkur, Semarang Selatan, dan Candisari. Kawasan tersebut diatur rencananya untuk penghijauan dan sebagai fungsi hutan.

Kemudian dalam RTRW yang telah diubah pada 2021, di pasal yang sama tak ditulis luasan wilayah resapan air. Dalam poin tentang rencana kawasan tersebut, fungsi hutan juga hilang.

Luasan hutan produksi dalam RTRW juga mengalami perubahan. Pada RTRW yang disusun pada 2011 luas hutan produksi di Kota Semarang kurang lebih 2.171 hektare di Kecamatan Mijen, Ngaliyan, dan Banyumanik. Luas itu menyusut pada RTRW yang diubah 2021 yaitu 1.991,86 hektare.

Wilayah Kecamatan Mijen yang sebelumnya berupa perkebunan kini sebagian telah berubah. Banyak perumahan elit dibangun di kawasan tersebut dilengkapi pusat perbelanjaan, pendidikan, perkantoran, dan industri.

Pakar lingkungan dan Tata Kota Universitas Islam Sultan Agung Kota Semarang, Milla Karmila, menilai banjir bandang yang kini terjadi di Kota Semarang dipicu banyak faktor antara lain lantaran model pembangunan tak ramah lingkungan. "Misal banyaknya perumahan di sekitar Ngaliyan, yang awalnya adalah kawasan hijau," ujar dia.

Menurut dia, pembangunan juga mulai bergeser ke kawasan pinggir seperti Semarang Barat wilayah atas. Hal tersebut menyebabkan alih fungsi lahan yang semula wilayah resapan air kini berdiri bangunan.

Mila menyebut, degradasi luasan wilayah tangkapan air di Kota Semarang, khususnya wilayah atas harus dikendalikan untuk mencegah banjir. “Bagaimana mengendalikan kawasan agar tidak semakin berkurang khususnya di daerah atas,” sebutnya.

Kondisi tersebut diperparah adanya kegiatan eksplorasi tanah dari daerah perbukitan di Semarang yang dikeruk. Sejak bertahun-tahun sebelum Pemerintah Kota Semarang mengatur adanya tambang praktik itu telah berjalan. “Keberadaan tambang galian C juga menjadi faktor adanya banjir,” ujar dia.

Menurutnya, tambang galian C menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi eksplorasinya. “Secara langsung hal ini juga berdampak pada kejadian banjir karena lokasi penambangan galian C biasanya dilakukan di daerah bagian atas seperti Ngaliyan dan Tembalan,” ujar Mila.

Padahal daerah tersebut merupakan wilayah tangkapan air. Kondisinya yang telah dieksploitasi menyebabkan fungsinya sebagai resapan air tak bekerja optimal. “Fungsi sebagai cathment area akan hilang berimbas pada air larian dan mengakibatkan terjadinya banjir,” sebut dia.

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyebut banjir bandang yang melanda wilayahnya seperti di Perumahan Dinar Indah merupakan kiriman dari kabupaten tetangga. “Kiriman dari atas,” ujarnya. Dia tak menanggapi ketika ditanya soal dampak tambang terhadap banjir di wilayahnya.

Selanjutnya, dia mengatakan berencana menebar sumur resapan di wilayah Kota Semarang sebagai upaya mencegah banjir. “Kami akan masukkan ke Peraturan Wali Kota. Jadi nanti jika ada IMB baru, baik perumahan, perkantoran, perhotelan, harus seperti itu,” tuturnya.



Foto; Walhi Jateng

Petani Dieng Menolak Ekspansi Proyek Panas Bumi Geo Dipa

Oleh; Praditya Wibby

Pengalaman warga di sekitar pembangkit yang menghadapi gas meledak, pipa meledak, dan kebocoran gas beracun membuat mereka trauma. Sepanjang hidupnya mereka akan berdampingan dengan proyek berisiko tinggi.

Hamparan tanaman kentang menyelimuti ribuan hektare lahan pertanian warga Desa Karangtengah dan Desa Bakal. Terlihat para petani melakukan aktivitas di lahannya. Ada yang membenahi sambungan peralon air, ada juga yang mencangkul dan menyemprotkan pestisida di bawah terik matahari yang cukup menyengat pada akhir Juli 2023. Kedua desa itu berada di dataran tinggi Dieng, kawasan wisata terkenal di Jawa Tengah. Dieng memang indah dengan lanskap gunung yang mengitarinya seperti Prau, Pakuwaja, dan Sikunir. Tak heran usaha turisme terus berkembang. Dari usaha penginapan sampai makanan, dari usaha glamping hingga jasa guide.

Namun, di balik keindahan dan hawa dingin alamnya, dengan sumber ekonomi rumah tangga mayoritas mengandalkan pertanian, warga petani Dieng menghadapi ekspansi pengeboran panas bumi atau geotermal. PT Geo Dipa Energi (persero), badan usaha milik negara dari usaha patungan PT Pertamina dan PT PLN, mengoperasikan pembangkit listrik panas

bumi atau PLTP Dieng unit 1 sebesar 60 MW sejak 2002. Perusahaan juga punya proyek yang sama di Patuha di kawasan Ciwidey, Jawa Barat. Sejak 2020, baik di Dieng maupun Patuha, perusahaan menambah proyek geotermal bernama PLTP Unit 2 dengan kapasitas masing-masing 55 MW.

Dalam laporan tahunan 2022, Geo Dipa menyebut progres pengeboran proyek Dieng 2 sudah dalam tahap sumur ke-7 dari rencana 10 sumur. Per Desember 2022, progres keseluruhan proyek 40,63%, dengan total biaya aktual Rp1 triliun.

Menurut laporan itu, proyek Dieng 2 terlambat dari rencana operasi semula yang dijadwalkan, yakni tahun 2023 menjadi Desember 2025. Laporan juga menyebut estimasi biaya rekayasa, pengadaan barang dan jasa serta konstruksi pembangkit Dieng 2 sebesar Rp2,1 triliun. Dalam laporan itu disebut bahwa perubahan, lokasi pembangkit listrik, dan teknologi Dieng 2 akan diajukan ke Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk disetujui.

Rilis resmi pemerintah pada 2020 menyebut proyek PLTP Dieng 2 memang mendapatkan pinjaman langsung dari ADB, yang juga melibatkan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PT PII). Baik PT Geo Dipa Energi maupun PT PII adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Di PT Geo Dipa, Kementerian Keuangan memiliki 94,5% saham, sisanya milik PT PLN. PLN juga adalah pembeli utama pasokan tenaga listrik panas bumi dari Geo Dipa. Pada 2022, pendapatan Geo Dipa sebesar Rp964 miliar. Total pembayaran pajak perusahaan kepada negara tahun 2022 sebesar Rp311 miliar.

Pengembangan proyek pembangkit listrik panas bumi di bawah PT Geo Dipa disebut sebagai bagian dari target 23% bauran energi baru terbarukan Indonesia pada tahun 2025. Proyek geotermal digadang pemerintah sebagai kebijakan dan program transisi energi untuk pelan-pelan lepas dari oligarki energi kotor. Tetapi, bahkan sekalipun menjual “energi bersih”, warga sekitar pembangkit terus menyuarakan protes dan penolakan. Proyek geotermal disebut bisa memicu krisis ekologi setempat, mulai dari potensi pencemaran sumber mata air, limbah cair, kebocoran gas beracun, hingga pencemaran suara.

Insiden terakhir terjadi pada Maret 2022. Terjadi kebocoran gas beracun hidrogen sulfida (H₂S) di wellpad (tapak sumur bor) 28. Seorang pekerja tewas dan delapan lainnya dirawat di rumah sakit. Dalam ket-

erangannya, Geo Dipa menyebut ada alat yang malafungsi sehingga kepala sumur terbuka yang melepaskan H₂C. Seorang pekerja yang tewas itu menghirup gas beracun saat berusaha menutup kepala sumur. Akibat kecelakaan itu, kapasitas suplai uap berkurang. Selain itu, Bank Pembangunan Asia (ADB) menyoroti isu keamanan dan keselamatan kerja. Dampaknya, menurut perusahaan, rencana pemasangan sumur Dieng 2 untuk Dieng 1 menjadi tertunda.

Selain kecelakaan terbaru itu, pernah pula terjadi ledakan di sumur pad 30 pada 2016 saat proses pembersihan rutin, menyebabkan enam pekerja mengalami luka bakar serius. Selain itu pada 2016 terjadi ledakan pipa di kolam air panas (brine water) unit 9 yang menyebabkan setidaknya 14 orang mengalami luka serius.

Pengalaman warga setempat di sekitar pembangkit yang menghadapi gas meledak, pipa meledak, dan kebocoran gas beracun ini membuat mereka trauma. Sepanjang hidupnya mereka akan berdampingan dengan proyek berisiko tinggi. Inilah salah satu alasan mereka menolak ekspansi PT Geo Dipa Energi membangun proyek baru bernama Dieng 2.

Upaya Menjaga Mata Air Sethulu

Sekarang ini salah satu titik perlawanan warga Dieng di sekitar pembangkit panas bumi adalah mata air Sethulu. Rencananya, 300 m dari mata air ini, akan ada pengeboran sumur untuk proyek Dieng 2.

Saya mendatangi mata air Sethulu dengan melewati beberapa petak lahan lalu berjalan di atas dataran cukup curam. Tiba di aliran sungai kecil lalu menuju titik mata air, saya harus melewati bebatuan penuh lumut yang licin dan tertutup alang-alang. Saya pikir debit air Sethulu besar, ternyata hanya beberapa tetesan dari rembesan tanah padas yang menjulang dipenuhi tanaman liar. Saya mencicipi airnya. Rasanya menyegarkan dan tak berwarna. Tempatnya sejuk dan lembab dan sunyi.

Namun, mata air ini menjadi sumber kehidupan warga Desa Bakal dan sebagian warga Karangtengah, juga mengairi ribuan hektare lahan pertanian dan memasok air bersih untuk desa sekitarnya seperti Desa Condongcampur dan Gembol. Desa-desa ini terletak di Banjarnegara, bagian dari kawasan Dieng.

Rumah Edi Syukur, warga Bakal berumur 58 tahun, berada sekitar 500 m dari mata air tersebut. Edi menyebutnya berjarak 400 paralon. “Kalau untuk kebutuhan harian, pipa peralon langsung dialirkan ke rumah, tapi untuk pertanian biasanya ditampung dulu di kubangan, terus disedot pakai mesin,” ucapnya.

Peralon-peralon yang menyambungkan mata air Sethulu ini dirawat oleh salah satu warga dengan membayar Rp100 ribu per tahun, yang biasanya diberikan jelang Idulfitri. Edi khawatir jika suatu saat debit mata air Sethulu akan habis tersedot pengeboran geotermal. “Kalau bisa, jangan sampai hal itu terjadi. Tapi jika proyeknya melebar, bisa aja,” katanya.

Dafiqul Fariq, pemuda Bakal, bersama teman-teman sebayanya berusaha menjaga mata air Sethulu dan sumber penghidupan lain dari perluasan proyek geotermal Geo Dipa.

Tergabung dalam Perpustakaan Rakyat Bakal, anak-anak muda Bakal menggelar berbagai kegiatan komunikasi dan edukasi. Selain untuk literasi, kelompok ini memproduksi film dokumenter tentang sejarah Desa Bakal. Mereka telah menghasilkan tiga karya dokumenter, termasuk film yang mengangkat tema lingkungan serta menyoroti kerusakan hutan di kawasan pegunungan Dieng. “Film ini bercerita tentang hutan di Dieng yang makin berkurang dan kondisi air yang tercemar,” ujar Dafiq.

Dafiq menghawatirkan kondisi Dieng yang kian tak nyaman, juga kondisi lingkungannya terancam hancur, salah satunya terkait pengeboran panas bumi. “Jangan sampai mata air Sethulu nanti tercemar dari proyek pengeboran panas bumi,” katanya.

Kelompok ini menggelar Sethulu Festival. Tahun ini adalah tahun ketiga, yang diadakan 23-27 Agustus 2023. Salah satu kegiatan festival ini adalah slametan banyu berupa pengambilan mata air lalu diguyurkan ke gunung sayur yang telah disiapkan kemudian dibagikan kepada masyarakat. Festival juga mengadakan pengajian lingkungan dan panggung rakyat.

“Kita mungkin kalah dalam pembangunan, tetapi kita menang dalam kondisi masyarakat. Insyaallah, masyarakat tetap mendukung gerakan kita,” ucapnya.

Perlawanan di Karangtengah

Di antara ladang pertanian dan rumah-rumah warga, berlatar lanskap bukit semarak hijau dan berselimut dingin, pipa-pipa besi berdiameter 40 cm, yang mengalirkan uap panas dari tapak sumur bor menuju turbin pembangkit, malang-melintang di Desa Karangtengah.

Desa ini telah lebih dulu berteman dengan pembangkit panas bumi sejak PLTP Dieng 1 beroperasi pada 2002. Pagar lokasi pengeboran berdampingan dengan rumah warga. Cerobong-cerobong asap menyembul di dekat lahan pertanian warga. Suara meraung dari proyek pengeboran terdengar sepanjang hari. Pada salah satu puncak perlawanannya, desa ini semarak dengan poster, baliho, dan mural yang dipasang di beberapa titik dan sudut strategis, yang menyuarakan perlawanan.

Dalam pertemuan di Balai Desa Karangtengah, Oktober 2022, yang dihadiri penjabat Bupati Banjarnegara dan perwakilan PT Geo Dipa Energi, warga tetap gigih menolak proyek geotermal Dieng 2. Perlawanan ini sempat berhasil menyetop pembangunan wellpad 38, bagian dari rencana PLTP Dieng 2, di Desa Karangtengah.

Seorang warga Karangtengah bernama Rahma, 44 tahun, masih konsisten menolak proyek geotermal. Salah satu alasannya adalah pengalaman traumatis.

Ia mengisahkan seorang petani bersama anaknya sepulang dari ladang, terpentak sejauh 25 m karena ledakan pipa proyek geotermal yang dilewatinya. Warga pun takut menolong karena di area itu adalah gas beracun. Selain itu, di sisi tenggara desa, ada wellpad 9. Saat sumur ini beroperasi, atap rumah warga dari seng mudah berkarat, padahal sudah dilumuri aspal cair, kata Rahma.

Tak hanya itu, kualitas air di dukuh Pawuhan menjadi asin. “Saat itulah kami mulai menolak proyek PLTP Dieng berdasarkan kejadian yang kami rasakan,” ujarnya.

“Jika listrik itu untuk masyarakat, kenapa di jalan-jalan desa gelap? Padahal bersebelahan dengan pembangkit listrik,” protesnya. Benar saja, sepanjang 500 m dekat kantor PT Geo Dipa Energi tampak gelap, hanya lampu di area sumur pengeboran yang menyala. Terlihat asap putih tebal membumbung dari cerobong di atas kampung Karangtengah.

“Kalau dibayangkan rasanya ngeri. Listriknya banyak tapi alamnya rusak,” kata Rahma. Berdasarkan pengalaman dari PTLP Dieng 1 inilah warga mulai mengumpulkan cerita dan dampak terhadap air, udara, serta kejadian kecelakaan kerja dan ledakan, selama mereka berteman dengan pembangkit panas bumi sepanjang 20 tahun.

Dari dokumen pengalaman itulah warga menolak proyek PLTP Dieng 2. “Untuk memperkuat penolakan, akhirnya warga muter-muter mencari bahan cerita dari desa-desa yang menjadi ekspansi power plant Dieng unit 1,” kata Iqbal Alma dari Walhi Jawa Tengah.

Menurut Iqbal, sejak beroperasi, PT Geo Dipa memanfaatkan ketidaktahuan warga untuk memuluskan geotermal. Saat ini ada kesadaran warga bahwa proyek ini mengancam lingkungan dan kehidupan mereka. “Ini bukan energi baru berkelanjutan, tapi dampak baru yang berkelanjutan,” katanya.

Proyek geotermal digadang-gadang mengurangi krisis global, tapi tambah Iqbal, “malah memperparah krisis lokal.” Rahma berkata mayoritas warga Karangtengah masih menolak, “tapi sekarang enggak lagi frontal karena ada ketakutan.” Ketakutan itu, tambahnya, adalah warga takut dicap melawan “proyek negara.” Mengelola Lahan 100 Ha

Berdasarkan keterangan Agus Supriyanto, Head of Corporate Communication and Social Performance Division PT Geo Dipa Energi, saat ini perusahaan mengelola lahan sekitar 100 ha. “Jumlah ini termasuk penggunaan untuk power plant, pad (sumur), kebutuhan kantor, gudang, lahan kosong, jalur pipa, dan jalan inspeksi yang juga dimanfaatkan masyarakat,” katanya dalam jawaban tertulis saat dikonfirmasi serat.id pada 24 Agustus 2023.

Perusahaan, tulisnya, telah memberikan bonus produksi kepada pemerintah daerah. “Penggunaan bonus produksi ini diprioritaskan untuk masyarakat yang berada paling dekat dengan proyek atau kegiatan perusahaan panas bumi. Angka ini terus meningkat hingga berkisar lebih dari Rp2 miliar pada 2022,” ujar Agus.

Agus mengklaim bahwa perusahaan telah “membantu dalam penyerapan tenaga kerja lokal, juga pemberdayaan ekonomi lokal dengan pelibatan perusahaan-perusahaan sebagai kontraktor pemasok barang dan jasa” dalam proyek geotermal di Dieng.

Geo Dipa melakukan tanggung jawab sosial perusahaan berupa “perbaikan jalan Dusun Pawuhan di Desa Karangtengah dan Desa Pranten, pembangunan gerbang sekolah SDN 2 Karangtengah, perbaikan tempat ibadah di Desa Karangtengah, pembangunan senderan saluran air di Desa Karangtengah,” tulis Agus.

Geo Dipa juga mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti tempat pengolahan sampah Bukit Sugih Lestari, UMKM Seni Mekar Kancana Dwi Raksa dan Multimedia Jorjoran, serta program Sinergi Kopi Sugihmukti. Selain itu, tulisnya, perusahaan telah menyalurkan bantuan sembako gratis sebanyak 5.150 paket dan santunan kepada 110 anak yatim untuk masyarakat di 12 desa di sekitar wilayah kerja produksi Dieng pada 2022. “Dari sisi pendidikan, kami juga punya program beasiswa inspiratif Geo Dipa yang ditujukan bagi 30 pelajar SMA/SMK/MI dari 6 desa yang masuk kategori keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun yang sama,” tambah Agus.

Pendekatan-pendekatan itu adalah salah satu upaya perusahaan membangun kepercayaan warga sekitar Dieng terhadap proyek panas bumi yang dikelola PT Geo Dipa Energi.

Agus berkata sebesar 40 persen potensi panas bumi dunia ada di Indonesia. Maka dari itu, pembangkit listrik panas bumi merupakan salah satu bagian penting dari roadmap transisi energi di Indonesia. “Karena panas bumi yang dihasilkan secara alami akan terus ada,” tambahnya.

Dan pembangkit listrik panas bumi, lanjutnya, adalah sumber energi bersih dan ramah lingkungan. Dari segi lahan, tambahnya, “pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya membutuhkan 1-8 ha lahan per MW, sedangkan 5-10 ha dan 19 ha diperlukan per MW untuk nuklir dan batubara.”

Agus menerangkan bahwa cara kerja PLTP Dieng menyedot uap panas dari perut bumi hingga kedalaman 1.500-3.000 m, dengan mengebor melalui sumur-sumur lalu dialirkan lewat pipa-pipa besi menuju turbin pembangkit. Sisa uap yang sudah mendingin dikondensasi menjadi air dan disalurkan lagi ke dalam perut bumi untuk menjaga keberlanjutan sumber panas bumi.

“Dari siklus itu dapat terlihat kebutuhan PLTP atas pelestarian hutan dan lingkungan,” katanya. “Karena PLTP membutuhkan penyerapan air secara alami untuk menjaga reservoir penghasil panas bumi,” ucapnya.

Merujuk jurnal penelitian Rignis Energi Indonesia, perusahaan konsultan panas bumi, bertajuk “Manajemen Risiko dalam Pengeboran Eksplorasi panas bumi” (2019), pengeboran sumur hingga kedalaman 1.500-3.000 m seperti PLTP Dieng tergolong tipe lubang standar dan besar. Pengeboran tipe ini membutuhkan pasokan air 60-95 liter per detik dan lahan wellpad seluas minimal 7.500 m².

Sementara sumber limbah beracun dan berbahaya serta potensi pencemaran dari pembangkit geotermal di antaranya hidrogen sulfida (H₂S), amonia (NH₃), air raksa (hg), arsen (As), silika (SiO₂), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), karbon dioksida (CO₂), karbon monoksida (CO), dan minyak, berdasarkan sebuah jurnal (2019).

Agus Supriyanto menerangkan saat ini PT Geo Dipa sudah menyelesaikan fasa pemboran PLTP Dieng 2, untuk selanjutnya melakukan uji alir sumur produksi. Selain itu, tambahnya, proyek ini dalam tahap finalisasi dokumen pembangkit listrik. Sekalipun begitu, pemuda Dieng seperti Dafiq terus melawan ekspansi bisnis Geo Dipa tersebut.

Dafiq menekankan bahwa masyarakat Bakal tetap menjaga mata air Sethulu, Sidandang, dan Siranti dari kerusakan lingkungan. Sebab, mata air adalah warisan leluhur yang patut dijaga sampai kapan pun.

“Kita tidak ada upaya untuk melawan negara, tetapi kita akan mempertahankan sumber kehidupan dari keserakahan atau kerusakan yang mengancam mata air,” kata Dafiq.



Konflik Agraria di Rawa Pening, Patgulipat Patok Negara-Tentara di Tanah Rakyat

oleh KAJI JATENG (Kolaborasi Jurnalis Investigasi Jawa Tengah)

SUATU siang September 2021, Joko Susanto kaget saat ibunya, Sri Pontiah, berteriak memanggilnya lantaran ada delapan orang asing memasuki pekarangan belakang rumahnya. Rumah mereka berada di RT 1 RW 3 Baan, Kelurahan Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.

Empat orang itu memakai seragam TNI, empat lainnya berpenampilan seperti pekerja bangunan. Joko semakin kaget saat rombongan itu membawa patok semen bertuliskan “BBWS Pemali-Juana bekerja sama dengan Kodam IV/Diponegoro”.

Patok berwarna kuning cerah itu ternyata hendak ditanam di belakang rumahnya. Patok itu bernomor SPN 025 dengan keterangan ‘Patok Batas Sempadan Danau Rawa Pening tahun 2021 Desa Asinan, Kecamatan Bawen’. Tulisan lainnya: ‘Milik Negara, Dilarang Merusak’.

“Saya dan ibu marah kepada mereka. Saya tidak izinkan [mereka] pasang patok di tanah saya. Mereka akhirnya tidak jadi memasang,” ujar pria 43 tahun ini.

Muasal pemasangan patok ini berasal dari pemerintah pusat, melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana yang melaksanakan

proyek perluasan Rawa Pening. Proyek ini masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) pemerintahan Joko Widodo.

Danau Rawa Pening dimasukkan dalam 15 danau prioritas di Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, yang diteken Jokowi pada 22 Juni 2021. Perpres ini adalah kelanjutan dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) No. 365 Tahun 2020 tentang Batas Sempadan Kawasan Rawa Pening dalam Penanganan Sedimentasi di Danau Rawa Pening.

Proyek ini dimulai dengan pemasangan 109 patok yang melingkari 14 desa di empat kecamatan di kawasan Rawa Pening. Total area permukiman yang dipatok seluas sekira 300 hektare yang akan berdampak terhadap 2.000 keluarga, termasuk keluarga Joko.

Rumah Joko seluas 120 meter persegi terancam hilang manakala proyek itu direalisasikan. Padahal rumah dan tanah Joko memiliki sertifikat hak milik. Tanahnya merupakan warisan keluarganya turun-temurun lebih dari 100 tahun silam.

“Rumah Mbah saya saja usianya 120 tahun, rumah warisan ibu 70 tahun, kami itu warga pribumi di sini, jauh sebelum Indonesia merdeka,” kata Joko, geram. “Namun, mereka tiba-tiba datang pasang patok dengan alasan menitip, menuduh kami serobot tanah negara.”

Kepmen PUPR No 365 menyebut luas Rawa Pening 2.387 ha dan luas sempadannya mencapai 120 ha, sedangkan menurut keterangan Bupati Kabupaten Semarang, Ngesti Nugraha menyebut luasan badan danau Rawa Pening adalah 1.516 ha.

Artinya, pemerintah berambisi memperluas Rawa Pening hingga 991 ha, yang dampaknya adalah tumpang-tindih dengan area permukiman dan lahan produktif warga, yang sebagiannya sudah bersertifikat hak milik.

“Hal itu jadi tanda tanya kami, kok luasan Rawa Pening jadi segitu? Jika penyelesaian seperti ini, kami seperti ingin dibuang begitu saja,” protes Joko, yang dikenal di lingkungannya sebagai sekretaris Perhimpunan Petani Nelayan Rawa Pening, komunitas warga yang menentang proyek perluasan Rawa Pening. Warga juga memprotes titik elevasi air yang jadi landasan BBWS Pemali-Juana memperluas Danau Rawa Pening.

BBWS Pemali-Juana telah melakukan pematokan yang diklaim sebagai titik ketinggian air yang pernah terjadi, yang berjarak sekitar 500 m dari rumah Joko. Pemasangan patok warna biru itu dilakukan pada Agustus 2021.

Keputusan Menteri PUPR No. 365/KPTS/M/2020 menyebut garis sempadan danau Rawa Pening berjarak 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi dengan elevasi +463,3 m.

Sebaliknya, kata Joko, titik tertinggi elevasi air, berdasarkan pengamatan warga di pintu air Jembatan Tuntang, di angka 462,90 m di atas permukaan laut (mdpl). Persisnya berada di sisi utara rel kereta api atau di perbatasan Dusun Baan dan Sumurup, Desa Asinan.

“Air memang pernah sampai di titik tersebut, tetapi itu dulu pada 1995,” kata Joko. “Kondisi danau kala itu sedang tidak sehat, yakni Rawa Pening dipenuhi eceng gondok, keramba, dan sampah. Semuanya menumpuk di situ, tapi paling parah akibat eceng gondok.” Dalam situasi saat ini, Joko tidak menolak revitalisasi Rawa Pening. Sebaliknya, warga hanya menolak perluasan danau, katanya.

Menurutnya, solusi atas persoalan Rawa Pening bukan memperluasnya, tapi harusnya berfokus pada sedimentasi terlampaui tinggi. Sebagai gambaran, dasar Danau Rawa Pening dahulu bak mangkuk cekung, sekarang menjadi piring datar.

“Masalah utamanya di situ, tak heran Rawa Pening meluap. Sedangkan pengukuran (elevasi air) Rawa Pening dilakukan saat sakit atau ketika banyak persoalan seperti banyak tumbuh eceng gondok,” jelas Joko.

Akal-akalan Sosialisasi Pematokan

Joko Susanto berhasil mengusir tentara-tentara Kodam Diponegoro dari pekarangan rumahnya saat itu. Namun, lebih banyak warga yang takut sehingga pematokan itu terjadi.

Itu terjadi pada Juweni, warga Dusun Rowokasam, Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru. Ia sempat menanyakan pemasangan patok itu kepada perangkat desa setempat, tapi dijawab tidak tahu.

“Pemasangan patok dilakukan dengan cepat dan dikawal tentara dari

Kodam IV/Diponegoro. Warga merasa terintimidasi karena yang mematok petugas berseragam,” kata pria 63 tahun ini. “Jadi mayoritas warga enggak berani bertanya atau menegur.”

Problem utamanya saat itu tidak ada sosialisasi kepada warga. Polanya, tentara-tentara datang bersama orang-orang berpakaian sipil, lalu memasang patok semen bertuliskan ‘Milik Negara, Dilarang Merusak’. Lama-lama, “muncul gejala di masyarakat,” kata Juweni.

Kasak-kasuk memunculkan kecemasan. Barulah, setelah pemasangan patok yang berlangsung hampir tiga bulan rampung, warga menerima surat undangan sosialisasi. Undangan itu menyasar sejumlah desa di empat kecamatan, yakni Ambarawa, Banyubiru, Bawen, dan Tuntang. Sosialisasi bertajuk ‘Pengembalian Revitalisasi Rawa Pening’ digelar pada November 2021 di dua lokasi, masing-masing lokasi mengundang warga terdampak dari dua kecamatan.

Selepas menerima sosialisasi, warga tetap tidak mendapatkan keterangan jelas. Mereka malah kebingungan dengan status tanah mereka yang dianggap “bagian dari Danau Rawa Pening.”

“Kalau air dari Danau Rawa Pening masuk ke sawah kami, ya sertifikat sawah kami ada,” tegas Juweni. “Masak juga dianggap bagian dari danau?” Juweni mencari informasi lebih jelas. Tapi justru semakin bingung. “Katanya tanah kami yang masuk patok itu disebut status quo. Kemudian proyek pematokan ini bagian dari revitalisasi Rawa Pening.”

Dalam sosialisasi yang menghadirkan pihak BBWS Pemali-Juana, Kodam Diponegoro, dan Polri itu, warga dijanjikan akan mendapatkan “surat penitipan patok”. Surat semacam ini akan diterima warga yang membolehkan tanah dan propertinya dipasang patok. Diberi janji seperti itu, Joko Susanto menerima tanahnya ditanam patok, meski dengan perasaan terpaksa, setelah lima hari dari sosialisasi di Kampung Rawa. Begitupun warga lain yang menentang pematokan; mereka menerima tanahnya dipasang patok.

Namun, setelah seluruh pekerjaan pematokan beres, warga tak pernah menerima “surat penitipan patok” itu. Para pejabat dan aparat keamanan ternyata mengibuli warga.

Bukan Revitalisasi Lagi, Melainkan Perluasan Rawa Pening

Meski Kepmen PUPR No. 365/KPTS/M/2020 mengatur Batas Sempadan Kawasan Rawa Pening dalam Penanganan Sedimentasi di Danau Rawa Pening, di lapangan, pihak BBWS Pemali-Juana dan Kodam Diponegoro mengenalkannya ke masyarakat sebagai “revitalisasi Rawa Pening.”

Asal-mulanya adalah keinginan bersama, yakni mengembalikan fungsi Rawa Pening seperti semula. Danau Rawa Pening yang semula mangkuk kini telah berubah menjadi piring. Sedimentasi membuat tangkapan air di danau itu berkurang jauh dari sebelumnya. Selain persoalan sedimentasi, masifnya pertumbuhan eceng gondok membuat danau itu kritis.

Berlatar belakang itulah, perwakilan warga sekitar Danau Rawa Pening, yang tergabung dalam Paguyuban Sedyo Rukun, diundang pada Konferensi Nasional Danau Indonesia pada 13-15 Agustus 2009 di Sanur, Bali. Lahirlah program revitalisasi terhadap 15 danau yang perlu diselamatkan, termasuk Danau Rawa Pening. Dari situ lahir Kepmen PUPR No.365/KPTS/M/2020.

Dalam beleid ini ada tiga poin umum untuk melestarikan danau: pembersihan eceng gondok; penataan keramba jaring apung, branjang, dan pengerukan sedimentasi; dan penentuan garis sempadan. Kasiyan, Ketua Paguyuban Sedyo Rukun, warga Dusun Klurahan, Kecamatan Tuntang, mengisahkan sebagai bagian dari Forum Rembug Rawa Pening, ia tahu persis permasalahan di danau itu.

Rawa Pening rusak karena sedimentasinya tinggi. Dulu berbentuk cekung, kini jadi rata karena eceng gondok yang melimpah, sementara patok batas tanah provinsi dan tanah desa pun hilang.

“Kami persoalkan itu, bahwa Rawa Pening kritis. Eceng gondok menutupi hampir 60% danau,” katanya. Berbagai persoalan itu dibahas dalam pertemuan Forum Rembug Rawa Pening yang melibatkan kepala dinas terkait serta kelompok tani dan nelayan di kawasan Rawa Pening dan sepanjang Sungai Tuntang, yang membentang dari Kabupaten Semarang, Grobogan hingga Demak.

“Petani di Demak dan Grobogan dilibatkan karena aliran air dari danau itu melintasi beberapa kabupaten,” jelasnya.

Kemudian, Kasiyan diutus mengikuti Konferensi Danau Internasional ke-1 pada 2009. Ada perwakilan dari daerah dari sekitar 135 danau. Di konferensi itu, ia mengusulkan pentingnya revitalisasi Danau Rawa Pening.

Kasiyan menjelaskan ada sembilan menteri sepakat bahwa Danau Rawa Pening direvitalisasi dengan dana pusat, dibiayai pada 2020-2021. “Kami 100% mendukung revitalisasi. Warga tidak ada yang menolak,” ujarnya. Namun, dalam pelaksanaannya, ternyata berbeda.

Paguyuban mengusulkan misalnya, dalam pembersihan eceng gondok disisakan 15% karena dapat berfungsi sebagai filter air, tempat berteduh ikan dan perlindungan nelayan kalau ada angin dan ombak. “Ternyata semua dibersihkan. Ya, sudah. Enggak masalah karena paling 1-2 tahun akan tumbuh lagi,” katanya.

Dan, memasuki tahun 2020 saat “revitalisasi” berjalan, Kasiyan kaget saat patok batas sempadan justru memasuki area pemukiman warga. Ia sadar bahwa penetapan batas sempadan itu tak bisa dilepaskan dari patok batas air yang dinilai ya serampangan.

“Acuan air tertinggi itu dianggap acuan. Air saat meluap itu, saat musim hujan meluap, jadi air yang sudah rata itu masuk ke persawahan dan dianggap [sebagai] Rawa Pening. Itu dianggap acuan batas air, dan ditarik 50 meter jadi batas sempadan,” katanya.

Ia berkata warga sebenarnya tak memperlumahkan revitalisasi Rawa Pening asalkan untuk mengatasi masalah sedimentasi. Tapi, kenyataan di lapangan, dengan pemasangan patok yang masuk ke sawah dan rumah warga, maka alih-alih untuk “revitalisasi”, proyek ini justru menjadi perluasan Rawa Pening.

“Ini bukan revitalisasi lagi, melainkan pemekaran Danau Rawa Pening. Sebab, pemasangan patok batas danau itu masuk ke perkampungan,” kata Kasiyan. Kini, kalau kita berjalan-jalan di sekeliling Rawa Pening, ada dua jenis patok yang melingkari danau. Patok biru dan patok kuning.

Patok biru merupakan patok batas badan air Danau Rawa Pening. Lokasinya di sawah atau lahan warga yang berjarak lebih dekat ke bibir danau.

Sementara patok kuning di antaranya berada di jalan kampung hingga di dalam rumah warga. Jumlah patok kuning yang mencapai 109 titik ini

tersebar di empat kecamatan. Pemasangan patok kuning dihitung dari 50 meter dari patok biru.

Patok biru dan kuning itu merupakan wujud pelaksanaan Kepmen PUPR No. 365/KPTS/M/2020. Pada poin ke-4 ayat A angka 1 keputusan itu menyebut: “Bangunan yang terdapat pada Sempadan Danau Rawa Pening dan didirikan berdasarkan izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo.”

Kemudian, “bangunan yang dinyatakan sebagai status quo” disebut “secara bertahap akan ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan danau.” Perintah berikutnya: yang dimaksud “aturan status quo” adalah “bangunan yang berada di sempadan tidak boleh diubah, ditambah, ataupun diperbaiki.”

Kepmen PUPR No. 365/KPTS/M/2020 mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Di dalamnya disebutkan bahwa “batas garis sempadan danau ditentukan paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi badan danau.”

Artinya, merujuk ketentuan itu, rumah-rumah dan lahan-lahan produktif warga yang diklaim BBWS Pemali-Juana melanggar garis sempadan Danau Rawa Pening, maka akan terancam digusur atau dimusnahkan.

Keterlibatan Kodam IV/Diponegoro

Keterlibatan militer dalam proyek revitalisasi Rawa Pening tidak dibantah oleh Kodam IV/Diponegoro. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IV Diponegoro Kolonel Inf Richard Harison menyebut keterlibatan TNI dalam proyek revitalisasi Rawa Pening meliputi pembersihan eceng gondok, pengerukan sedimentasi, dan pemasangan patok batas sempadan.

Keterlibatan itu tertuang dalam perjanjian kerjasama (PKS) No Kerma/13/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021. Perjanjian ini merupakan turunan dari kerja sama antara Mabes TNI AD dan Kementerian PUPR.

Turunan pelaksanaannya di tingkat Kodam, dalam hal ini dengan BBWS Pemali-Juana.

“Kerja sama itu jelas. Ada permintaan dari Kementerian PUPR,” kata

Kolonel Inf Richard Harison di kantornya kepada Tim Kolaborasi, 22 November 2023.

Klausul dalam perjanjian itu menyebut, di antaranya, pemasangan patok batas sempadan. Pemasangan patok inilah yang membuat masyarakat resah karena ditanam di tanah milik warga yang bersertifikat hak milik. Warga tak berani mengotak-atik patok itu karena terdapat logo TNI.

Richard berkata pemasangan patok itu memang dilakukan oleh pihaknya dengan mencantumkan logo TNI. Namun, pemasangan patok itu hanya sebagai bukti kerja sama antara TNI dan BBWS.

“Patok itu dari kami yang membuat. Patok itu sebagai bukti kerja sama sudah dilakukan. Semisal kami tidak menyelesaikan pekerjaan itu juga salah karena sudah ada perjanjian kerjasamanya,” ujarnya.

Ia berkata pemasangan patok juga melibatkan instansi lain. Hanya saja, untuk penentuan titik pemasangan patok berdasarkan dari data Kementerian PUPR. “Masyarakat tahunya (patok) punya TNI, makanya TNI selalu disalahkan,” ucapnya. Terkait jumlah pelibatan personel dan anggaran untuk pematokan, ia tidak dapat menyebut detail jumlahnya. “Untuk personel yang jelas banyak,” ungkapnya.

Ketika disinggung pemasangan patok menimbulkan permasalahan di masyarakat, ia berkata itu bukan ranah lembaganya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebaliknya, persoalan itu berada di ranah pemerintah maupun wakil rakyat.

“Tugas kami hanya pasang patok. Ketika ada permasalahan apa pun, ada jenjangnya. Silakan duduk bareng, misal mau ubah, penghitungan ulang, kami siap,” katanya.

‘Tergantung Situasi Jakarta’

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang Arif Zayin mengungkapkan batas sempadan air Danau Rawa Pening masih menjadi perdebatan. Dulu, luas danau sekitar 1.000 ha. Akan tetapi, “ukuran terakhir menurut PUPR menjadi hampir 2.000 ha. Ada tambahan sekitar 900-an ha,” ujarnya.

Zayin berkata pematokan itu dilakukan begitu mudah dengan perhitungan berdasarkan kuantum dan proyek satelit, sehingga memunculkan konflik di masyarakat.

Ia menjelaskan rencana awal memang ada perluasan lahan, kemudian ada penolakan dari warga karena tanah mereka sudah bersertifikat. “Sertifikatnya sudah ada sejak tahun 1950-an dan warga sudah membayar pajak,” tandasnya.

“Yang menjadi pertanyaan adalah tanah-tanah ini mau dimatikan. Ini, kan, sudah menjamah tanah adat, tanah rakyat yang sudah bersertifikat serta tanah negara yang bisa jadi milik desa, milik pemerintah kabupaten,” ucapnya.

Atas permasalahan itu, masyarakat sekitar Rawa Pening beberapa kali mengadu ke Pemerintah Kab. Semarang, DPRD Kab. Semarang, DPRD Jawa Tengah, Gubernur Jateng saat itu Ganjar Pranowo, dan instansi terkait.

“Kami fasilitasi. Kami undang bersama stakeholder. Baik Badan Pertanahan Nasional, BBWS Pemali-Juana dan Dinas PUPR. Kami dipimpin oleh bupati dan Ketua DPRD,” ucapnya.

Setelah pertemuan itu, menurut Zayin, semua clear. Tanah-tanah yang sekarang dimiliki masyarakat tetap menjadi milik mereka. Nantinya, tanah itu kembali pada luasan semula.

“Patok kuantum itu kemungkinan besar tidak dipakai lagi. Tapi, belum ngerti tergantung situasi Jakarta,” katanya.

Ia juga mengakui bahwa pematokan tanah warga itu dikerjakan tentara. Menurut Zayin, tentara hanya menjalankan mandat. “Kalau soal anggarannya berapa, saya tidak tahu. Tapi itu sudah menjadi Proyek Strategis Nasional, pasti akan jalan,” ujarnya.

Sementara Bupati Semarang Ngesti Nugraha berkata masih menugayakan revisi Kepmen PUPR No. 365 Tahun 2020.

Usulan revisi ini, katanya, sudah diajukan dengan tujuan untuk mencari titik temu antara luasan Rawa Pening versi Kepmen dengan Perda RTRW Kabupaten Semarang No. 6 Tahun 2023 dan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 16 Tahun 2019.

Dalam Kepmen, luasan Danau Rawa Pening 2.387 ha, ditambah garis sempadan seluas 120 ha, sehingga menjadi 2.587 ha. Sementara dalam Perda RTRW Kab. Semarang dan Perda Provinsi Jawa Tengah, luasan Danau Rawa Pening 1.516 ha. Ada selisih 991 ha.

“Kami mengusulkan melalui Gubernur Jateng untuk dilakukan revisi Kepmen No 365, supaya masyarakat nyaman,” kata Ngesti Nugraha pada 10 November 2023.

Mnurutnya, usulan revisi luasan danau Rawa Pening ke Kementerian PUPR merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti pematokan garis sempadan di lahan warga. Ia meminta warga jangan menggeser atau mengambil patok.

“Dengan mengusulkan revisi Kepmen, otomatis nanti luasannya makin kecil (sempit). Patok itu tetap digeser tapi setelah Kepmen direvisi. Target selesai revisi menunggu perkembangan dari Kementerian PUPR,” ucapnya.

Diakuinya, proyek revitalisasi Rawa Pening sepenuhnya dilakukan BBWS Pemali-Juana. Hanya saja ia meminta BBWS melibatkan pihaknya dalam sosialisasi ke masyarakat agar kondisi tetap kondusif.

“Begitupun soal titik elevasi yang tadinya +463,3 sudah disepakati di titik +461,3 supaya masyarakat bisa nyaman bercocok tanam,” ungkapny.

BPN Tidak Dilibatkan

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Badan Pertanahan Kabupaten Semarang, Tri Susanto, berkata BBWS Pemali-Juana tidak pernah memberitahu BPN mengenai pematokan lahan di kawasan Danau Rawa Pening.

Meski begitu, BPN mengetahui ada selisih 871 ha antara data Kementerian PUPR dan Perda Jateng mengenai luas Danau Rawa Pening. “BPN disuruh mendata. Berdasarkan pendataan kami, hasilnya ada tanah milik Provinsi Jateng sebanyak 15 bidang seluas 69,5 ha,” kata Susanto.

Selain itu, ada tanah milik Pemkab Semarang sebanyak 32 bidang seluas 6,8 ha, tanah milik pemerintah desa 229 bidang seluas 125 ha; tanah milik BUMN PT Kereta Api Indonesia seluas 2,3 ha. Dan, yang terbanyak, tanah masyarakat sebanyak 4.292 bidang seluas 556 ha.

“Tanah seluas 871 ha milik Pemprov, desa, pemerintah kabupaten, BUMN, dan masyarakat itu yang menjadi masalah,” ujarnya. Ia menjelaskan tanah milik masyarakat bersertifikat yang dipatok ada 1.690 bidang seluas 220 ha, sementara tanah yang belum bersertifikat sebanyak 2.602 bidang seluas 336 ha.

Susanto juga menceritakan BBWS Pemali-Juana pernah mengirim surat kepada Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah tentang “pemetaan tanah musnah” pada 9 September 2021 dengan nomor surat SA05.03- A0/726.

Dalam surat itu, kata Susanto, BPN menolak secara tidak langsung pendekatan “tanah musnah”, melainkan menyarankan agar penanganan Danau Rawa Pening menggunakan pendekatan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Kepada Tim Kolaborasi Jurnalis Investigasi Jawa Tengah, Susanto membacakan hasil rapat Asisten 1 Pemprov Jateng yang dihadiri Bupati Semarang, Kepala BBWS Pemali-Juana, dan BPN pada 19 Mei 2022.

“Intinya, pertama, tidak mengakomodir tanah musnah tapi berkomitmen dengan mekanisme pengadaan tanah sesuai UU No. 2 Tahun 2012. Kedua, mengakomodir revitalisasi sampai luas 2.387 ha. Ketiga, perlu komunikasi yang harmonis. Keempat, BPN melakukan inventarisasi dan identifikasi, hasilnya digunakan untuk perencanaan pengadaan tanah,” jelasnya.

Untuk situasi sekarang, katanya, tanah yang sudah dipatok BBWS Pemali-Juana masih tetap milik masyarakat. Dan warga bisa saja melakukan balik nama atau melakukan pensertifikatan tanah, tambahanya. “Tapi memang ada surat keberatan dari BBWS Pemali-Juana, tetap kami pertimbangkan. Ini, kan negara, kita wakil negara, masak tidak bisa diobrolkan?”

Adapun surat keberatan BBWS Pemali-Juana itu tertulis dalam surat nomor SA05.03- A0/50615 tanggal 15 maret 2023.

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Kabupaten Semarang, Nanang Suwasono, berkata bahwa pematokan bukan ranah BPN. “Saya melihat hanya miskomunikasi. Tidak ada keterbukaan. Padahal, keterbukaan itu perlu. Kami tidak diajak rembugan soal pematokan,” katanya.

Memang ada permintaan dari BBWS Pemali-Juana bahwa lahan itu menjadi “tanah musnah”. “Tapi, kami tidak pernah menyarankan sebagai tanah musnah,” tegasnya.

BBWS Pemali-Juana Klaim Warga Setuju

Aksi pematokan, sosialisasi yang dipaksakan, dan informasi yang simpang siur, yang diterima warga di kawasan Rawa Pening selama dua tahun terakhir, telah bikin risau masyarakat. Meski begitu, BBWS Pemali-Juana mengklaim “tidak tahu” ada gejolak di lapangan dengan alasan masyarakat terdampak pematokan sudah menyetujuinya.

“Kami ada dokumentasi dan bukti bahwa masyarakat menerima. Program ini adalah bagian dari revitalisasi Danau Rawa Pening yang punya banyak kepentingan untuk masyarakat di hulu dan hilir,” klaim Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air (PJSA) BBWS Pemali-Juana, Mustafa, kepada Tim Kolaborasi pada 14 November 2023.

Mustafa berkata sedimentasi lumpur di Danau Rawa Pening mencapai 778 ton/tahun. Selain itu masifnya pertumbuhan eceng gondok serta banyak keramba apung yang disebutnya “liar”. Hal itu, katanya, harus dikendalikan.

Memakai Perpres No. 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, BBWS Pemali-Juana bekerja sama dengan TNI telah menjalankan proyek revitalisasi Danau Rawa Pening selama empat tahun terakhir, yakni membersihkan eceng gondok, mengatur jumlah keramba apung, dan pemasangan patok kuning dan biru.

“Kenapa [melibatkan] TNI? Karena mereka memiliki massa dan hasilnya sudah kelihatan, eceng gondok berkurang,” katanya. Alasan lainnya, katanya, TNI dianggap “lebih paham komunikasi sosial” di masyarakat. Ia juga mengklaim TNI telah melakukan pendekatan personal ke warga terdekat dengan lokasi pemasangan patok.

“Tapi memang masyarakat beda persepsi, padahal kami sudah menyampaikan beberapa kali ke masyarakat bahwa kami tidak serta merta mengambil hak tanah mereka pasca-pemasangan patok itu. Mereka tetap punya hak berdasarkan sertifikat, tapi batas sempadan itu memang harus ada,” tandas Mustafa.

Herdiana Kusumaningrum, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan 4 dari BBWS Pemali-Juana, menyatakan pemasangan patok memang bekerjasama dengan TNI, dalam hal ini Kodam IV/Diponegoro, dalam bentuk “kontrak swakelola.”

“Nilai proyeknya kami tidak hafal untuk pematokan, sedangkan pembersihan eceng gondok dari tahun ke tahun nilainya berbeda, hanya pada tahun 2023 ini senilai Rp9 miliar,” kata Herdiana.

Ia juga menjelaskan hak milik atas tanah maupun lahan tetap sesuai sertifikat kepemilikan warga, meski sudah dipasang patok. “Patok kuning sebanyak 109 titik itu membentuk suatu batas sempadan. Memang kami memasang dengan TNI. Kades dan kadus (di lokasi pemasangan patok) juga tahu.”

“Tapi, sekali lagi, kami tidak serta merta merampas hak atas tanah itu. Tetap milik mereka,” tambahnya. Apabila ke depan BBWS Pemali-Juana berencana menggunakan tanah-tanah warga yang sudah dipasang patok, ia berkata, akan ada “pembebasan lahan” yang membutuhkan perencanaan dan pendekatan.

'Kita Kena Jebakan Batman'

Dari proyek yang semula membereskan problem sedimentasi, kemudian dikenalkan sebagai "revitalisasi", hingga di lapangan terjadi pematokan dan perluasan Danau Rawa Pening, apabila tetap dilanjutkan dengan mekanisme sekarang, maka potensi konflik agraria yang merampas tanah rakyat di kawasan ini seluas 556 ha yang berdampak terhadap 2.000 keluarga.

Terlebih, warga mendengar selentingan kabar bahwa permukiman dan lahan produktif warga yang sudah dipasang patok akan dianggap sebagai "tanah musnah," artinya tidak perlu ada mekanisme kompensasi atau prosedur "pembebasan lahan". Kabar ini valid sebagaimana isi surat yang dikirim BBWS Pemali-Juana ke Kantor BPN Jateng. Tim Kolaborasi sudah melihat dan membaca isi surat tersebut.

Warga bukannya diam saja. Gejolak itu ada. Warga telah mengadu ke berbagai pihak atas masalah yang bisa mengancam ruang hidup mereka. Mereka telah bertanya kepada BBWS Pemali-Juana, Gubernur Jateng saat itu Ganjar Pranowo, Pemkab Semarang, DPRD Jateng, DPRD Kabupaten Semarang, dan pihak-pihak lain. Joko Susanto bercerita saat perwakilan warga bertanya ke BBWS Pemali-Juana, jawaban yang diterima sekenanya bahwa pemasangan patok untuk perluasan Rawa Pening bukan kapasitas BBWS. "BBWS Pemali-Juana malah menyuruh kami bertanya ke pihak lain," kata Joko.

Saat mendatangi Ganjar Pranowo, warga yang telah menunggu gubernur sejak pagi buta, malah kena marah. "Alasan dia marah karena mengapa urusan ini sampai ke gubernur," ujar Joko. Begitu juga saat menyambangi para wakil rakyat daerah tingkat I dan II, warga tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

"Pemerintah itu pintar. Kami tolak pemasangan patok di tanah kami, mereka lalu membujuk kami supaya tanahnya mau dipatok dengan alasan hanya titip. Setelah patok tertancap, kami tanya surat penitipan patok malah disuruh tanya BBWS, tanya ke BBWS malah disuruh tanya ke Kodam Diponegoro," kata Joko.

"Kami malah diputer-puter. Kita kena jebakan Batman." (*)



Ada Motif Turisme di Balik Proyek ‘Pemekaran’ Danau Rawa Pening

oleh KAJI JATENG (Kolaborasi Jurnalis Investigasi Jawa Tengah)

KASIYAN tak menyangka apa yang dibayangkannya mengenai revitalisasi Danau Rawa Pening untuk mengatasi masalah sedimentasi, justru yang terjadi di lapangan bertolak belakang.

Kasiyan adalah Ketua Paguyuban Sedyo Rukun, yang diutus mewakili komunitas masyarakat itu pada Konferensi Danau Internasional di Sanur, Bali, pada 2009. Ia tak sendiri. Ada perwakilan dari daerah-daerah lain dari sekitar 135 danau. Salah satu pembahasan konferensi adalah menyelamatkan kondisi danau.

Rawa Pening memang dalam kondisi kritis. “Eceng gondok menutupi hampir 60% danau,” katanya. Sedimentasi lumpur telah membuat danau ini yang dulunya berbentuk mangkuk cekung berubah bentuk piring. Maka, ada usulan perlu direvitalisasi.

Rencana itu pun terwujud dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) No. 365 Tahun 2020 tentang Batas Sempadan Kawasan Rawa Pening dalam Penanganan Sedimentasi di Danau Rawa Pening. Proyek ini kemudian didanai pemerintah pusat setelah masuk dalam skema proyek strategis nasional lewat Perpres No. 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, yang ditenken Presiden Jokowi pada 22 Juni 2021.

Di lapangan, proyek ini dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai

(BBWS) Pemali-Juana, di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.

Semula BBWS Pemali-Juana membersihkan eceng gondok, kemudian mengatur jumlah keramba apung. Memasuki tahun 2020, proyek ini memasang patok-patok semen di areal permukiman, rumah, dan sawah warga, yang diklaim sebagai batas sempadan danau. Jumlahnya 109 patok yang tersebar di 14 desa di empat kecamatan, yakni Ambarawa, Banyubiru, Bawen, dan Tuntang, di sekeliling Rawa Pening. “Ini bukan revitalisasi lagi, melainkan pemekaran Danau Rawa Pening. Sebab, pemasangan patok batas danau itu masuk ke perkampungan,” kata Kasian, warga Dusun Klurahan, Kecamatan Tuntang.

BBWS Pemali-Juana melibatkan tentara-tentara Kodam IV/Diponegoro, dalam perjanjian yang disebut “kerja sama swakelola”, untuk menjalankan proyek tersebut di lapangan.

Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air (PJSA) BBWS Pemali-Juana, Mustafa, berkata pihaknya menggandeng Kodam Diponegoro karena hasil kerjanya “efektif.” TNI memiliki sumber daya yang bisa mengerahkan prajurit, sementara dananya dari Kementerian PUPR. “Dulu kami kewalahan membersihkan eceng gondok. Sekarang volumenya berkurang 500 ha atau tersisa 350 ha. Anggaran untuk pembersihan eceng gondok dan penataan keramba pada 2023 sebesar Rp9 miliar. Proyek dengan TNI ini tidak tender,” katanya. “Sebelum 2019, sekitar 80% danau tertutup eceng gondok. Kami kurangi 10%, eh tumbuh lagi. Eceng gondok itu musuh danau,” ujarnya.

Mustafa berkata luas genangan danau mencapai 1.850,10 ha (+463,00) dengan kedalaman sekitar 0,35-10 m atau rerata 2,17 m. Rawa Pening, yang berada di cekungan antara Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran, ini disebutnya mengalami sedimentasi hingga 778,93 ton/tahun. Kedalaman danau pun setiap tahun berkurang sekitar 0,42 m. Dulu kedalaman danau sekitar 10-15 m, sekarang sekitar 3-6 m.

Ia menyebut masalah Danau Rawa Pening tak cuma berkurangnya daerah tangkapan air, tapi juga alih fungsi lahan serta kerusakan hutan dan lahan. Perubahan penggunaan lahan di daerah tangkapan air selama 1991-2009 sebesar 30,43%, menurut data sda.pu.go.id.

“Banyak kawasan industri dibangun di hilir sehingga sedimentasi mengalir ke Rawa Pening,” tambahnya.

Persoalan lain adalah tingkat kemiringan yang curam, membuat material sedimen terbawa arus sungai dengan laju sedimentasi 9,44 mm/tahun. Lalu, ada limbah yang terbawa sungai. Sementara di sempadan danau, ujar Mustafa, ada alih fungsi lahan, okupasi lahan, dan erosi lahan serta terjadi genangan atau banjir antara 1-4 kali setiap tahun.

Padahal, jelasnya, ada 14 sungai yang bermuara ke Danau Rawa Pening dan mengairi lahan pertanian dengan irigasi teknis seluas setidaknya 20.000 ha, melalui Sungai Tuntang yang melintasi Kabupaten Semarang, Grobogan, dan Demak. Air baku Danau Rawa Pening juga dimanfaatkan untuk penggerak turbin PLTA, yakni 750 liter/detik, untuk menghasilkan listrik maksimal 25,5 MW, tambahnya.

“Kami melihat itu harus diselamatkan. Sedimentasi harus dikendalikan, di antaranya dengan membangun cekdam untuk mengendalikan (bangunan pengendali sedimen di palung sungai, menampung sedimen), dan menormalkan sungai agar tidak terjadi limpasan dan genangan,” ujarnya.

Rencana Dijadikan ‘Ikon Pariwisata’

Joko Susanto, warga Kecamatan Bawen, yang halaman rumahnya dipasang patok kuning bertuliskan “BBWS Pemali-Juana bekerja sama dengan Kodam IV/Diponegoro”, tidak menolak revitalisasi Danau Rawa Pening. Sekretaris Perhimpunan Petani Nelayan Rawa Pening ini hanya menolak perluasan Rawa Pening.

Hal sama diungkapkan Kasiyan. Proyek ini seharusnya berfokus mengatasi sedimentasi danau, bukan justru mengancam ruang hidup dan mata pencaharian warga setempat.

Joko juga mendengar, di tengah sosialisasi yang minim, proyek ini menyimpan ambisi pemerintah hendak menjadikan Rawa Pening sebagai ikon pariwisata Jawa Tengah. Bila benar demikian, katanya, tujuan itu bertentangan dengan nilai-nilai lokal di mana warga setempat menggantungkan sumber ekonominya dengan bertani dan sebagai nelayan. “Sumber penghasilan primer warga adalah petani sama nelayan,” katanya.

Informasi soal Rawa Pening bakal dijadikan destinasi wisata setidaknya muncul dari Wakil ketua DPRD Kabupaten Semarang, Arif Zayin,

saat dikonfirmasi Tim Kolaborasi. Zayin berkata Danau Rawa Pening akan dibangun tempat wisata yang merupakan proyek strategis nasional.

Nantinya, katanya, kawasan itu akan dibangun resort-resort dan dilengkapi jalan melingkar di bantaran danau yang dapat dimanfaatkan untuk jogging. Ia membayangkan ada wisatawan yang bermain paralayang dari Gunung Telomoyo lalu mendarat di sekitar Rawa Pening. Dan, wisatawan tinggal di sekitar danau.

“Karena belum ada hotel yang representatif di Kabupaten Semarang sehingga larinya ke Kota Semarang atau Salatiga. Itu harus kita siapkan juga,” kata Zayin pada 18 Oktober 2023.

Ia berkata andai Rawa Pening jadi pusat pariwisata, masyarakat sekitar akan merasakan dampak ekonominya. Masyarakat dapat menjadi bagian inti dari pengelolaan atau “mendapatkan barokah” dari desain Rawa Pening ke depan. “Mari kita desain menjadi alternatif pariwisata yang aman dan nyaman,” imbuhnya.

Proyek Perluasan Rawa Pening Melanggar HAM

Fajar Muhammad Andika dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang berkata revitalisasi Rawa Pening memperlihatkan bagaimana negara gencar membuat banyak proyek berskala nasional yang mengabaikan hak asasi manusia.

Banyak sekali sumber daya agraria milik warga, termasuk pemukiman, dimasukkan ke dalam kurva wilayah sempadan Danau Rawa Pening, ujangnya. Sehingga banyak sekali sawah dan pemukiman yang berpotensi digusur. Pada akhirnya, masyarakat akan kehilangan sumber penghidupan.

“Kalau berkaca dari sejarah Rawa Pening, itu sudah terjadi pada masa kolonial Belanda dengan penghilangan desa karena perluasan Rawa Pening. Di rezim pemerintahan sekarang, pencaplokan desa itu terjadi lagi. Ini semacam neokolonialisme,” katanya.

Andika menyoroti proyek revitalisasi Rawa Pening tidak menaati Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Setidaknya ada dua hal yang tidak dijalankan. Pertama asas kecermatan. Pemerintah mengabaikan wilayah Rawa Pening itu dikelola masyarakat. Kedua asas kebermanfaatan. Pemerintah tidak melihat kebermanfaatan Rawa Pening pada masyarakat setempat untuk keberlanjutan generasi mendatang. Seharusnya negara melihat apakah proyek ini dapat bermanfaat masyarakat atau justru menghilangkan hak-hak masyarakat. “Dalam hak asasi manusia, itu prinsipnya enggak bisa dicabut,” katanya.

Proses revitalisasi Rawa Pening juga telah melanggar etika hak atas tanah dan kepemilikan properti dan hak atas pekerjaan, kata Andika. Ketika hak atas tanah itu hilang, maka berdampak ke hak atas pekerjaan sehingga masyarakat tidak bisa bekerja dengan baik sebagai petani dan nelayan. “Ketika negara melakukan pengabaian terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya, maka negara telah terindikasi melakukan pelanggaran hak asasi manusia,” tambahnya.

Andika juga melihat ada indikasi pelanggaran dalam proyek ini terhadap hak kepemilikan masyarakat atas tanah pemukiman maupun lahan produktif seperti sawah. Padahal, warga sudah memiliki sertifikat hak atas tanah maupun letter C. Hak-hak warga tersebut dijamin konstitusi. “Sumber-sumber agraria yang dikuasai turun-temurun selama 20 tahun itu bisa diajukan sebagai hak milik masyarakat. Dari situ bisa dilihat, negara telah mengakui hak milik pribadi. Namun, saat ini, yang terjadi di Rawa Pening, negara justru mencaplok hak tersebut,” katanya.

Andika juga menilai proses pematokan batas air dan batas sempadan mengabaikan hak atas pembangunan yang prinsipnya partisipatif. Padahal, yang merasakan kebermanfaatan pembangunan itu masyarakat Rawa Pening, bukan pihak luar. “Dalam konteks Rawa Pening, yang diklaim melibatkan partisipasi itu sebenarnya manipulatif. Penguasa mengumpulkan perangkat desa dan dijadikan legitimasi bahwa masyarakat setuju tanah-tanah dan permukimannya dipatok atas nama revitalisasi Danau Rawa Pening,” katanya

Selain itu, keterlibatan tentara-tentara Kodam IV/Diponegoro yang mematok batas air dan batas sempadan sama saja situasinya seperti kembali ke masa otoriter Orde Baru.

Pada 1980-an, pemerintahan Soeharto membangun Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah, didanai oleh Bank Dunia, dengan melibatkan

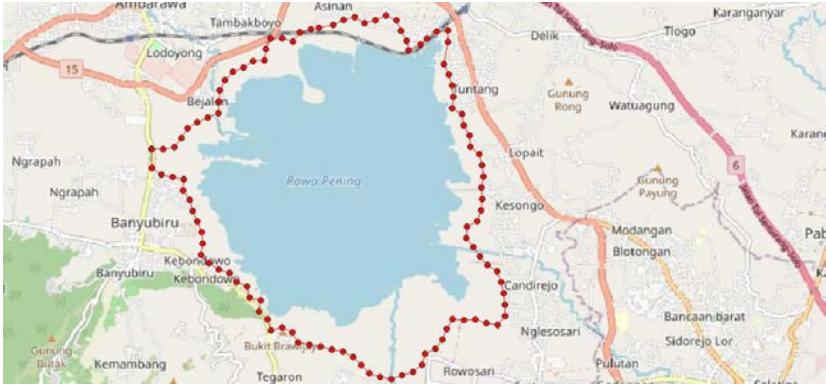
ABRI, yang menenggelamkan puluhan desa dan mengusir lebih dari 5.000 keluarga di Grobogan.

“Sekarang di Rawa Pening, alat kenegaraan TNI dipakai lagi. Akhirnya membuat warga takut dan merasa terintimidasi dan terancam karena yang menjadi tameng adalah alat kenegaraan itu,” kata Andika. Masyarakat seharusnya punya hak atas rasa aman. “Intimidasi tak hanya tindakan fisik secara langsung, tapi termasuk dapat mempengaruhi psikis warga. Apa yang terjadi sekarang di Rawa Pening juga terjadi marak di proyek-proyek strategis nasional lain pemerintahan Jokowi,” katanya.

Bila alasan pemerintah melakukan perluasan Rawa Pening demi untuk kesejahteraan bersama, Andika justru mempertanyakan kesejahteraan untuk siapa. Seharusnya, yang terutama didahulukan demi kepentingan masyarakat sekitar Rawa Pening sendiri.

“Jadi alasan demi kesejahteraan yang diklaim pemerintah itu perlu dilihat ulang. Justru jika sumber daya itu dirampas, kesejahteraan masyarakat yang akan menghilang,” katanya. (*)





Sejarah Permukiman Tanah Rawa Pening, Dihuni Warga sebelum Indonesia Ada

oleh KAJI JATENG (Kolaborasi Jurnalis Investigasi Jawa Tengah)

MATA Kasiyan berkaca-kaca saat menunjuk patok kuning di pinggir jalan kampung RT 004/RW 006 Dusun Klurahan, Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.

Patok itu bertuliskan “batas sempadan Danau Rawa Pening, milik negara, dilarang merusak.” Patok itu dipasang oleh orang-orang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana dan tentara-tentara dari Kodam IV/Diponegoro.

Patok setinggi 40-an cm itu telah terpasang sejak 2021. Selama itu pula Kasiyan tak tenang. Jika ditarik garis lurus, rumahnya termasuk dalam batas patok tanah tersebut.

Artinya, rumah yang ditempatinya sejak puluhan tahun lalu itu terancam hilang diambil negara, meski nyata-nyata ia memiliki bukti sertifikat kepemilikan tanah.

“Saya takut keberadaan patok itu nanti akan merampas tanah dan rumah yang telah menjadi hak milik saya selama bertahun-tahun, bahkan mungkin seratusan tahun sejak kakek saya tinggal di sini,” kata pria 65 tahun ini kepada Tim Kolaborasi pada Sabtu petang, 23 September 2023.

Kasiyan tak sendirian. Tanah dan rumah miliknya bukan satu-satunya yang masuk pengukuran patok itu. Tak hanya tanah pribadi, tanah kas desa dan tanah negara pun tak luput dari pematokan. Gambarannya, patok-patok itu dipasang melingkari Danau Rawa Pening.

Ia berkata warga sebenarnya tak mempermasalahkan revitalisasi Rawa Pening asalkan untuk mengatasi masalah sedimentasi danau. Namun, jika melihat ada pematokan seperti yang terjadi sekarang, proyek ini justru jadi perluasan alih-alih revitalisasi.

“Penduduk di sini, kampung ini, sudah ditempati sejak nenek moyang. Tanah di sini, tanah leluhur, yang perlu kami amankan, lestarikan. Dibuktikan mulai zaman Belanda,” katanya.

“Sebelum ada Republik Indonesia, simbah kami sudah hidup di kampung ini,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Joko Susanto, warga RT 1 RW 3 Baan, Kelurahan Asinan, Kecamatan Bawen.

Tanahnya yang dipatok oleh tentara Kodam Diponegoro dan petugas dari BBWS Pemali-Juana merupakan milik leluhurnya. Mereka sudah menempati perkampungan lebih dari 100 tahun. Maka, ia tidak terima saat dituding telah menyerobot “tanah negara”.

“Kami itu warga pribumi jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, mereka tiba-tiba datang pasang patok, menuduh kami serobot tanah negara,” ujar Joko, yang juga Sekretaris Perhimpunan Petani Nelayan Rawa Pening.

Bogi Subasti, warga Banyubiru yang rumahnya di dekat Rawa Pening, menjelaskan bahwa desa di sekitar rawa sudah ada sejak sebelum era kolonial Hindia Belanda.

Hal itu dibuktikan ada Candi Dukuh di sebuah bukit di pinggir Rawa Pening, tepatnya di Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru. Ada yang

menduga candi itu peninggalan Brawijaya V sebab ada yang menamai candi ini dengan nama Candi Brawijaya, katanya.

Melihat strukturnya, katanya, Candi Dukuh agaknya adalah candi Hindu yang mirip Candi Arjuna di Dieng, Candi Ngempon dan Candi Gedong Songo di Kab. Semarang.

“Candinya berbentuk kotak, berukuran 5,8 m x 5,8 m menghadap ke Timur. Jika ditambah pelataran, ukurannya sekitar 5,8 m x 9 m. Candi ini terbuat dari batuan andesit. Diperkirakan dibangun pada abad ke-9 pada masa Dinasti Sanjaya Mataram Kuno,” terang Subasti.

Di Candi Dukuh itu terdapat relief Nandiswara yang digambarkan seperti mahadewa tapi hanya bertangan dua buah. Nandiswara berasal dari kata nandi, kendaraan Dewa Siwa dan Iswara, salah satu aspek Dewa Siwa. Terdapat juga Kala Kirtimukha, Makara, Lingga-Yoni. Di bagian puncak candi, terdapat stupa.

Catatan Arkeolog

Arkeolog asal Prancis, Veronique de Groot, dalam *Candi, Space and Landscape: a Study on the Distribution, Orientation and Spatial Organization of Central Javanese Temple Remains* (2009), mencatat mengenai penelitian R.H.T. Friederich, arkeolog kolonial Belanda, yang menjelaskan terlihat samar-samar bekas tembok pembatas di dekat Candi Dukuh. Ia menduga jejak samar itu mirip tembok pembatas Candi Arjuna di dataran tinggi Dieng

“Beberapa arca yang ditemukan di sekitarnya antara lain satu Ganesa, seekor Banteng, tiga lingga, satu Agastya, satu yoni, dan satu Durgā,” tulis Veronique de Groot, mengutip tiga penelitian arkeolog Belanda, Friederich, Verbeek, dan Krom.

Di luar catatan arkeolog, keberadaan Candi Dukuh sempat dicatat pegawai kolonial Belanda dalam buku *Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie* (1850).

Di buku itu ada catatan pengamatan kondisi kandungan air mineral di Tjandji Doekoeh, juga di sekelilingnya ditemukan sisa-sisa patung dan batu berornamen berasal dari zaman Brahmana, dengan dugaan mungkin para Brahmana mempunyai tempat pemandian di sana.

Terakhir, keberadaan Candi Dukuh sempat dicatat Raden Mas Arya Candranegara V, Bupati Kudus. Dalam buku edisi kedua berjudul *Lampah-Lampahipun Raden Mas Arya Purwalelana* (1880), sang bupati mencatat salah satu perjalanannya saat mengunjungi sebuah perbukitan kecil bernama Candi Dukuh. Ia naik ke puncak bukit itu dan melihat sebuah makam tidak tertutupi. “Dari kesaksian penduduk setempat, makam itu merupakan makam Prabu Brawijaya, Raja Majapahit ke-3,” tulis laporan perjalanan tersebut.

Di tempat itu Candranegara V dapat melihat Rawa Pening secara keseluruhan dengan lebih jelas. Ia mengambil kesimpulan, dibandingkan disebut rawa, ia lebih sekuat menyebutnya telaga atau danau. Ini karena lokasi Rawa Pening persis berada di tengah-tengah atau dihimpit gunung sekitarnya.

Cerita asal-usul Rawa Pening juga muncul dalam laporan arkeolog Belanda R.H. Th. Friederich saat meneliti sejarah Candi Gedong Songo. Dalam tulisannya, *Rapport over reizen gedaen op java*, Friederich mendapati cerita dari mantan lurah desa Nglaran, Kjahi Basar, bahwa tahun 118, yang menurut legenda terjadi banjir besar melanda Ambarawa yang dibawa oleh Dewa Wisnu, Rawa Pening dikatakan sebagai sisa-sisanya. Legenda ini mengisahkan banjir terjadi saat Radja Mangsapati Kerajaan India.

Saat masa kolonial Hindia Belanda, wilayah sekitar Rawa Pening merupakan tempat yang kerap dikunjungi pejabat pemerintah kolonial. Sepanjang abad 19, setidaknya dua pejabat penting pemerintahan kolonial menempatkan kunjungan ke sekitar Rawa Pening.

Pejabat pertama adalah Willem Frederik Hendrik, anak ketiga dari Raja Belanda Willem Frederik George Lodewijk. Saat kunjungan ke Hindia Belanda, ia menempatkan melihat kondisi Rawa Pening pada 1837.

Dalam laporan resmi yang ditulis Sekretaris Umum Pemerintahan Hindia Belanda, J.P.Cornels de Groot berjudul *Overzicht der Reis in Nederlandsch Indie, zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden, Gedurende het jaar 1837*, perjalanan anak raja Belanda itu mengunjungi dua tempat. Pertama ke Desa Asinan. Kedua, pergi untuk memberikan nama benteng militer di Ambarawa yang tengah dibangun dengan nama ayahnya, Willem II. Kedua tempat ini hanya berjarak beberapa meter dari Rawa Pening.

“Di Assinan, sebuah tanah yang dimiliki Tuan P. H. de la Brethonière, yang saat itu termasuk dalam Karesidenan Surakarta tapi wilayahnya masuk dalam distrik Ambarawa, Willem Frederik Hendrik tinggal beberapa hari untuk mengunjungi tempat-tempat sekitarnya,” tulis laporan tersebut.

Kunjungan pejabat pemerintah kolonial selanjutnya adalah Gubernur Jenderal Dominique Jacques de Eerens pada 19 Juni 1838 yang dimuat dalam artikel berjudul *De reis over java, in 1838 van den gouverneur generaal van Nederlandsch Indie* yang tertuang dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie: 21ste Jaargang, Eerste Deel*.

Kunjungan Gubernur Jenderal de Eerens mirip dengan perjalanan Willem Frederik Hendrik. Ia mengunjungi Desa Asinan untuk mampir ke rumah P. H. de la Brethonière. Laporan itu menjelaskan sawah di Desa Asinan, sebelah timur Rawa Pening, awalnya termasuk bagian Rawa Pening.

“Nama Assinan berasal dari kata *nassin* yang berarti asin karena tanahnya mengandung garam. Adapun penamaan Rawa Pening berasal dari rawa, dan pening berasal dari kata *bening*, berarti jernih atau terang,” tulis laporan tersebut.

Esok harinya, Gubernur Jenderal Dominique Jacques de Eerens menyempatkan datang ke pembangunan Benteng Willem I. Usai kunjungan itu, ia kembali beristirahat di Asinan dan esoknya meninggalkan wilayah tersebut untuk berkunjung ke Karesidenan Surakarta dengan melewati Sungai Tuntang, hulu dari Rawa Pening.

Luas Rawa Pening

Kondisi luas Rawa Pening pada abad 19 dapat diketahui dari catatan Pieter Bleeker, seorang dokter dan ahli ikan Belanda, dalam artikel *De Vallei van Ambarawa en de vesting willem I* yang dimuat dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie: Jaargang 1850, Eerste Deel*.

Ia menulis perkiraan panjang dan lebar Rawa Pening 4.400 hasta. Jika dikonversi, 1 hasta setara 45 cm, maka luas Rawa Pening saat itu 392,04 ha.

Meski tak lengkap, kondisi Rawa Pening pernah ditulis A.J. van der A..A. dalam *Nederlandsch Oost-Indie of Beschrijving der Nederlanden Bezittingen in Oost Indie, voorafgegaan van een beknopt overzicht van de vestiging en uitbreiding der magt van nederland aldaar, derde deel*.

Saat itu, Van der A.A menulis Rawa Pening memiliki panjang enam paal atau tiang, atau jika dikonversi setara 9,0414 km. Sayang, ia tidak menulis berapa lebar Rawa Pening sehingga tak diketahui pasti berapa luas Rawa Pening yang dilihatnya.

Catatan lain yang sedikit berbeda dari H.W. van Waeij, mantan serdadu Belanda, dalam artikel *Aanslibbingen van Meeren, Moerassen, Poelen en de Zeekusten op Java yang dituang dalam Tijdschrift voor Nederlandsch Indie: Vijfde Jaargang, Eerste Deel*.

Ia menulis keadaan Rawa Pening. Ia menghitung danau itu memiliki panjang 10 paal dan lebar 5 paal. Jika dikonversi, satu paal setara 1506,9 m, maka luas Rawa Pening berkisar 11,362 ha.

Ia juga mengingat pada 1822 saat menjabat kepala pertama satuan zeni, pernah mendapati kabar ada rencana pemerintah kolonial mengeringkan Rawa Pening. Namun, rencana ini ditunda sejak 1819 dan tidak terjadi. Satu-satunya yang dilakukan pemerintah kolonial saat itu mengalirkan air Rawa Pening melewati jembatan Tuntang hingga ke Sungai Demak.

Menjamurnya Eceng Gondok Dikira sebagai ‘Pulau’

i Rawa Pening bukan tak punya daya tampung. Sering kali Rawa Pening meluap. Hal ini pernah tercatat dalam *Aadrijkskundig woordenboek der Nederlanden volume 9 yang terbit tahun 1847*.

Pada 1838, sebagian wilayah Desa Rawa-Siwel yang saat itu masuk Distrik Salatiga, Karesidenan Semarang, tenggelam dan terendam limpasan air Rawa Pening. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dan hanya mengakibatkan kerugian berupa ternak milik warga yang hilang ditelan banjir.

Bencana Rawa Pening berupa banjir saat itu tak bisa dilepaskan kondisi sedimentasi Rawa Pening. Saat itu penamaan tumbuhan eceng gondok belum terkenal. Banyak penduduk justru mengira muncul sebuah daratan di tengah Rawa Pening yang disebutnya sebuah pulau.

Keberadaan “pulau” itu juga pernah diamati Candranegara V. Saat mendekat, ternyata itu bukanlah pulau, melainkan hanya rerumputan dengan panjang tiga puluh kaki. Rerumputan itu terbentuk karena ada berbagai pohon kecil yang tumbang dan berkumpul menjadi satu tempat di rawa tersebut.

Lama kelamaan di tempat pohon yang tumbang itu tumbuh rumput, dan pohon yang tumbang itu jadi hilang. Alhasil, yang tersisa hanya sebuah rumput yang tumbuh.

Ia juga mendengar banyak orang meninggal di Rawa Pening saat menaiki perahu. Mereka meninggal karena dihantam ombak besar dan terhanyut. Cerita orang-orang yang selama ini dipercayai oleh orang-orang Belanda bahwa kedalaman Rawa Pening saat itu 200 depa. Banyak masyarakat desa yang malah mempercayai dalamnya hingga dasar bumi.

Amatan Candranegara V atas “pulau” yang ada di Rawa Pening ternyata bukan tak diperhatikan pemerintahan kolonial saat itu.

Asosiasi Kolonial Belanda di Amsterdam (*Associatio Coloniale Nederlands a Amsterdam*) dalam *Revue Coloniale Internationale*, mencatat bagaimana laporan A. Stoop, insinyur pertambangan, kepada Residen Semarang terkait asal-usul sebuah “pulau kecil” yang muncul di atas Rawa Pening pada 4-5 Februari 1885.

“Pulau itu terjadi karena pembusukan sisa-sisa tanaman yang ditemukan dalam jumlah besar di lapisan tanah bawah,” tulisnya.

Hal ini menyebabkan berkembangnya berbagai macam gas. Gas-gas ini, karena tak dapat keluar melalui tanah yang kedap air, menerima pemuai sedemikian rupa sehingga mampu mengangkat tanah hingga batas tertentu dan akhirnya lepas, membawa serta sebagian dari lahan gambut setengah cair.

Surat kabar *De Millioen Voor Indies*, terbit pada 10 Juli 1937, melaporkan pemerintah kolonial tak tinggal diam mengatasi sedimentasi Rawa Pening. Pada 1937, lantaran eceng gondok dianggap merugikan penduduk sekitar mencari ikan, ada pembersihan secara masif tanaman eceng gondok, yang saat itu disebut “sawah yang terapung”.

Di luar bencana air, kondisi Rawa Pening pernah mengalami bencana berupa gempa bumi. Buku *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie* (Volume 1) menulis gempa bumi terjadi selama dua kali, pada 1865 dan 1872.

Bedol Desa, Dampak Pembangunan PLTA Jelok

Memasuki tahun 1936, pemerintah kolonial Belanda melalui perusahaan ANIEM membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jelok. Pembangunan ini selesai dua tahun. Untuk keperluan PLTA Jelok, pemerintah memutuskan bedol 30-an desa.

“Dari gubuk paling sederhana hingga rumah besar dengan material batu yang untungnya rumah jenis terakhir ini hanya muncul secara sporadis, pemiliknya mendapat ganti rugi 5 hingga 600 gulden. Rata-rata masyarakat menerima 15-20 gulden,” tulis surat kabar *De Locomotief*, 8 Oktober 1937.

Dari data yang dihimpun Bogi Subasti sejak abad 19, dampak meluapnya Rawa Pening hingga kehadiran PLTA Jelok, setidaknya ada 50 desa yang dipaksa pindah.

Adapun desa yang tenggelam berada di selatan, barat, dan utara Danau Rawa Pening. Warga yang bedol desa mencari ke desa yang lebih aman.

Rata-rata desa itu berada di pinggiran hilir sungai Kali Rengas, Panjang (Ambarawa), Kali Torong, Kali Galeh (perbatasan Ambarawa-Banyubiru), Kali Jungul, Kali Legi (Tegaron), Kali Muncul (Rowoboni), Kali Parat (perbatasan Muncul-Kali Glagah), Kali Sraten (Rowosari), Kali Kedung Ringis/Ringin (Candirejo).

Hal itu karena debit air semakin meningkat dari area Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran.

Sementara di sebelah timur, desa-desa yang berada di tepi Rawa Pening tidak tenggelam hingga saat ini. Desa ini di antaranya Desa Sangin Kesongo, Tegalombo (Tjelombo, Calombo), Klurahan, Cikal, dan Semurup.

Daftar Desa yang Hilang

No.	Nama Desa/Kampung	Wilayah Sekarang	Keterangan
1.	Rowo Kantjng	Desa Tegaron	Membuat desa baru Gondang Sari, Candi Sari, Pindah ke Candi Dukuh
2.	Rowo Kindjeng/Gendjing	Desa Tegaron	Membuat desa baru Desa Wates, Gondang Sari, Candisari
3.	Rowo Gono	Desa Tegaron	Pindah ke Krajan, Sukodono
4.	Rowo Wiro	Tidak terdeteksi	Tidak terdeteksi, mungkin desa yang berpindah ke Ngentasan, Bukit Cinta
5.	Rowo Boni	Desa Rowoboni dan Desa Tegaron	Bedol desa membuat desa baru Sukodono, Donosari, Krajan
6.	Rowo Soejoet	Desa Rowoboni	Pindah ke Rowo Gandjar, Rowo Kasam
7.	Rowo Pasiah	Desa Rowoboni	Pindah ke Rowo Gandjar, Rowo Kasam
8.	Rowo Danis	Desa Rowoboni	Pindah ke Rowo Gandjar, Rowo Kasam
9.	Rowo Sentoel	Desa Rowoboni	Pindah ke Rowo Gandjar, Rowo Kasam
10.	Rowo Kassam	Desa Rowoboni	Pindah ke dekat Rowo Gandjar, dan mempertahankan nama Rowo Kassam

11.	Rowo Potro	Desa Rowoboni	Pindah ke Rowo Gandjar, Rowo Kasam
12.	Rowo Singo	Desa Rowo Sari	Membuat desa baru Desa Rowo Sari
13.	Rowo Bandjer	Desa Rowo Sari	Membuat desa baru Desa Rowo Sari
14.	Rowo Siwil	Desa Rowo Sari	Membuat desa baru Desa Rowo Sari
15.	Rowo Roenkoes	Desa Rowo Sari	Membuat desa baru Desa Rowo Sari
16.	Rowo Boesoek	Desa Rowo Sari	Membuat desa baru Desa Rowo Sari
17.	Rowo Bidin	Desa Rowo Sari	Membuat desa baru Desa Rowo Sari
18.	Rowo Ragem	Desa Rowo Sari	Membuat desa baru Desa Rejosari
19.	Rowo Mendoeng	Desa Rowo Sari	Membuat desa baru Desa Rejosari
20.	Rowo Sawit	Desa Rowo Sari	Membuat desa baru Desa Rejosari
21.	Rowo Redo	Desa Rowo Sari	Membuat desa baru Desa Rejosari
22.	Rowo Tegal Sari	Desa Rowo Sari	Membuat desa baru Desa Rejosari
23.	Rowo Singo	Desa Rowo Sari	Membuat desa baru Desa Rejosari
24.	Rowo Mati	Desa Kalibeji	Pindah ke Rowo Sabi

25.	Rowo Redja	Desa Candiredjo	Pindah ke Candirejo
26.	Rowo Goembal	Desa Candiredjo	Pindah ke Candirejo
27.	Gempol/Dempol	Desa Ngasinan	Pindah ke Asinan, Semurup
28.	Wates	Desa Ngasinan	Pindah ke Telego Asinan
29.	Ngaglik	Desa Bejalen	Pindah ke Bedjalen
30.	Rowo Batok	Desa Bejalen	Pindah ke Bedjalen
31.	Belok	Desa Bejalen	Pindah ke Bedjalen
32.	Rowo Kandhi	Desa Bejalen	Pindah ke Bedjalen
33.	Nglarangan	Desa Bejalen	Pindah ke Bedjalen
34.	Wonosarie/Wonoredjo	Desa Bejalen	Pindah ke Bedjalen
35.	Rowo Redja	Desa Bejalen	Pindah ke Bedjalen
36.	Ploembon/Ploembong	Desa Bejalen	Pindah ke Bedjalen
37.	Rowo Majem/Magem	Desa Bejalen	Pindah ke Bedjalen
38.	Rowo Radin	Desa Bejalen	Pindah ke Bedjalen
39.	Rowo Pakel	Desa Bejalen	Pindah ke Bedjalen
40.	Rowo Ritjik	Desa Bejalen	Pindah ke Sanggar Pojoksari
41.	Rowo Badjoel	Desa Bejalen	Pindah ke Rowo Bajul Pojokasari

42.	Bodjong	Tidak terdeteksi	Mungkin pindah ke Pojoksari
43.	Rowo Kerta	Desa Bejaten	Pindah ke Pojoksari dan Bejaten
44.	Rowo Radja/Roto	Desa Bejaten	Pindah ke Pojoksari dan Bejaten
45.	Doekoeh Rowo	Desa Banyubiru	Berubah jadi Balong Sari Pindah ke Keping, bergabung ke Cerbonan.
46.	Balong Sari	Desa Banyubiru	Pindah ke Cerbonan, Tegaltwuni
47.	Kokosan	Desa Banyubiru	Bergabung ke Tegaltwuni
48.	Lemah Ireng	Desa Banyubiru	Pindah ke Tegaltwuni
49.	Rowo Walirang	Desa Banyubiru	Pindah ke Tegaltwuni
50.	Goebloegang	Desa Kebondowo	Pindah ke Kebonbawang

Sumber: wawancara dengan Bogi Subasti

Setelah ada PLTA Jelok, banyak data yang dihimpun menampilkan luas Rawa Pening secara berbeda-beda. Publikasi Binnenvisserij Indone-sia 1941-1950 menulis luas Rawa Pening 1.700 ha saat air maksimum dan 1.500 ha saat air minimum.

Laporan Kementerian Penerangan dalam Propinsi Djawa Tengah tahun 1953 menulis luas Rawa Pening maksimum 2.000 ha dan luas Rawa Pening minimum 900 ha. Beda lagi dengan Laporan Badan Pusat Statistik Kabu-paten Semarang tahun 1983 yang mencatat luas Rawa Pening maksimum 2.020 ha dan luas Rawa Pening minimal 1.750 ha.

Joko Susanto, warga Desa Asinan, berkata batas antara Rawa Pening dan batas pemukiman warga sebenarnya sudah jelas dengan keberadaan patok merah dan patok hitam yang dulu pernah diketahui warga sekitar. Patok batas merah itu dulu digunakan sebagai batas tanah yang dimiliki warga dan tanah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Kemudian patok hitam itu merupakan batas air dari Rawa Pening. (*)

